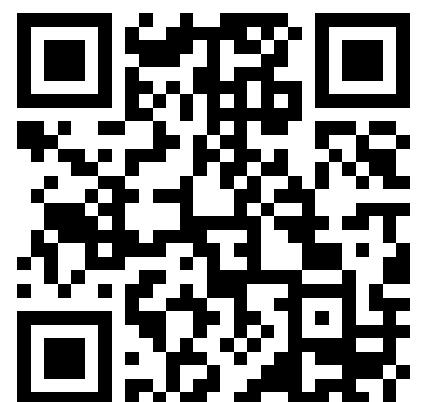

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>



GRAD
HT
169
. I54
J79
1998



KARTA MEMBANGI

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA - 1





UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

Digitized by Google

JAKARTA MEMBANGUN



Girad
HT
169
154
J73
1998

JAKARTA MEMBANGUN

PENANGGUNG JAWAB

Ir. Budihardjo Soekmadi, M.Si - Ketua BAPPEDA DKI Jakarta

PENGARAH

Drs. H. Purwanto Heru Wibowo - Wakil Ketua BAPPEDA DKI Jakarta

KOORDINATOR

Ir. H. Muzahiem Mokhtar - Sekretaris BAPPEDA DKI Jakarta

TIM PENULIS

H. Basri Rochadi, BSt. - Ka. Sub. Bag. Dokinfo BAPPEDA DKI Jakarta

Drs. H. Nurdin Bakry - Ka. Sub. Bag. Umum BAPPEDA DKI Jakarta

Drs. H. Eddy Djunaedi - Ka. Seksi Peragaan BAPPEDA DKI Jakarta

Drs. Salehuddin Effendi, MM - Ka. Seksi Pemerintahan BAPPEDA DKI Jakarta

Drs. Iman Santosa - Ka. Sub. Bag. Keuangan BAPPEDA DKI Jakarta

Margani M. Mustar, MSc. Dipl. SE - Ka. Seksi Fisik dan Prasarana Bidang Penelitian

Mustofa Hakim, BSc. - Ka. Sub. Bag. PPRK BAPPEDA DKI Jakarta

Sarminto Mulyo Saputro, SH - Staf Sub. Bag. Umum BAPPEDA DKI Jakarta

TIM PENYELARAS

Ir. Sarwo Handhayani - Ka. Bidang Penelitian BAPPEDA DKI Jakarta

Ir. Roetjito, SE - Ka. Bidang Ekonomi BAPPEDA DKI Jakarta

Ir. Rusdi Yusuf - Ka. Bidang Fisik Prasarana BAPPEDA DKI Jakarta

Ir. Dado Yosida - Ka. Bidang Stalap BAPPEDA DKI Jakarta

Dra. Rohana Manggala - Ka. Bidang Sosbud BAPPEDA DKI Jakarta

TATA LETAK & KOMPUTER GRAFIK

Grapos Design

EDISI

Indonesia

PENERBIT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DKI Jakarta

TAHUN PENERBITAN

1998

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR KETUA BAPPEDA DKI JAKARTA	4
SAMBUTAN GUBERNUR KDKI JAKARTA	5
RINGKASAN	6
JAKARTA, 471 TAHUN	9
Periode Pra-Kemerdekaan	10
Periode Pra-Pelita (Tahun 1945 - 1968)	15
Periode Pelita	17
Periode 1992-1997	21
JAKARTA, IBUKOTA NEGARA	30
Citra Jakarta	32
Pemerintahan	35
JAKARTA, KOTA NIAGA	39
Perkembangan Ekonomi	40
Mega Bisnis	43
Usaha Kecil	46
JAKARTA, KOTA INDUSTRI	48
Kebijaksanaan Investasi	50
Kawasan Industri	52
JAKARTA, KOTA BUDAYA DAN RELIGIUS	56
Penduduk	56
Pendidikan	63
Agama	64

JAKARTA, KOTA TUJUAN WISATA	66
Pelabuhan Tradisional Sunda Kelapa	68
Taman Fatahillah	69
Museum Wayang	71
Stasiun Kota	71
Balai Seni Rupa	71
Bangunan Tua	72
Glodok dan sekitarnya	72
Jalan Gajah Mada - Hayam Wuruk	73
Kantor Pos	74
Katedral	74
Pasar Baru	75
Kawasan Condet	75
Museum Pusat	77
Taman Mini Indonesia Indah	79
Monumen Nasional	80
Kawasan Ancol	80
Kebun Binatang Ragunan	81
Kepulauan Seribu	81
Wisata Belanja	82
Wisata Konvensi	84
Investasi Pariwisata	85
JAKARTA, KOTA JASA (SERVICE CITY)	86
Menuju Abad 21	88
Hunian Vertikal	91
Sistem Transportasi Angkutan Massal	95
Jakarta Kota Pantai, Pintu Gerbang Kota Lewat Laut	99
Super Blok	102
Kerjasama Antar Kota	104
Lingkungan Hidup	105
Penghijauan	106
Sampah	108
Banjir	109
JAKARTA-JAKARTA	111
Agenda 21	112

KATA PENGANTAR KETUA BAPPEDA DKI JAKARTA

*W*assalamu'alaikum Wr. Wb.

Melalui penyajian informasi yang faktual dan aktual, citra Jakarta yang saat ini terus berbenah diri dalam menjadikan dirinya sebagai kota jasa yang sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia akan terbentuk. Terlebih lagi saat ini kita berada di era globalisasi dan keterbukaan yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, berbagai hal yang berhubungan dengan penyajian informasi menjadi sangat penting dan strategis.

Oleh karena itu, buku Jakarta Membangun ini disusun untuk menyajikan informasi hasil-hasil pembangunan kota Jakarta, yang telah berlangsung selama enam tahapan Pelita hingga saat ini.

Buku ini diharapkan bukan saja memberikan gambaran mengenai hasil-hasil pembangunan Jakarta, tetapi juga bermanfaat sebagai salah satu referensi perencanaan pembangunan. Pada sisi lain, informasi yang disajikan juga diharapkan memberikan cakrawala pandangan yang lebih luas kepada tamu-tamu Pemerintah DKI Jakarta, baik dari dalam negeri maupun manca negara dalam memahami misi dan visi pembangunan kota Jakarta.

Mudah-mudahan publikasi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Februari 1998

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA) DKI JAKARTA

KETUA,



Ir. BUDIHARDJO SOEKMADI, M.Si.

NIP. 470029984



SAMBUTAN GUBERNUR KDKI JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setiap upaya untuk mempromosikan kota Jakarta, perlu didukung semua pihak baik instansi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat luas. Dalam mempromosikan kota Jakarta, pemerintah telah banyak melaksanakan kegiatan, antara lain melalui jalur promosi pariwisata dan budaya ke manca negara, penerbitan brosur dan lain sebagainya.

Di tengah - tengah upaya penghematan dan efisiensi disemua aspek, saya menyambut baik prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menerbitkan buku "**Jakarta Membangun**". Publikasi yang menyajikan data, informasi dan visualisasi hasil-hasil pembangunan DKI Jakarta sampai dengan akhir tahun 1997/1998 ini, diharapkan mampu memberikan gambaran lebih lengkap dan lebih aktual tentang sukses pembangunan di Ibukota.

Diharapkan pula publikasi ini, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber data bagi perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kota Jakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Februari 1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

SUTIYOSO

SUTIYOSO



RINGKASAN

*K*ota Jakarta telah mencapai usia 471 tahun. Dari beragam sisi perjalanan Jakarta, nampak jelas, ibukota negara Republik Indonesia ini mengalami banyak hal. Dari pengembang pertama Kerajaan Tarumanegara kemudian Pakuan Pajajarán, wilayah yang kala itu dikenal sebagai Sunda Kelapa kota Pelabuhan dan pusat perdagangan selalu menjadi incaran kaum pendatang.

Pada abad 15 sampai dengan abad 18, para pedagang Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan berbagai pedagang asal Asia berusaha mengembangkan sayapnya ke Sunda Kelapa. Namun Portugis yang saat itu didukung armada laut dan tentara lebih kuat dari penjelajah Eropa dan Asia lainnya berhasil menguasai Sunda Kelapa. Selanjutnya sebuah perjanjian kerjasama dan perlindungan terhadap kawasan itu pun disusun. Namun, sebelum semua itu terjadi, bala tentara yang dipimpin Fatahillah, dengan bekal amunisi dan laskar yang berasal dari Kerajaan Demak, Jawa Tengah serta berbagai bantuan dari Penguasa Cirebon, Banten dan sekitarnya, berhasil menguasai kawasan Sunda Kelapa untuk kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta.

Sunda Kelapa atau Jayakarta yang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam sistem transportasi laut kala itu tetap menjadi incaran para penjelajah dunia. Sampai kemudian, VOC hadir menapakkan kaki dan kemudian Pemerintah Kerajaan Belanda merubah Jakarta menjadi Batavia untuk menjajah negeri kepulauan Nusantara.

Selama masa penjajahan, berbagai gejolak yang dibangkitkan oleh para pejuang tanah air terus berlangsung. Sampai kemudian kalangan cerdik pandai dan muda usia mulai menghimpun diri mendirikan berbagai organisasi sebagai manifestasi kesadaran akan nasib tanah air, bangsa dan negara yang dicita-citakan sehingga menjadi suatu kekuatan pembebasan dan kemerdekaan. Sampai kemudian berkat Rahmat Allah SWT, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Namun ternyata masih begitu banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam membangun negeri tercinta ini. Sejumlah pergolakan terus melanda, yang kemudian dengan perjuangan yang tidak kenal menyerah semuanya bisa diatasi sampai kemudian terjadi peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965 yang dikendalikan Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa yang telah menghilangkan nyawa ribuan rakyat dan pemimpin bangsa seolah menyentak kembali kesadaran bangsa Indonesia yang kemudian memunculkan era baru.

Pemerintahan yang secara murni dan konsekuensi kembali kepada konstitusi UUD 1945 dengan membangun negara ini dengan titik berat pada pembentahan ekonomi melalui tahapan pembangunan lima tahunan, Pelita demi Pelita.

Keberhasilan pembangunan, khususnya DKI Jakarta berdampak pada meningkatnya arus migrasi yang cukup besar. Akibatnya, Jakarta yang pada awal abad 20 diproyeksikan hanya untuk menampung penduduk 600 - 800 ribu jiwa kini menjadi sebuah megapolis dengan implikasi sosial-ekonomi dan budaya muncul dan saling kait-mengait sehingga perlu dicermati oleh para perencana pembangunan. Jakarta saat ini telah masuk diantara 23 megapolis dunia atau satu diantara 13 megapolis Asia. Berbagai dampak dan kendala timbul dari gejala urbanisasi dan telah meningkatkan jumlah penduduk Jakarta mendekati 10 juta jiwa dengan pertambahan penduduk yang juga relatif tinggi.

Kemacetan lalu lintas, kejahatan, pencemaran lingkungan, banjir, lahan yang makin sempit telah membawa implikasi-implikasi masalah perkotaan. Semua ini tentu saja perlu terus dicarikan jawabannya dengan menyiapkan banyak pilihan. Secara strategis Jakarta memasuki Pelita VII terus didorong untuk menjadi kota jasa (service city), pilihan secara teoritis sangat memungkinkan untuk menuju industri manufaktur dan akhirnya pada industri jasa.

Adapun untuk menangani sebagian penduduk Jakarta yang masih berada dalam belenggu kemiskinan sejumlah upaya pengentasan melalui berbagai program juga terus diupayakan, diantaranya meningkatkan program MPMK (Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan). Terlebih lagi dalam suasana keprihatinan, program MPMK ini menjadi sangat strategis dan bermanfaat.

Tekad utama dari semua upaya yang memang membutuhkan curah dana, daya, motivasi dan dedikasi tinggi itu adalah agar Jakarta sebagai Ibukota RI dapat berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya serta dihuni oleh warga kota yang penuh sejahtera.

Jakarta, Februari 1998

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA) DKI JAKARTA

KETUA,



Ir. BUDIHARDJO SOEKMADI, M.Si.
NIP. 470029984



JAKARTA

471 TAHUN

*T*ahun 1998, Jakarta genap berusia 471 tahun. Pada awalnya kota ini terletak di pantai Utara dengan nama Sunda Kelapa. Kelahiran kota Jakarta ditandai dengan dirayakannya kemenangan Fatahillah atas tentara Portugis pada tanggal 22 Juni 1527, dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti " Kemenangan Sempurna ".

Jakarta sejak dulu hingga kini ibarat gula, begitu banyak mengundang pendatang dari berbagai daerah, bahkan dari segala penjuru dunia. Catatan sejarah menunjukkan jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa, telah datang masyarakat dari Cina, Arab, India, baru kemudian Portugis, Spanyol, yang kemudian diikuti VOC Belanda dan Inggris, sampai kemudian, Jakarta jatuh ke tangan penguasaan Belanda serta Jepang.

Berbagai pergolakan terjadi dan setelah kemerdekaan, Jakarta menjadi ibukota negara Republik Indonesia. Tahapan demi tahapan pembangunan dilewati, sejak sebelum Pelita hingga kini tahapan Pelita memasuki akhir periode ke-6, dari pembangunan pertanian, industri manufaktur dan kini menuju kota jasa Namun, di balik itu Jakarta ternyata harus tumbuh sebagai kota yang menikmati dan sekaligus memikul risiko paling besar dari pertumbuhan kota, dengan salah satu indikator proyeksi penduduk Jakarta 2005 akan mencapai 12 juta jiwa.

Ini semua akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan perumahan, jalan, angkutan umum, lapangan kerja hingga dampak sosial ekonomi dan budaya akibat dinamika pembangunan yang bentuknya sangat multiragam.

Di samping itu, karena perkembangan yang demikian pesat, dampak pembangunan Jakarta terus mengarah ke bagian Timur, menjangkau Bekasi, Cikarang serta ke arah Barat menjangkau Tangerang, Serang dan ke Selatan menuju Depok, Bogor, sehingga Jakarta dan kota-kota sekitarnya berkembang sebagai suatu region yang dikenal dengan sebutan JABOTABEK.



PERIODE PRA-KEMERDEKAAN

Catatan sejarah mengenai masyarakat pertamakali yang bermukim dan hidup secara teratur di Jakarta sekarang ini adalah penduduk Kerajaan Tarumanegara, sekitar tahun 500-an. Perkembangan Jakarta dimulai dari Sunda Kelapa, yang terletak di muara Ciliwung dengan luas 1-2 hektar. Perjalanan sejarah dapat diikuti melalui temuan beberapa prasasti, salah satunya prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 dan ditemukan di Daerah Tugu Jakarta Utara, yang kemudian lebih dikenal dengan Batu Tugu.

Di atas batu tersebut dituliskan, bahwa Raja Tarumanegara pernah memerintahkan rakyatnya untuk melakukan penggalian dua sungai buatan sepanjang 11 kilometer. Langkah ini oleh para ahli sejarah disimpulkan sebagai salah satu petunjuk bahwa saat itu mulai berkembang tatanan sosial, pemerintahan dan teknologi.

Selanjutnya, catatan mengenai perkembangan kawasan ini ditemukan kemudian pada beberapa catatan tersebut. Sunda Kelapa merupakan pelabuhan kerajaan Pakuan Pajajaran yang berpusat 60 kilometer di sebelah Selatan tepian pantai. Pada saat itu kegiatan perdagangan sudah berkembang luas, hingga banyak kapal asing dari berbagai negara singgah ke pelabuhan ini.

Pada awal abad XV, Sunda Kelapa menghadapi cukup banyak tantangan, baik dari kerajaan-kerajaan tetangga seperti Banten, Cirebon dan Demak maupun dari asing, utamanya Portugis. Pada tahun 1522 dijalin sebuah kesepakatan kerjasama dan untuk mengukuhkan perjanjian tersebut dibuatlah batu peringatan atau Padrao (baca Padrong), kemudian dikenal pula sebagai Batu Padrao, yang ditemukan di dekat Kalibesar.



Sebelum perjanjian tersebut dilaksanakan, datanglah Fatahillah menyerbu Sunda Kelapa dan menyurutkan hegemoni pedagang-pedagang Portugis untuk membuat loji-loji baru di Sunda Kelapa. Sampai kemudian Fatahillah pada 22 Juni 1527 menguasai sepenuhnya pelabuhan Sunda Kelapa dan memberi nama Jayakarta, yang berarti "kemenangan yang sempurna". Di beberapa dokumen sejarah penjelajah Eropa, ditulis dengan Yacatra serta kemudian menjadi Jakarta.

Setelah kemenangan Fatahillah, pengaruh Portugis dan Pajajaran semakin menyusut. Sebaliknya, kapal-kapal Belanda semakin banyak datang ke Bandar Jayakarta. Menurut pedagang Belanda yang berkunjung tahun 1596, bandar ini dikelilingi pagar kayu dan berpenduduk sekitar 3.000 keluarga atau 15.000 jiwa. Pusat kotanya terletak di sebelah Barat muara Ciliwung.

Pada 28 Mei 1619 Belanda VOC di bawah Jan Pieterszoon (JP) Coen, menguasai Jakarta. Untuk kemudian VOC mendirikan Kerajaan Jakarta, dan nama Jakarta dirubah menjadi Batavia. Sementara itu, masyarakat yang terdesak serta para pemukanya menyingkir ke daerah Angke di bagian Barat dan Jatinegara Kaum di bagian Timur.

Sejak saat itu, bersamaan dengan terus meningkatnya permintaan masyarakat Eropa akan rempah-rempah dan menyusutnya peranan pelabuhan Banten, Batavia berkembang demikian pesat. Dalam waktu singkat luas wilayahnya menjadi 6,1 hektar, terbentang dari Pantai Utara (Pasar Ikan) sampai sedikit melewati lokasi yang pada masa berikutnya digunakan untuk gedung Bank Export Import. Adapun bentuk kotanya merupakan kota pertahanan model Eropa dengan tembok tebal disekelilingnya dan benteng pada sudut-sudutnya. Sementara itu, pusat kotanya



adalah Stadhuis van Batavia atau Balaikota yang sekarang menjadi Museum Jakarta, di muka Taman Fatahillah. Di luar benteng berkembang pemukimam pribumi, Arab dan Cina.

Jumlah penduduk Batavia pada akhir abad pertama setelah pendudukan Belanda berkisar 25.000-50.000 jiwa. Sekitar 10 persen kelahiran Eropa (terutama personel VOC yang direkrut dari Eropa), 20 persen campuran Eropa dan pribumi, 30 persen keturunan Cina. Sisanya, 40 persen merupakan campuran penduduk asli dan penduduk Asia lainnya.

Perkembangan Batavia selanjutnya ditandai dengan digalinya terusan Molenvliet (berada di tengah Jl. Hayam Wuruk dan Majapahit) yang diusulkan oleh seorang Kapten Cina, Phoa Bingam. Kanan-Kiri Molenvliet kemudian tumbuh menjadi permukiman-permukiman mewah di samping sepanjang Jacatraweg (Jl. Pangeran Jayakarta), yang mengawali perkembangan Batavia Baru ke arah lebih Selatan, serta menggeser kota pantai ke kota daratan.

Perkembangan ini dilanjutkan terus ke wilayah Weltevreden (Puas Hati), wilayahnya kini di Kecamatan Gambir dan sekitarnya, yang kemudian pada masa Daendels dijadikan Ibukota Batavia dengan luas 107 hektar.

Mula-mula Gubernur Jenderal Daendels, awal abad 19 membuat sebuah istana baru di dekat tempat parade, yang juga dikenal dengan Medan Merdeka, menyusul kemudian Lapangan Banteng, kemudian diikuti berbagai bangunan penting, antara lain Gedung Kesenian tahun 1821, Gereja Immanuel 1839, Gedung Mahkamah Agung 1848, Katedral 1829, kemudian runtuh pada 1890, dan dibangun kembali pada 1898. Sementara itu, juga dibangun kawasan Pasar Baru sebagai daerah pertokoan bergengsi, setelah sebelumnya dibangun Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen, sehingga luas Batavia meningkat pesat menjadi 2.600 hektar.

Memasuki abad 20, terjadi perubahan di Batavia. Terjadinya perkembangan kota secara pesat. Berbagai prasarana kota dalam skala makro juga mulai digarap. Saluran pengendali banjir atau banjir kanal juga sudah mulai dibangun dari Karet-Tanah Abang terus ke laut. Demikian pula rel kereta api yang dimulai dengan jalur tengah dan Timur, kemudian ditambah dengan jalur Barat melalui Manggarai-Tanah Abang-Duri-Kota.

Dalam hal pembangunan banjir kanal, perencanaannya telah dilakukan sejak tahun 1870, tidak lama setelah Batavia dilanda banjir besar dan baru selesai pada tahun 1920. Menurut proyeksi saat itu, Batavia akan dihuni penduduk sebanyak 600 ribu jiwa. Menteng dan Kuningan disiapkan menjadi daerah elit. Tanah Abang untuk orang Arab dan Melayu, Glodok untuk pecinan. Senen sebagai daerah perdagangan, dan Gambir untuk pusat pemerintahan.

Upaya-upaya tersebut khususnya untuk mengembangkan lingkungan permukiman yang lebih teratur dilakukan dengan membeli tanah-tanah partikelir, seperti Menteng, Gondangdia, Kramat Lontar, Jatibaru, Karet dan Bendungan Udik. Rencana pengembangan itu ditetapkan tahun 1917-1918. Demikian juga dengan perbaikan kampung yang mulai dilakukan sejak 1925, kemudian terhenti oleh Perang Dunia (PD) II dan kemudian diteruskan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1969 dengan program MHT.

Untuk pengembangan lingkungan permukiman, daerah Menteng merupakan suatu contoh dengan standar yang tinggi. Pola prasarana jalan dan saluran yang baik, taman dan ruang terbuka juga cukup memadai.



Adapun pendesain dan pelaksana pembangunan di kawasan ini adalah Badan Bouwploeg yang berkantor di Taman Cut Mutiah dan lokasinya kini dipergunakan untuk Masjid Cut Mutiah.

Sementara itu di sekitar Lapangan Merdeka juga dibangun Kantor Telepon tahun 1909, Gedung Perhubungan Laut (dulu kantor KPM) tahun 1916, Gedung Departemen Pertahanan dan Keamanan (dulu sekolah Tinggi Hukum) tahun 1928, gedung Pertamina (dulu kantor BPM) tahun 1938 dan lain sebagainya.

Di tengah areal Lapangan Merdeka tersebut terdapat taman, lapangan olah raga IKADA dan beberapa bangunan seperti stasiun Gambir dan kantor telpon. Salah satu lapangan di sini kemudian dipakai sebagai Pasar Gambir, yang juga dikenal sebagai Jaarmarkt atau pasar malam yang diselenggarakan setiap tahun. Kegiatan ini sempat menghilang dan kemudian diadakan kembali pada tahun 1968 dengan nama Jakarta Fair.

Di tengah PD II, Maret 1942, Jepang masuk ke pulau Jawa dan sama sekali tidak ada kegiatan pembangunan di Batavia. Namun, dalam rangka propaganda, Batavia diganti namanya menjadi Djakarta Toku Betsu Shi. Untuk pelaksanaan pemerintahan kota diangkatlah seorang Walikota bangsa Jepang dengan wakil orang Indonesia (Soewirjo). Penguasaan Jepang yang tidak lama atas kepulauan Indonesia ternyata menjadi kerusakan yang sangat banyak, hampir semua bangunan indah dan hotel dijadikan barak tentara yang tidak terawat. Sampai kemudian, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56 (Jalan Proklamasi) memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu penduduk Jakarta diperkirakan baru mencapai 200.000 jiwa.



PERIODE PRA-PELITA

Setelah kemerdekaan, terjadi perubahan struktur kota secara besar-besaran sebagai dampak dari migrasi penduduk. Sementara itu, kota Jakarta dibagi menjadi 7 kawedanan : Gambir, Jatinegara, Tanah Abang, Senen, Mangga Besar, Tanjung Priok dan Penjaringan.

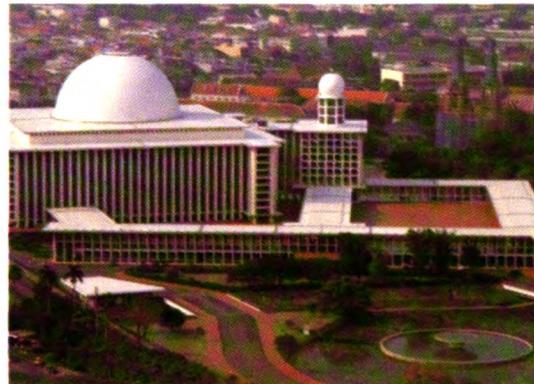
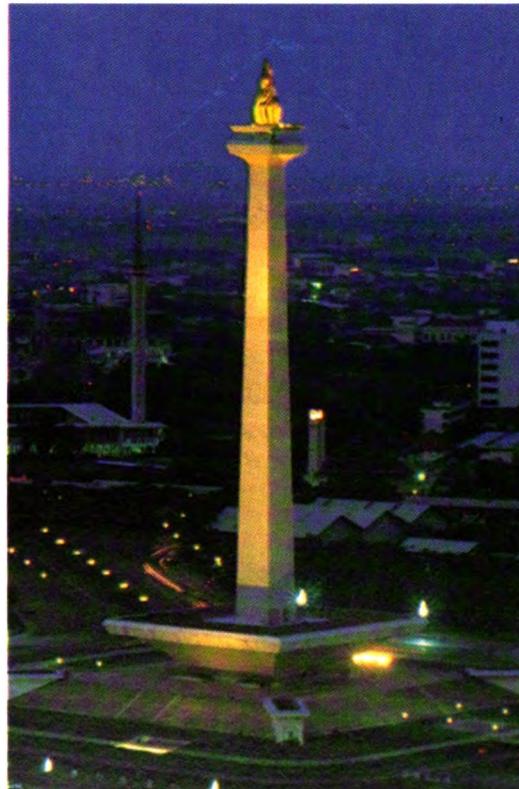
Adapun pembangunan fisik kota setelah diperolehnya kemerdekaan Indonesia hingga awal tahun 1950-an yang paling menonjol adalah pengembangan kota satelit Kebayoran serta beberapa permukiman baru lainnya, seperti Sentiong Besar Wetan, Petojo Centrum, Kompleks Tanjung Karang, Slipi, Jembatan Duren, Sentiong, dan komplek gedung-gedung di Kebon Sereh, Jatinegara.

Selanjutnya Kota Jakarta dikukuhkan sebagai Kotapraja Jakarta Raya dibagi menjadi tiga wilayah kota administratif : Jakarta Utara, Jakarta Tengah, dan Jakarta Selatan. Pada masa Sudiro status Kotapraja Jakarta Raya ditingkatkan menjadi Daerah Istimewa Khusus Tingkat I, dan Sudiro sebagai Gubernur pertama.

Sejak 1959, perkembangan ibukota menjadi bagian politik mercusuar yang bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai inti The New Emerging Forces (Kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh). Sukses-sukses sejak Konperensi Asia-Afrika di Bandung (1955) turut mendorong dalam pewujudan Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan Asian Games IV (Pesta Olah Raga Se Asia) 1962, kemudian menyusul Games of The New Emerging Forces (GANEFO) pada 1963. Sementara itu, Gubernur yang menjadi Kepala Daerah saat itu adalah Brigadir Jenderal DR. H. Sumarno Sastroatmodjo (1960-1964), kemudian diganti Henk Ngantung (1964-1965), dan kembali kepada Sumarno (1965-1966). Selanjutnya tahun 1965, Jakarta

secara resmi ditetapkan sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia.

Sebuah tugu besar yang megah dibangun di tengah-tengah kota, dikenal sebagai Tugu Nasional (Monas). Selain itu, pembangunan gedung-gedung penting seperti gedung DPR/MPR, gedung CONEFO (Conference of New Emerging Forces), dan gedung-gedung administrasi lainnya. Jembatan-jembatan besar seperti Jembatan Semanggi dan Jembatan Ampera juga dibangun untuk mempermudah perjalanan di kota.





PERIODE PELITA



Pecahnya G.30.S/PKI pada tahun 1965, hanya mampu menghentikan sementara gerak perkembangan kota Jakarta. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan keuangan serta sosial politik, disahkan Rencana Induk (Master Plan) Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1965-1985, pada tanggal 3 Mei 1967 oleh DPR-GR DKI Jakarta. Dan pada tahap awal pelaksanaan Rencana Induk ini, selama 1967-1969, dikukuhkan Pola Rehabilitasi Pembangunan DKI Jakarta.

Bentuk dan arah perkembangan kota Jakarta, yang saat ini telah mencapai 65.000 hektar, ditentukan agar terjadi pemekaran kota yang seimbang ke segala arah. Titik pancar perkembangan wilayah kota adalah Tugu Monumen Nasional (Monas), di tengah-tengah Taman Medan Merdeka. Radius pancar perkembangan wilayah kota yang merata itu terhadap titik pancarnya Tugu Monas adalah 15 kilometer.

Pada masa awal Gubernur Ali Sadikin penduduk Jakarta telah mencapai 3,6 juta jiwa. Tercatat kurang lebih 60 persen penduduk Jakarta tinggal di perkampungan yang sangat padat dan kumuh. Di banyak daerah kepadatannya berkisar antara 4.000 dan 6.000 jiwa per km². Kemacetan lalu lintas terjadi pada jaringan jalan-jalan yang jumlahnya sangat terbatas, rata-rata antara jumlah mobil dan panjang jalan ialah 200 kendaraan per kilometer. Telekomunikasi baru dapat memenuhi pelayanan terhadap 26.000 pesawat. Listrik hanya mampu memenuhi 13 persen kebutuhan kota. Demikian juga dengan air minum yang baru dinikmati oleh 12,5 persen penduduk kota.

Jumlah penduduk pada kondisi awal Pelita I yang telah melampaui proyeksi jumlah penduduk pada masa pembentukan Jakarta yang hanya 600 hingga 800 ribu jiwa, telah menjadikan kemajemukan permasalahan yang dihadapi Jakarta begitu berat.

Berbagai tantangan tersebut berhasil diatasi. Salah satu solusi yang dilakukan pada Pelita I, DKI Jakarta ini adalah dengan memberikan proporsi yang cukup besar bagi pembangunan bidang prasarana, rata-rata mencapai 40 persen. Di samping itu untuk mengatasi permukiman kumuh, maka Pemerintah DKI Jakarta juga melancarkan Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT). Hasilnya, sarana dan prasarana meningkat, demikian juga dengan fasilitas pendidikan dasar dan menengah, proporsi lingkungan kumuh menurun dan lain sebagainya.

Pada periode ini juga ditandai dengan dibangunnya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan dilakukannya penertiban serta pembangunan pelabuhan-pelabuhan, seperti Pelabuhan Udara Internasional Soekarno-Hatta. Pelabuhan Samudera ditetapkan di Tanjung Priok, Pelabuhan Nusantara Sunda Kelapa, Pelabuhan Nelayan Muara Angke, Pelabuhan Kayu Marunda dan Pelabuhan Minyak Kali Baru, serta dicanangkannya Jakarta sebagai wilayah percontohan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB).

Hal lain yang patut dicatat pada periode Bang Ali adalah dengan dilakukan perombakan struktur organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seperti dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan (BPP) pada 19 Juni 1968, dan kemudian menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Untuk membendung arus migrasi pada periode Bang Ali, Jakarta dinyatakan sebagai kota tertutup bagi pendatang baru.

Memasuki Pelita III, Gubernur KDKI Jakarta dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Tjokropranolo (1977-1982), yang kemudian dikenal dengan “Bang Noli”. Prioritas pembangunan DKI Jakarta memasuki periode ini mulai bergeser prioritasnya, dari yang semula menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana kota menuju kepada pembangunan sosial budaya yang dikenal dengan istilah religius sosialistik. Langkah ini sebetulnya juga telah dimulai pada era Bang Ali, terutama setelah memasuki Pelita II dengan memberikan proporsi anggaran pembangunan sosial budaya rata-rata sebesar 60 persen dari total anggaran pembangunan DKI Jakarta, dan lebih dikukuhkan pada era Bang Noli.

Tantangan sosial budaya yang ada memang menjadi demikian majemuk, terutama bila dikaitkan dengan perkembangan penduduk DKI Jakarta yang pada awal 1980 telah mencapai 6,5 juta jiwa, atau hampir dua kali lipat dari jumlah penduduk pada awal Pelita I.

Memasuki tahapan Pelita IV, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dijabat oleh R. Suprapto (1982-1987). Pada saat itu penduduk Jakarta telah mencapai 7 juta jiwa, dan kemajemukan permasalahan kota pun menjadi demikian sarat. Catatan penting pada periode ini adalah dengan dimulainya penggunaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sekaligus menggantikan fungsi Bandara Kemayoran dan Halim Perdana Kusuma. Di samping itu, pada periode ini juga ditandai dengan dikukuhkannya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005 yang terbagi dalam Rencana Bagian Wilayah





Kota (RBWK) dan lebih mikro lagi menjadi Rencana Terinci Kota (RTK).

Memasuki Pelita V, Gubernur KDKI Jakarta dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Wiyogo Atmodarminto (1987-1992). Penduduk Jakarta pada saat awal Bang Wi menduduki jabatan Gubernur telah lebih dari 7 juta jiwa dan menjadi 8,5 juta jiwa pada akhir masa baktinya.

Pada era ini ada beberapa hal yang patut dicatat. Pertama dengan adanya pemberlakuan motto Bersih, Manusiawi dan Berwibawa (BMW) serta berbagai kebijaksanaan lain yang menyangkut berbagai aspek pembangunan. Antara lain dengan ditingkatkannya pembangunan dan perluasan berbagai jalan raya, arteri, jalan layang (fly over), jalan tembus (underpass), pembebasan becak, swastanisasi kebersihan, mengembalikan fungsi Taman Merdeka (di kawasan Monas) termasuk pemindahan Arena Pekan Raya Jakarta ke kawasan bekas Bandara Internasional Kemayoran, pengalihan terminal bus kota dan antar kota dari Cililitan ke Kampung Rambutan, pelaksanaan silaturahmi di Minggu pagi, program kali bersih, operasi yustisi dan kebijaksanaan lima hari kerja dalam satu minggu bagi karyawan Pemerintah DKI Jakarta.

Masih dalam kurun Pelita V Gubernur KDKI Jakarta mengalami pergantian dari Wiyogo Atmodarminto kepada Mayor Jenderal TNI Surjadi Soedirdja, dan Jakarta pun mempunyai motto baru, Teguh Beriman yang ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 1997, tanggal 24 Mei 1997.





PERIODE 1992 - 1997



Jakarta pada periode 1992 - 1997 relatif mempunyai kemajemukan permasalahan yang lebih tinggi. Penduduknya kini telah mencapai 9,5 juta jiwa (pada malam hari) dan lebih dari 10 juta di siang hari, dengan kepadatan rata-rata 14.000 jiwa tiap km². Adapun pertumbuhan penduduknya terakhir tercatat 2,09 persen.

Permasalahan kependudukan ini cukup pelik, meskipun selama ini Jakarta melalui program Keluarga Berencana telah mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk alamiah, namun, pertumbuhan dari migrasi masih cukup tinggi. Angka migrasi ini bahkan menjadi demikian nyata pada setiap setelah hari raya Idul Fitri yang rata-rata menghadirkan migran baru ke ibukota sekitar 200 ribu

jiwa. Kehadiran pendatang baru yang rentang umurnya rata-rata berkisar 19-40 tahun dengan bekal pendidikan dan ketrampilan yang relatif minim, menjadikan kerumitan baru bagi Jakarta dengan aneka sosial-ekonomi dan budaya yang serba majemuk.

Ini merupakan salah satu pendukung sehingga permasalahan Jakarta digambarkan sebagai besar, berat dan kompleks. Karena Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia, tentu saja harus mampu menjadi tauladan dan sekaligus menampilkan citra yang baik bagi kota-kota di Nusantara yang tersebar dari ujung Sabang hingga Merauke. Kenyataan ini, ternyata juga tidak luput dari perhatian Kepala Negara, yang dengan arief berpesan , agar Jakarta mampu berdiri sejajar dengan kota-kota besar di dunia serta dihuni oleh masyarakat yang sejahtera.

Pesan itu memang sarat makna serta jangkauannya pun jauh ke depan menembus kerangka global mondial (world wide) yang pada abad mendatang akan semakin disarati dengan berbagai kompetisi namun tetap diwujudkan dalam misi kemanusiaan. Selanjutnya, agar pesan tersebut menjadi visi bagi pembangunan Jakarta, maka disusunlah berbagai program pembangunan untuk mewujudkannya yang tetap disandarkan pada berbagai ketentuan formal seperti : Pola Dasar Pembangunan Daerah; Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005 kini RTRW; Repelita Daerah dan Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD).

Di tengah upaya merumuskan program kerja selama lima tahun pada awal jabatan Gubernur Surjadi Soedirdja, yang di dalamnya juga terlibat kalangan ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan pers ibukota disepakati pula mengembangkan motto bagi pembangunan Jakarta, yakni "Teguh Beriman". Dua kata yang sarat muatan religius ini merupakan ekspresi dari kondisi masyarakat Jakarta dengan dinamika pertumbuhan tata nilai dengan cepat bersamaan dengan modernisasi. Dengan motto ini pula, diharapkan masyarakat Jakarta tetap bisa bertahan terhadap tantangan dan godaan dalam bentuk apapun, karena ada landasan iman yang teguh sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Pada bulan Maret 1997, motto "Teguh Beriman" ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembangunan yang kini tengah melintasi Pelita VI, harus diakui memberikan banyak hasil di samping masalah yang mengiringi hasil itu sendiri. Salah satu berkah pembangunan itu terlihat nyata dari parameter

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi variabel peringkat harapan hidup, peringkat melek huruf, rata-rata lama mengenyam bangku sekolah serta kemampuan daya beli. dari pengukuran Biro Pusat Statistik, Propinsi DKI Jakarta tercatat meraih nilai tertinggi bila dibanding dengan 26 propinsi lainnya di Indonesia, 56,7.

Sebagai pembuktinya adalah angka harapan hidup penduduk Jakarta yang pada 1996 telah mencapai 69,7 tahun, melampaui prestasi nasional yang baru 63 tahun. Untuk pendidikannya, sebanyak 57,2 persen warga Jakarta saat ini telah mampu menuntaskan pendidikan hingga SLTP, jauh melampaui prestasi nasional yang baru 28 persen. Angka melek hurufnya, pada tahun 1990, sebagaimana hasil sensus penduduk telah mencapai 95,06 persen dan pendapatan perkapitanya pada tahun 1996 telah mencapai US\$ 3,600, lebih tinggi dari yang dicapai tingkat nasional US\$ 917.

Prestasi peningkatan pendapatan perkapita memberikan dampak pada penurunan angka kemiskinan yang pada 1996 tinggal 2,48 persen penduduk Jakarta, atau 231.000 jiwa. Walaupun memang, Jakarta masih menyisakan angka pengangguran cukup tinggi 11,7 persen dari usia angkatan kerja atau 400.000 orang pada 1996, di samping kesenjangan sosial yang masih cukup tinggi. Hal terakhir ini diindikasikan oleh gini rasio yang pada 1996 mencapai 0,43.

Tanpa mengesampingkan aneka permasalahan Jakarta yang memang cukup rumit, secara umum pembangunan yang telah dilakukan selama ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kesuksesan ini kemudian menjadi salah satu pendorong bagi meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat. Realitas kesadaran akan hak yang juga disertai dengan semakin dikembangkannya keterbukaan yang lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan di banding pendekatan keamanan telah turut mendorong ruang gerak demokratisasi di segala lapisan masyarakat. Realitas ini juga terjadi sebagai salah satu konsekwensi globalisasi yang didukung serbuan informasi dengan tema-tema sentral masalah demokrasi, hak asasi dan lingkungan hidup.

Salah satu catatan yang cukup menarik dalam hal ini selama lima tahun terakhir ini adalah pada jumlah unjuk rasa yang di DKI Jakarta tercatat sebanyak 286 kali, atau tidak kurang dari 5 kali setiap bulannya atau 1 kali setiap pekan. Ini membuktikan masyarakat Jakarta semakin dewasa dan semakin berani mengemukakan pendapatnya

Dengan menjelajahi kampung-kampung perkotaan tempat sebagian warga Jakarta bermukim di gang kumuh dan becek serta padat setiap minggu pagi (SMP) dan kunjungan kerja Jum'at (KKJ), dengan bergandengan tangan bersama para ulama melalui silaturahmi antara ulama dan umara, semua permasalahan dicoba atasi bersama, melalui dialog, komunikasi berimbang dan saling imbal balik yang menjadi kata kunci dari semua itu.







Sebagai pemimpin dan pelayan masyarakat ibukota, Gubernur Surjadi mencoba menjadi pelayan masyarakat yang baik bagi aneka lapisan sosial penduduk Jakarta, ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat, pengusaha, generasi muda, majlis taklim, mahasiswa, tunawisma, dan lain sebagainya secara intensif terus diantisipasi keinginan dan kebutuhannya. Kepada para dhu'afa (fakir miskin), Gubernur Surjadi juga terus menyapanya, "Saya trenyuh (tidak tega, terharu), apabila ada warga Jakarta yang hidup kesrakat (papa dan nestapa). Mereka tinggal di gubug-gubuk, rumah-rumah kardus, di pinggir rel kereta api, di bantaran kali atau bawah jembatan. Padahal, harkat dan martabat mereka tidak berbeda dengan warga kota lainnya, mereka harus diangkat dan diperlakukan secara manusiawi", demikian pernah diungkapnya.

Karena itu, ajakan untuk meningkatkan martabat kepada para dhu'afa itu sangat kerap ia lakukan dan ungkapkan, ".....lebih baik kembali ke kampung halaman yang relatif mudah berteduh dan bekerja dengan hidup tenang, tidak kemrungsung (terburu-buru)," dan kepada mereka juga ditawarkan untuk ikut program transmigrasi. Semua itu, menampakkan kesolehan dan rasa sosial Gubernur yang cukup tinggi. Gubernur menginginkan adanya pendekatan kemanusiaan dalam mengatasi beragam masalah





khususnya yang hadir bersamaan dengan aneka ragam belenggu kemiskinan.

Di kesempatan lain beragam jenis pembinaan aparatur terus diupayakan, dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Gubernur dengan tiada henti-hentinya mengkampanyekan asas-asas kepemimpinan yang meliputi : Komitmen, yang berarti teguh dalam memikul tugas dan tanggung jawab di samping bersedia memikirkan dan mencari pemecahan, bersedia memikirkan dan mencari pemecahan masalah dan bukan mempermasalahkan masalah serta mempunyai komitmen bahwa berbagai kemajuan yang telah diperoleh selama ini semata-mata bukan karya perorangan tetapi sebagai hasil dari sebuah kerja tim yang terjalin utuh serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Kredibilitas, yang berarti tetap tegak karena mempunyai etika moral, teguh pendirian, percaya diri serta cermat dan waspada terhadap segala hal. Integritas, yang berarti utuh sebagai anak bangsa, peka terhadap kepentingan masyarakat dan menyadari betapa mahalnya persatuan. Konsisten, yang berarti tidak gampang berubah, rendah hati dan ojo dumeh betapapun keputusan terakhir ada padanya. Ikhlas dalam menjalankan tugas dan Teguh Beriman betapapun godaan dan ancaman selalu siap menghadang.

Sejak awal kepemimpinan Gubernur Surjadi Soedirdja telah sangat disadari bahwa hasil pembangunan yang telah dicapai saat ini adalah merupakan akumulasi dari perjuangan sebelumnya. Namun juga disadari,

di samping sejumlah hasil yang diperoleh itu juga masih tersisa beragam masalah di samping kemajemukan tantangan yang akan hadir. Untuk itu, disusunlah sebuah Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan DKI Jakarta 1992-1997 yang diharapkan dapat mengatasi dan memecahkan masalah yang terjadi, mempertahankan hasil yang telah dicapai dan menjawab tantangan yang menghadang dihadapan yang selalu berkembang. Dari hasil kesepakatan yang telah dicapai, maka disusunlah 9 (sembilan) Renstra Pembangunan DKI Jakarta yang hingga awal 1997 telah mencatatkan prestasi. Pembinaan Kependudukan, Titik beratnya adalah pada pengendalian penduduk yang saat ini jumlahnya telah mencapai 9,5 juta jiwa. Upaya pengendalian itu dilakukan melalui pengendalian migrasi, KB dan juga transmigrasi. Di samping itu juga dimanfaatkan melalui program pengembangan Botabek sebagai permukiman alternatif dan operasi yustisi kependudukan serta yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan propinsi lain se Jawa-Bali dalam wadah SAD PRAJA dan kerjasama antar kota melalui wadah Badan Kerjasama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI). Adapun, indikasi hasil yang dapat diperoleh dari program ini adalah dengan menurunnya angka pertumbuhan penduduk dari 2,41 persen pada awal pelaksanaan Renstra menjadi 2,09 persen pada tahun ke empat Repelita VI.

Pembinaan Aparatur, Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme aparatur dilakukan melalui program Diklat Propinsi. Selain itu juga dititikberatkan pada pengawasan melekat (Waskat), disiplin kerja, produktivitas dan pola karier. Pembinaan aparatur juga ditempuh melalui pembinaan mental keagamaan, serta mengaitkannya dengan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam kaitan GDN ini, Jakarta merupakan daerah percontohan pelaksanaan GDN yang telah dilaksanakan sejak 20 Mei 1995. Adapun pemantauan yang dilaksanakan meliputi, budaya kerja, budaya bersih dan budaya tertib pada kantor-kantor pemerintah, terminal, pemberhentian bus, pasar, lokasi kakilima, telpon umum serta tempat-tempat umum lainnya.

Peningkatan Penerimaan Daerah. Hal ini ditempuh melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, baik pajak, retribusi daerah maupun kontribusi BUMD DKI Jakarta dan sumber penerimaan lainnya. Dengan upaya tersebut terbukti penerimaan asli daerah (PAD) Jakarta selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan 26,85 persen per tahun. Angka ini melampaui target yang hanya 20 persen per tahun. Adapun jumlah PAD yang diterima adalah sebesar Rp.753,90 miliar pada tahun anggaran 1992/1993 dan pada 1996/1997 meningkat menjadi 1,87 triliun. Dari semua hasil itu, penyumbang terbesar berasal dari pembagian laba BUMD yang pada 1992/1993 sebesar Rp. 15,92 miliar, menjadi Rp. 57,26 miliar pada 1996/1997.

Kebersihan dan Penghijauan, Cukup banyak upaya yang ditempuh Pemerintah DKI Jakarta untuk hal ini dan hasil yang diperoleh pun cukup menggembirakan. Untuk kebersihan misalnya, pada awal pelaksanaan Renstra jumlah sampah berhasil diangkut ke Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) baru mencapai 69,87 persen dan kemudian meningkat menjadi 84,66 persen pada 1996/1997. Hal yang sama juga nampak pada peningkatan kualitas air kali. Misalnya pada indikator Chemical Oxygen Demand (COD)





kali Ciliwung yang pada 1989 rata-rata masih 21.166,7 kg per hari telah menyusut drastis menjadi 1.369 kg per hari pada 1996. Hal yang sama juga terjadi pada indikator Biochemical Oxygen Demand (BOD) yang pada kurun yang sama menurun dari 10.541,3 kg per hari menjadi 498,8 kg per hari. Walaupun memang, pada indikator partikel terlarut (Suspendeg Solid) dalam kurun waktu yang sama terjadi peningkatan 227,7 kg per hari menjadi 532,9 per hari.

Pada Bidang penghijauan yang diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang dikemas dalam Program Gerakan Sejuta Pohon, pada September 1996 telah berhasil ditanam 3.831.271 pohon dari target 4 juta pohon sejak dicanangkan Presiden Soeharto, 10 Januari 1993. Di samping itu, upaya untuk penghijauan ini juga dilakukan melalui pembangunan 14 lokasi hutan kota dan menambah ruang terbuka hijau (RTH) yang saat ini sudah mencapai 18.179,68 Ha. Dan, upaya ini akan terus dilanjutkan dengan menambahkan ruang terbuka hijau seluas 8.270,72 Ha, hingga nantinya bisa mencapai luas ideal RTH sebesar 40 persen dari total luas kota. Pengembangan RTH ini juga dilakukan pada Taman Pemakaman Umum (TPU).

Sementara itu, untuk menanggulangi pencemaran udara, laut dan kali beberapa program yang ditujukan untuk mengatasi lingkungan di kawasan tersebut juga terus diintensifkan melalui Program Kali Bersih (Prokasih), Program Udara Bersih (Prodasih) dan Program Laut Lestari (Sibelut). Untuk Prokasih, saat ini telah mencapai tahapan penindakan bagi pelanggar ketentuan baku mutu limbah industri. Sementara itu, untuk program udara bersih dengan Langit Biru sampai saat ini telah dipasang alat pemantau udara otomatis sebanyak 17 buah, pembangunan POM BBG, kampanye penggunaan bahan bakar gas dan pelaksanaan uji petik emisi pada gas buang kendaraan bermotor.

Penanganan Permukiman Kumuh, upaya penataan ini terkait dengan penataan kota secara keseluruhan. Adapun program-program yang telah ditempuh untuk mewujudkannya antara lain : Program MHT yang mencakup upaya Bina Lingkungan, Bina Sosial dan Bina Ekonomi; Program HKSN; AMD MKJ serta berbagai program lainnya yang antara lain melalui pembangunan rumah susun murah di kawasan-kawasan kumuh yang cukup strategis.

Lalulintas dan Angkutan Umum, Renstra ini ditujukan untuk meningkatkan rambatan kendaraan agar laju angkutan manusia dan barang dapat semakin baik. Adapun upaya-upayanya ditempuh melalui perbaikan maupun pembangunan sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan umum, dengan membangun 25 simpang susun (fly over). Di samping itu untuk mengatasi kepadatan/kemacetan lalulintas, dilaksanakan pula pengaturan lalulintas Sistem Satu Arah (SSA), jalur khusus Bus dan Three In One.

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat, Prioritas pelayanan yang ditingkatkan meliputi pelayanan administrasi kependudukan, IMB, ketatakotaan dan pertanahan, pelayanan kesehatan, KB dan lain sebagainya.

Pembinaan Sektor Informal, sebagai salah satu pelaku ekonomi perkotaan, sektor informal mempunyai peranan yang cukup diperhitungkan, walaupun memang keberadaannya kerap dianggap sebagai penyebab sejumlah masalah. Karena itu, upaya pemecahan masalah sektor informal namun sekaligus menggali potensi

yang dimilikinya terus dikembangkan. Upaya yang ditempuh antara lain melalui penyediaan 250 lokasi yang diharapkan mampu menampung 9.346 pedagang kaki lima. Selain itu, juga dikembangkan embrio pasar di Pulo Gundul (Jakarta Pusat) untuk menampung 75 pedagang, Tipar (Jakarta Utara) menampung 54 pedagang, Meruya Ilir (Jakarta Barat) 204 pedagang, Bintaro (Jakarta Selatan) 270 pedagang dan Makasar (Jakarta Timur) 345 pedagang. Di samping itu juga ada beberapa lokasi binaan kaki lima di Jalan Palmerah (Jakarta Barat) untuk 600 pedagang, Jalan Abdul Gani (Jakarta Pusat) untuk 360 pedagang, Lorong 103 Tanjung Priok (Jakarta Utara) untuk 470 pedagang serta Jalan Raya Bogor (Jakarta Timur) untuk 250 pedagang.

Di samping menyediakan lahan baru, pembinaan sektor informal dilakukan dengan memberikan penyuluhan manajemen usaha dan bantuan permodalan yang dikoordinasikan oleh BKPSI/GUSK.

Keterpaduan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan, Renstra ini diarahkan untuk meningkatkan peranserta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Adapun beberapa hal yang cukup mencolok dari bidang ini adalah pada terus meningkatnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pengadaan sarana kebersihan, MCK, pembangunan tempat-tempat ibadah, perbaikan sarana umum, pengumpulan dana ZIS, santunan terhadap orang-orang kurang mampu termasuk GNOTA di bidang program wajib belajar 9 tahun, pengembangan Warung Serba Ada (Waserda) melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) dan lain sebagainya.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, periode 1992-1997 ini meraih banyak sukses dan pemerolehan penghargaan. Namun patut disadari bahwa, keberhasilan apapun yang telah dicapai, secara alamiah akan membuka masalah-masalah baru yang tentu saja memerlukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Bagaimanapun, pembangunan merupakan rangkaian proses berkesinambungan (on going process) yang mempunyai ciri hakiki dalam bentuk terjadinya perubahan, kemajuan dan pembaruan.





JAKARTA IBUKOTA NEGARA



*B*anyak momentum penting dalam sejarah kebangkitan nasional terjadi di Jakarta, antara lain lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Kenyataan sejarah itu tidak dapat dipungkiri sampai kemudian Jakarta dijadikan Ibukota Negara Republik Indonesia, sekaligus pula sebagai Daerah Tingkat I yang bersifat khusus.

Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta mengembangkan citra dalam skala nasional dan internasional serta selalu merupakan barometer bagi perkembangan keseluruhan bangsa Indonesia.

Sebagai Daerah Tingkat I, Jakarta mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan Daerah Tingkat I lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang lebih majemuk. Kemajemukan permasalahan itu berkaitan erat dengan faktor luas Jakarta yang terbatas, jumlah penduduk yang tinggi dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek permukiman, penataan wilayah, transportasi, komunikasi, lingkungan dan faktor-faktor lainnya.

Untuk menjawab tantangan yang serba majemuk tersebut, maka dirasakan sangat penting untuk membina dan menumbuhkembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan,





pelaksanaan dan pengendalian, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, terpadu namun tetap terkendali.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara administratif dibagi menjadi 5 wilayah Kotamadya yang mempunyai kedudukan setingkat dengan Daerah Tingkat II. Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, di tiap Kotamadya dibentuk Lembaga Musyawarah Kota (LMK).

Sebagai konsekwensi dari kedudukannya sebagai Ibukota Negara, Jakarta juga menjadi tempat penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara; Pusat kegiatan kehidupan politik nasional; Tempat penyelenggaraan acara-acara kenegaraan; Tempat kedudukan kedutaan negara-negara sahabat, sehingga perkembangan Jakarta secara langsung maupun tidak langsung juga mencerminkan citra masyarakat Indonesia. Hal tersebut menambah beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang dihadapi, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan.

CITRA JAKARTA

Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia, harus dapat tumbuh sejajar dengan ibukota negara-negara lain yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Dengan kenyataan ini berarti ada tiga hal yang berkaitan dan membentuk citra Jakarta, yakni Jakarta sebagai pusat kegiatan politik dan pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi nasional dan pusat kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai pusat kegiatan politik dan pemerintahan, pengelolaan DKI Jakarta terus dikembangkan dan ditujukan untuk mewujudkan aparatur yang berwibawa dan mendapat kepercayaan masyarakat serta mempunyai prasarana dan sarana yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan pusat pemerintahan. Hal ini berarti kepastian hukum dan peraturan serta pelaksanaannya secara konsisten dalam upaya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan pengakuan yang mantap akan hak dan kewajiban warganya dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Pada giliran berikutnya penegakan disiplin masyarakat dalam menjalankan kewajiban dalam tata hubungan masyarakat yang sehat dan kaya akan kearifan juga dapat dilakukan.

Sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta terus dikembangkan untuk memerankan fungsinya sebagai dinamisator yang fasilitatif bagi berbagai transaksi ekonomi lokal, regional, nasional maupun internasional. Manifestasi dari hal ini adalah dengan terus dikembangkannya pusat-pusat informasi yang andal, penyediaan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi yang memadai baik untuk kepentingan sektor ekonomi formal maupun informal dan tersedianya sistem pelayanan komunikasi dan transportasi yang andal.

Sebagai pusat kegiatan pelayanan kepada masyarakat, Jakarta terus ditumbuhkan untuk menjadi teladan dalam memberikan kesempatan bagi warganya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari aspek ekonomi, psikhososial, pendidikan, budaya, politik maupun untuk pelayanan kotanya. Untuk itu, pemerintah bersama masyarakat luas dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur kehidupan ditujukan dalam rangka pengembangan kepentingan warganya. Di samping itu, juga dilakukan pembinaan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Pada pembinaan lingkungan hidup dan permukiman yang bersih, sehat dan manusiawi, diupayakan terbinanya semangat kebersamaan dan kemitraan di antara warga Ibukota.

Ini semua dilakukan agar Jakarta sebagai ibukota mempunyai citra aparat yang berwibawa, masyarakat yang sejahtera dan citra lingkungan yang bersih serta indah.







PEMERINTAHAN

Catatan sejarah penyelenggaraan pemerintahan Jakarta melewati cukup banyak perubahan. Mulanya, hanya sebuah pelabuhan bernama Sunda Kelapa, menjadi Jayakarta setelah kedatangan Fatahillah, kemudian menjadi Gemeente Batavia dan akhirnya menjadi Stade Gemeente Batavia (Kotapraja Batavia) pada masa penjajahan Belanda, dan pada masa pendudukan Jepang menjadi Jakarta Tokubetsu Shi (kurang lebih sama dengan pemerintahan Kotapraja). Setelah kemerdekaan RI, Jakarta dijadikan daerah otonom dengan nama Pemerintahan Nasional Kota Jakarta yang dipimpin seorang Walikota dan sekaligus menjadi ibukota negara.

Status pemerintahan ini berlangsung hingga pecahnya agresi militer Belanda I. Kemudian, ketika pembentukan Negara Federal, Jakarta dijadikan Distrik Federal Negara Indonesia Serikat yang terlepas dari kekuasaan Negara Pasundan. Kedudukannya sebagai ibukota negara lebih dikukuhkan lagi dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang terlepas dari kekuasaan Negara Pasundan. Kedudukannya sebagai ibukota negara lebih dikukuhkan lagi dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian, dengan Keputusan Presiden Nomor 125/1950, kedudukan Jakarta dikukuhkan sebagai suatu daerah swatantra dan namanya dirubah menjadi Kotapraja Jakarta Raya. Bentuk tersebut terus beratahan hingga RIS dirubah menjadi negara kesatuan (5 Juli 1959).

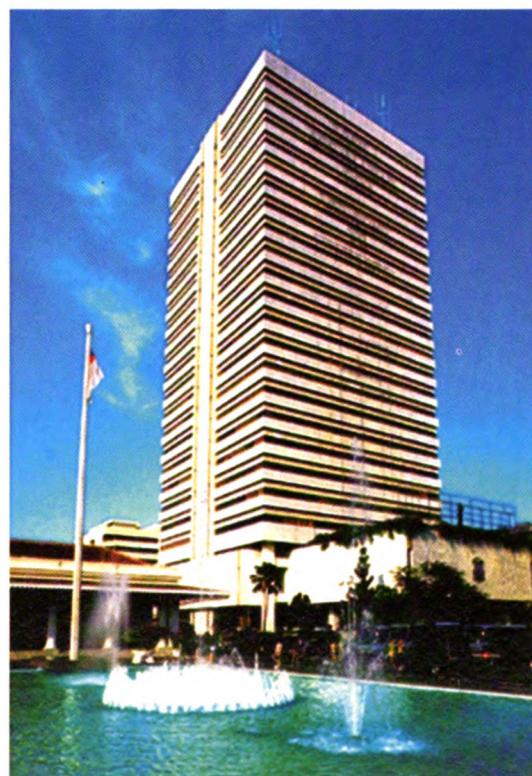
Setelah kembali menjadi negara kesatuan, status Jakarta ditingkatkan menjadi Kotapraja Jakarta yang berstatus Daerah Tingkat I dipimpin oleh seorang Gubernur. Hal ini dilaksanakan mulai 15 Januari 1960. Satu tahun kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 2 Pnps/1961, status Jakarta ditingkatkan menjadi

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, dengan Gubernur sebagai Kepala Daerah Khusus Ibukota Raya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selanjutnya, melalui Undang-undang Nomor 5/1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pada pasal 6, dinyatakan bahwa “....Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang.”

Undang-undang yang dimaksudkan tersebut adalah Undang-undang Nomor 11/1990, tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam membentuk dan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan terutama di bidang kelembagaan, pendanaan, hubungan kerja antara Gubernur dengan Presiden serta aparatnya.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa, untuk memimpin pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipilih dan diangkat seorang Gubernur Kepala Daerah serta dalam pelaksanaannya dibantu oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat yang bergerak



dalam bidang legislatif, di DKI Jakarta disusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, sebagai Daerah Tingkat I, DKI Jakarta juga mempunyai kesamaan dengan Daerah Tingkat I lainnya, di samping mempunyai kekhususan pada bentuk otonominya yang tidak terbagi lagi ke daerah-daerah yang lebih rendah tingkatannya. Secara administratif DKI Jakarta dibagi menjadi lima wilayah Kotamadya, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Utara, Kotamadya Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta Selatan dan Kotamadya Jakarta Timur. Masing-masing Kotamadya dibagi dalam wilayah Kecamatan dan masing-masing Kecamatan dibagi dalam wilayah Kelurahan.

Untuk Kotamadya Jakarta Pusat, dengan luas 54,46 km², dibagi menjadi 8 Kecamatan dan 44 Kelurahan; Kotamadya Jakarta Utara, dengan luas 139,58 km² dibagi menjadi 7 Kecamatan dan 35 Kelurahan; Kotamadya Jakarta Barat dengan luas 131,45 km² dibagi menjadi 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan; Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas 146,84 km² dibagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan dan Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 178,07 km² dibagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan.

Pada masing-masing Kotamadya diangkat seorang Walikotamadya yang berada langsung di bawah Gubernur dan kedudukannya setingkat dengan Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya di Indonesia. Pada masing-masing wilayah Kotamadya dibentuk Lembaga Musyawarah Kota (LMK) untuk menampung aspirasi masyarakat dan sebagai komunikasi timbal-balik pada tingkat Kotamadya.

Sejalan dengan hal tersebut, dan walaupun DKI Jakarta tidak memiliki Daerah Tingkat II, namun upaya untuk memberikan peranan kepada Walikotamadya secara berangsur-angsur terus dilaksanakan. Kebijaksanaan ini ditempuh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pilihan kebijaksanaan ini searah dengan arahan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 yang mengamanatkan bahwa, pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka pembangunan di DKI Jakarta arahan itu diterjemahkan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara penuh. Realisasinya adalah dengan terus mendekatkan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan peranan Pemerintah Wilayah Kotamadya.







JAKARTA KOTA NIA G A

*P*erkembangan perekonomian DKI Jakarta menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Dari Pelita ke Pelita selama PJP I inflasi bisa ditekan drastis, dari sekitar 600-500 persen sebelum Pelita menjadi kurang dari sepuluh persen pada tahun ke empat Pelita VI. Demikian pula dengan jumlah penduduk miskin yang pada awal Pelita I hampir mencapai 60 persen penduduk DKI Jakarta yang saat itu berjumlah 3,5 juta jiwa, maka pada tahun keempat Pelita VI tinggal 2 persen dari total penduduk DKI Jakarta yang jumlahnya telah mencapai 9,5 juta jiwa. Hal yang sama juga nampak dari berbagai indikator lainnya, baik pada bidang fisik, lingkungan dan prasarana, bidang kesejahteraan sosial, maupun variabel-variabel perkonomian lainnya.

Prestasi ini dipengaruhi banyak faktor yang dominan antara lain karena Jakarta merupakan pusat perekonomian dengan segala kelebihan dan potensinya yang kemudian menjadikan dominasi peredaran uang nasional berada di Jakarta.

Menurut perkiraan Bank Indonesia, proporsi uang beredar di Jakarta mencapai hampir 70 persen dari total peredaran uang nasional. Angka ini memasuki PJP II nampaknya masih terus konsisten. Di samping itu, Jakarta juga mendominasi perolehan kredit perbankan nasional. Catatan Bank Indonesia menyebutkan bahwa dari total kredit yang disalurkan oleh bank-bank Pemerintah dan Swasta (Asing maupun Nasional) yang pada kurun tersebut sebanyak 82 persen disalurkan di Pulau Jawa, dan dari jumlah tersebut 57 persen terkumpul di Jakarta.

Meskipun demikian, Jakarta juga masih menghadapi banyak masalah. Penduduknya yang terus bertambah dengan angka pertumbuhan sekitar 2,09 persen per tahun, sebuah angka pertumbuhan yang cukup tinggi. Memasuki abad 21 mendatang gelombang tantangan dan permasalahan terutama dengan dibukanya pasar bebas akan semakin besar. Baik yang diatur pada kawasan Asia Tenggara (Asean Free Trade Area/AFTA), yang efektif akan mulai berlaku pada 2003, atau kawasan Asia Pasifik (Asia Pasific for Economic Cooperatives/APEC) yang akan efektif pada 2010-2020 maupun berbagai kesepakatan perdagangan lain yang diatur melalui kesepakatan umum akan tarif dan perdagangan (General Agreement for Tarif and Trade/GATT) yang secara intensif terus dipantau oleh organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO).

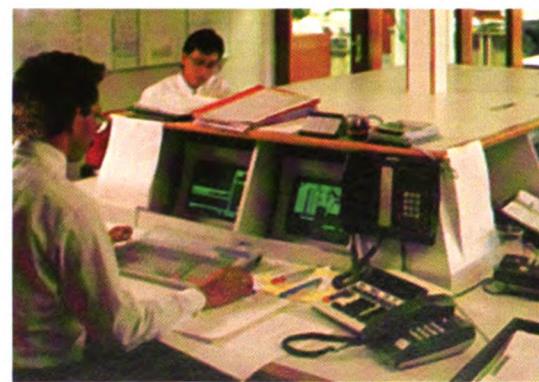
Cukup banyak kebijaksanaan Pemerintah yang diambil dan ditujukan untuk mengantisipasi semua itu, utamanya melalui penerbitan paket-paket deregulasi dan debirokratisasi, namun dengan kemajemukan permasalahan yang begitu tinggi, membutuhkan pemberantasan dan pembinaan.

PERKEMBANGAN EKONOMI



Perkembangan ekonomi Jakarta tumbuh dengan cepat sejalan dengan intensitas pembangunan yang semakin meningkat dibanding dengan daerah-daerah lain, demikian pula bila dibandingkan dengan rata-rata perkembangan nasional. Salah satu indikasi yang paling mudah digambarkan adalah pada pertumbuhan ekonominya. Dalam empat tahun terakhir Pelita VI rata-rata pertumbuhan ekonomi Jakarta setiap tahunnya mencapai 8,23 persen. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional 7,1 persen. Adapun pendukung pertumbuhan itu didominasi oleh sektor jasa sebesar 65 persen dan industri 26 persen.

Secara lebih rinci bila dikaitkan dengan kelompok kalangan usaha, maka pertumbuhan ekonomi tersebut yang paling tinggi diperoleh Kelompok Bangunan dan Air Minum, rata-rata per tahun mencapai 14,46 persen menyusul kemudian Listrik, Gas dan Air Minum 11,61 persen. Sementara itu, Pertanian dalam kurun waktu yang sama mengalami penyusutan cukup drastis, rata-rata per tahun masing 3,20 persen. Hal ini karena wilayah pertanian di Jakarta mengalami penyusutan, sebagai konsekuensi perkembangan kota serta permukiman penduduk. Sektor yang mengalami pertumbuhan relatif baik, antara lain sektor industri 9,10 persen. Transportasi dan Komunikasi





9,18 persen Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,24 persen, Bank dan Lembaga Keuangan 7,24 persen. Sewa Rumah 4,66 persen. Jasa-jasa 9,66 persen serta Pemerintahan dan Pertahanan 2,09 persen per tahun.

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga diiringi dengan penurunan pertumbuhan penduduk, dari 3,47 persen per tahun pada dasawarsa 1971-1980 menjadi 2,41 persen per tahun pada dasa warsa 1980-1990 dan terus menjadi 2,12 persen per tahun pada periode kurun 1990-1993, dan 2,09 persen pada 1995-1996. Hal ini memberi pengaruh yang positif pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta yang pada 1980 baru sebesar Rp.921.775,- maka sepuluh tahun kemudian menjadi Rp.1.540.555,- atas dasar harga konstan 1983. Selanjutnya, pada tahun 1994 atas dasar harga konstan 1993 jumlah pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta telah mencapai Rp.6.225.564,-, kemudian menjadi Rp.7.709.200,- pada 1995 dan kembali meningkat menjadi Rp.8.568.000,- pada thaun 1996.

Pada tahun 1984 populasi penduduk miskin di Jakarta mempunyai proporsi sebesar 11,02 persen atau sebanyak 809.400 jiwa, pada tahun 1995 jumlah penduduk miskin tersebut tinggal 497.000 jiwa dan pada 1996 tercatat sebanyak 231.331 orang atau 65.625 KK. Dari jumlah tersebut, 8.680 KK berada di 11 Kelurahan tertinggal, telah masuk ke dalam Program Inpres Desa Tertinggal/IDT serta telah mendapat bantuan modal bergulir dari dana IDT maupun bantuan peran serta masyarakat. Sisanya, 56.945 KK tersebar di 50



Kelurahan yang target penyelesaiannya dilakukan melalui Program INGUB 230/1993 dan SKGUB 1079/1995.

Di samping itu, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diproyeksikan dapat membuka lapangan kerja baru untuk kurang lebih 750.000 orang tiap tahunnya. Hal ini diperoleh dengan asumsi bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut diinvestasikan kembali sebagai penanaman modal baru yang dalam lima tahun jumlahnya diperkirakan mencapai Rp. 15 triliun. Adapun jumlah investasi tersebut disebarluaskan kepada PMA dan PMDN sebanyak Rp. 5,25 triliun (35 persen), Proyek-proyek umum non PMA/PMDN sebanyak Rp.7,5 triliun (50 persen) dan dari Pemerintah Rp.2,25 triliun (15 persen).



MEGA BISNIS



Kehadiran gedung perkantoran dan perdagangan di Jakarta tidak lepas dari peninggalan masa lalu yang dimulai pertumbuhannya dari pesisir. Pada pertengahan abad 17. Di sepanjang Ciliwung mulai tumbuh pesat perdagangan dan perumahan, sementara kawasan pertaniannya saat itu berada di Tanah Abang, Kebon Sirih, Kebon Kacang dan sebagainya. Kemudian di sisi Jalan Gunung Sahari dan ke Barat menuju Jalan H. Juanda terus ke Jalan Veteran, sudah berdiri gedung tertua yang kemudian dipakai untuk Hotel Palace Royale. Di seberangnya juga dibangun Hotel Dharma Nirmala dan kini menjadi Kompleks Bina Graha.

Untuk pengobatan dan Rumah Sakit terletak di sebelah Selatan, kini RS. Cipto Mangunkusumo, dan untuk tempat hiburan Belanda saat itu terdapat di lokasi Mesjid Istiqlal dan juga pantai Tanjung Priok. Tempat-tempat tersebut orang Betawi menyebutnya dengan Sampur. Adapun salah satu pusat perdagangan yang baru tumbuh pada pertengahan abad 18 adalah Pasar Senen.

Secara keseluruhan, pada satu abad yang lampau di Jakarta sebetulnya telah ada kawasan pergudangan atau lebih terkenal dengan Segiempat Emas yang meliputi sebelah Barat Gajah Mada/ Hayam Wuruk, sebelah Utara Jayakarta, sebelah Timur Gunung Sahari, serta sebelah Selatan Lapangan Banteng/Jl. Ir. Juanda.

Memasuki abad 20, gedung-gedung tersebut banyak yang dirubah fungsinya menjadi perkantoran BUMN. Bersamaan dengan pindahnya ibukota Batavia ke Weltevreden maka pusat pertumbuhan pun bergeser dari pesisir menuju pusat, kini berkembang Jalan M.H. Thamrin Sudirman dan disinilah bermula berdirinya gedung-gedung perkantoran modern yang dipelopori oleh Kantor Pemerintahan/Departemen.

Menjelang berakhirnya dasawarsa 80-an gedung baru bermunculan, seperti Prince Centre (d/h Gedung Pangeran), Chase Plaza, Wisma Indocement, Wisma BCA, Summitmas Tower, Mid Plaza, Central Plaza, Wisma Bumiputra dan lain sebagainya. Demikian pula dengan gedung-gedung Bank Pemerintah yang dibangun di lokasi Jalan Sudirman.

Jalur Kuningan menjelang berakhirnya dasawarsa 80-an dan memasuki dasawarsa 90-an berkembang pesat dengan dibangunnya sejumlah kantor kedutaan besar negara sahabat dan perumahan menteri. Gedung-gedung perkantoran ini, khususnya di kawasan segi tiga emas Jakarta; Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said terus bermunculan. Bahkan, menurut catatan kelompok konsultan bidang properti, pada tahun 1996 terjadi kenaikan permintaan ruang kantor dari 2,4 juta m² menjadi 2,6 juta meter². Sementara itu, suplai kumulatif naik dari 2,6 juta m² menjadi 3,01 juta m².

Bersamaan dengan tumbuhnya gedung-gedung perkantoran, di Jakarta juga terus tumbuh gedung-gedung perkantoran (plaza dan super plaza) serta rumah toko (Ruko) dan fasilitas jasa lainnya. Dilihat dari perkembangan kesejahteraan penduduk Jakarta dan munculnya kecenderungan penduduk yang semakin konsumtif dan berbelanja sambil rekreasi, nampaknya kebutuhan akan pusat perbelanjaan tetap besar. Di samping itu, sesuai dengan RUTR Jakarta 2005 yang akan mengembangkan Sentra Primer Baru di Barat dan Timur seh

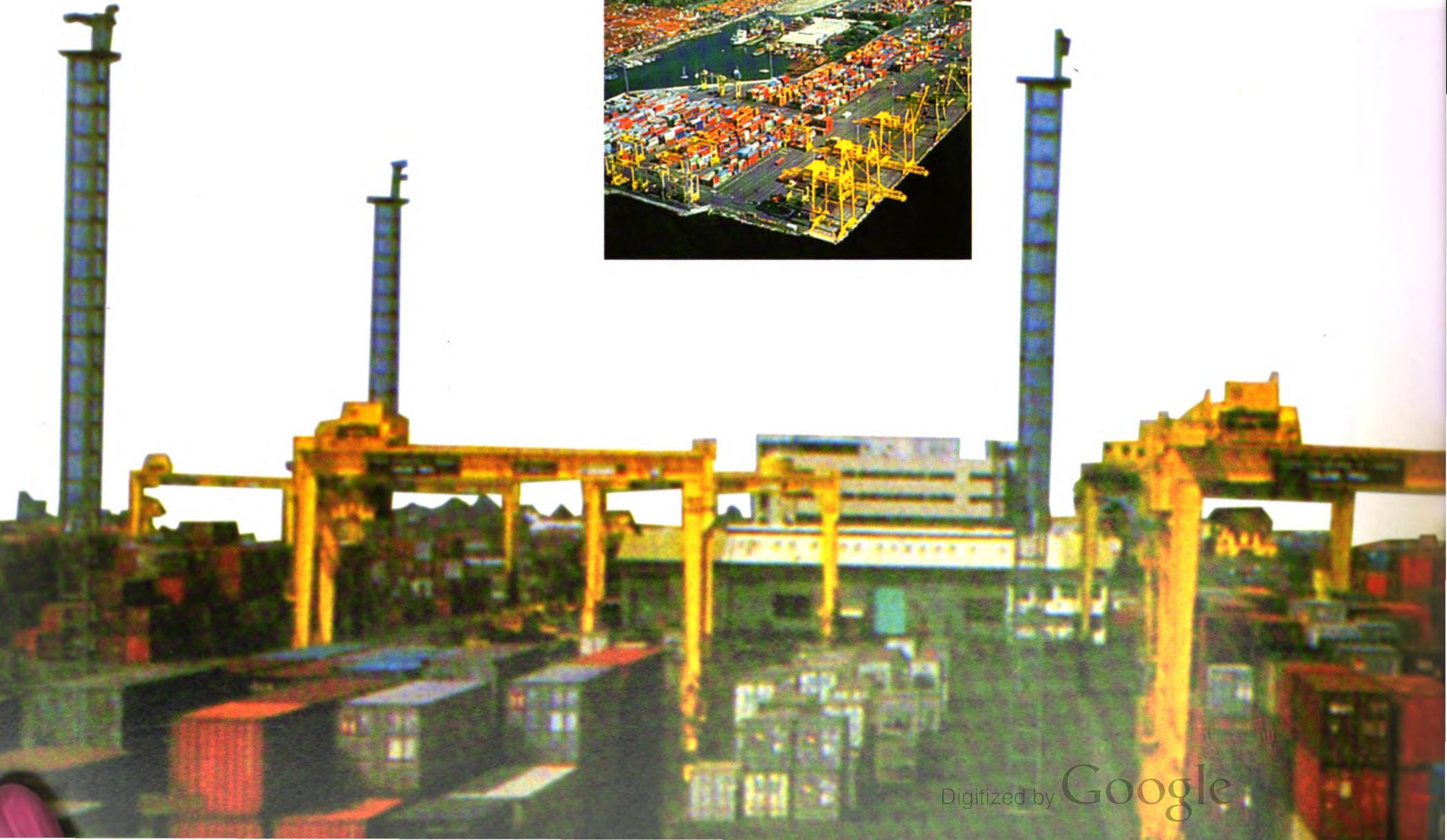
oleh pertumbuhannya, maka proyek sejenis tentu akan menjadi lebih prospektif di masa depan apal

TR Jakarta 2005 diketahui, bahwa, dalam lima tahun mendatang dibutuhkan ruang perkantoran, perdagangan dan jasa seluas 32 juta



m² (melingkupi wilayah 3.211 ha). Sedangkan saat ini total pengadaan kumulatif seluruh DKI Jakarta dan sekitarnya baru mencapai 3,01 juta m² atau berarti baru 7 persen dari total kebutuhan tahun 2005, sehingga masih membutuhkan cukup banyak plaza dan super plaza, apalagi bila diukur dengan proyeksi penduduk DKI Jakarta 2005 yang akan mencapai 12 juta jiwa.

Salah satu upaya yang diharapkan dapat memenuhi itu dalam skala besar adalah dengan dikembangkannya Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang diproyeksikan akan menambah luas lahan Jakarta melalui reklamasi pantai seluas 2.700 hektar yang membentang di pantai utara Jakarta sepanjang 32 km dengan lebar 1,5 km, akan menata kawasan eksisting Jakarta Utara ke arah Barat dan Timur.





USAHA KECIL

Bila dilihat dari struktur pelaku ekonomi di DKI Jakarta, Golongan Usaha Skala Kecil (GUSK) merupakan populasi yang jumlahnya menurut Kantor Statistik DKI Jakarta pada akhir Pelita V mencapai 76% lebih dari total populasi pelaku ekonomi DKI Jakarta. Termasuk di dalamnya adalah kelompok industri perumahan (home industry), kontraktor kelas C, pedagang kecil, sektor informal (pedagang kaki lima, asongan, pemulung) dan berbagai jenis usaha skala kecil lainnya.

Dalam kerangka pemerataan hasil pembangunan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara intensif terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian GUSK. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk itu, antara lain melalui pengembangan koperasi pengusaha kecil, pemberian kredit dengan bunga lunak (Kredit Investasi Kecil, Kredit Candak Kulak dan lain sebagainya) maupun dengan berbagai pembinaan usaha, manajemen dan pemasaran serta lainnya.

Di DKI Jakarta, bantuan maupun pembinaan GUSK telah dilakukan antara lain melalui mekanisme Program Kawasan Terpadu, Program Pengembangan Wilayah Terpadu dan lain sebagainya. Untuk sektor informal upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta bahkan lebih intensif lagi. Intinya memang diarahkan pada pengendalian jumlah sektor informal melalui pengelompokan pedagang kaki lima serta pengembangan embrio pasar dan lain sebagainya.

Namun demikian, permasalahan yang dihadapi GUSK dalam perkembangan perekonomian Jakarta yang disarati dengan aneka persaingan sampai saat ini masih belum memungkinkan perwujudan keinginan Pemerintah DKI Jakarta dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian GUSK. Hal ini terus diupayakan Pemerintah DKI Jakarta. Telah banyak dana dan daya yang dikeluarkan untuk mengendalikan pertumbuhan sektor informal, namun pencapaian yang diperoleh masih belum maksimal.

Meskipun demikian, beberapa program pembinaan yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta yang sasarannya pada penyediaan tempat usaha, bimbingan manajemen dan konsultasi usaha, bantuan pinjaman modal usaha serta peningkatan organisasi pengusaha kecil masih terus diupayakan agar supaya kemandirian kelompok usaha ini dapat dicapai sebagaimana diharapkan.

Di luar sektor-sektor ekonomi formal, di DKI Jakarta terdapat sektor ekonomi informal, meliputi pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung sampah, tukang ojek dan beberapa lagi yang lainnya. Populasi penduduk yang mencari kehidupan pada sektor ini relatif besar, terutama karena masih cukup banyak warga kota yang kurang mempunyai kecakapan hingga tidak bisa mengisi formasi lapangan kerja formal, dan disisi lain lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu mengakomodir tenaga kerja yang ada. Dengan demikian, keberadaan sektor ekonomi informal merupakan salah satu katup pengaman dari limpahan tenaga kerja perkotaan.

Banyak masalah yang ditimbulkan, seperti dimanfaatkannya badan jalan, trotoar, jalur hijau, traffic light dan berbagai prasarana kota lainnya oleh kehadiran sektor informal. Hal ini menjadikan kawasan yang dipergunakan tersebut menjadi kotor dan fungsi-fungsi kota tidak dapat dimanfaatkan secara optimum.



Sektor informal ini, terbukti mampu memberikan kontribusi positif pada sektor formal perkotaan. Karena fakta yang ada dalam sektor formal perkotaan di DKI Jakarta dan sebagian besar masih memanfaatkan tenaga buruh kasar dengan upah rendah. Sementara itu, untuk melanjutkan kehidupannya di Jakarta kalangan pekerja formal tersebut sebagian besar harus didukung oleh sektor informal yang memang mampu menyediakan makanan, minuman, transportasi dan bahkan hunian yang relatif murah. Karena itu pula para buruh dan pekerja kota itu dapat menjalankan fungsinya sebagai pekerja pada sektor formal.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta secara intensif terus melakukan pembinaan-pembinaan terhadap sektor informal maupun Golongan Usaha Skala Kecil (GUSK) lainnya. Hal ini searah dengan upaya pemerataan hasil pembangunan ekonomi yang mempunyai korelasi dalam penciptaan kesempatan kerja.

Sasaran yang hendak dicapai berfokus pada peningkatan kemampuan GUSK yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian GUSK. Pertumbuhan dan perkembangan sektor informal dan pembinaan pedagang kaki lima saat ini mencapai 74.000 orang, asongan 2.000 orang dan pemulung 9.000 orang.



JAKARTA KOTA INDUSTRI

Secara umum, strategi pengembangan industri di DKI Jakarta diarahkan pada pengembangan industri berteknologi tinggi dan akrab lingkungan serta terkoordinir dengan kegiatan industri terutama di kawasan Bogor-Tangerang-Bekasi (Botabek). Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pengembangan industri kecil dan rumah tangga serta kerajinan yang menyerap tenaga kerja cukup banyak.

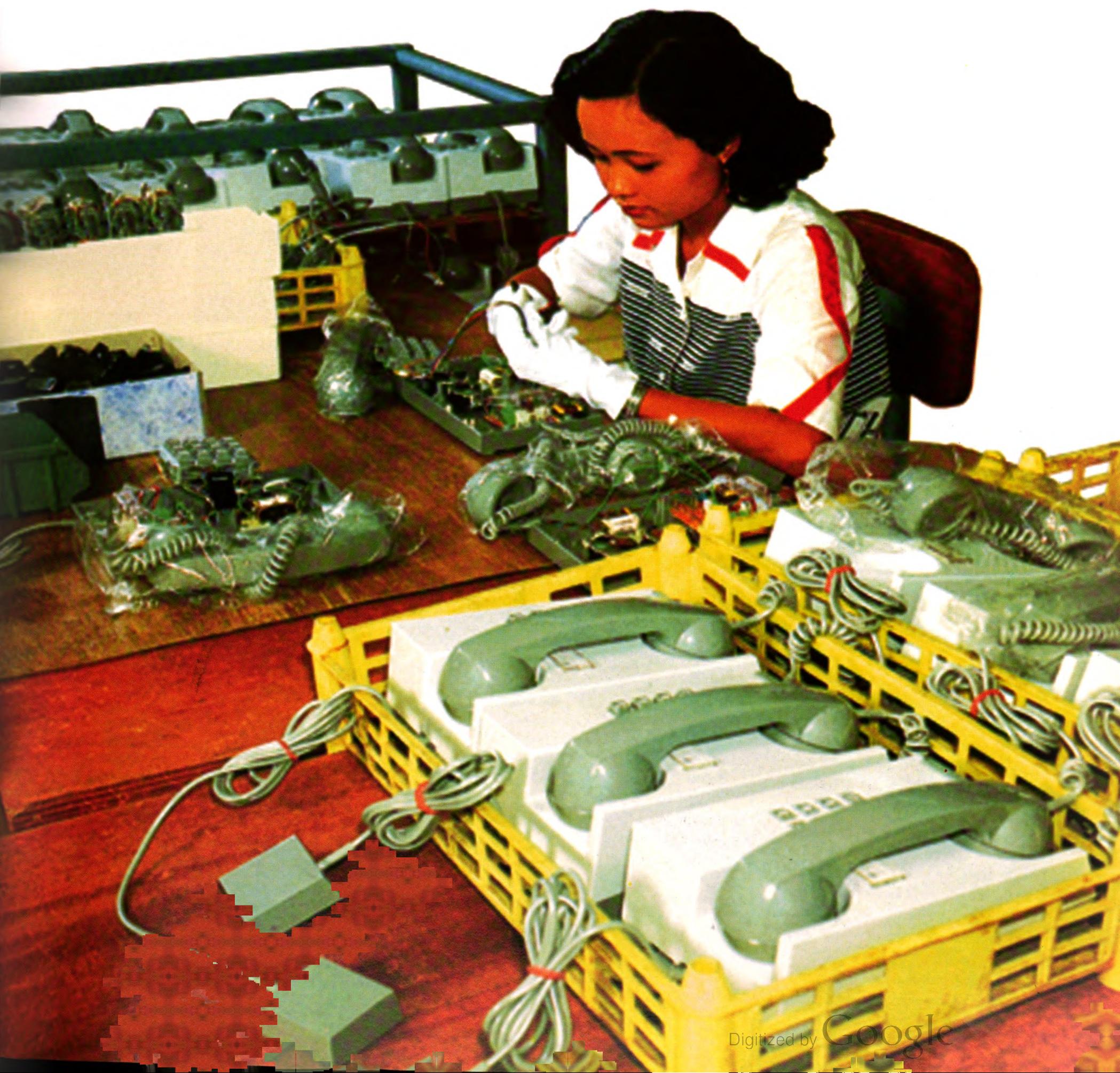
Arahan ini memang selaras dengan kondisi Jakarta serta juga searah dengan perkembangan pasarnya sendiri. Sebagai ibukota yang cukup sarat penduduk dan juga fungsinya, Jakarta mau tidak mau harus berani memilih strategi tersebut. Walaupun memang, Jakarta selama ini harus bersedia memikul risiko dan sekaligus mengambil keuntungan dari perkembangan industri nasional yang sebarannya belum merata. Resiko yang dihadapi itu berupa besarnya arus migrasi dan juga pada tingginya polutan yang mengotori tanah, udara dan air Jakarta. Untungnya, Jakarta selalu menjadi wilayah terdepan dan terbesar dalam meraih keuntungan dari perkembangan industri nasional.

Meskipun demikian, realitas pasar industri di Jakarta, terutama berkaitan dengan tingginya harga tanah, tidak memungkinkan secara ekonomis bagi pengembangan industri skala besar dan berat untuk mempergunakan lahan-lahan di Jakarta. Di samping memang kebijaksanaan penggunaan lahan di Jakarta diarahkan untuk mengurangi jenis-jenis industri yang memberi cemaran berat pada lingkungannya. Secara teoritis, pengembangan ini memang dilandasi oleh pendekatan kerangka transformasi ekonomi menurut teori Rostow, yang menghitung pertumbuhan ekonomi berlangsung dalam bentuk garis lurus, sebuah steady state growth, yang menghitung proyeksi masa depan hanyalah merupakan kelanjutan kecenderungan masa lampau, sehingga prosesnya menjadi serba mekanis, otomatis serta matematis. Dan, proses transformasi struktur ekonomi yang terjadi mengikuti alur dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan kemudian menuju masyarakat jasa.

Hal lain yang juga selaras dengan pasar adalah adanya kenyataan bahwa, kontribusi sektor industri selama 5 tahun terakhir pada pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang pada kurun tersebut rata-rata pertahunnya tumbuh 8,23 persen, ternyata hanya 26,37 persen. Jauh di bawah kontribusi sektor jasa yang pada kurun yang sama mencatat sebesar 62 persen. Kenyataan tersebut kiranya semakin mengokohkan Pemerintah DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota jasa (services city), dengan penekanan pada sektor industri yang hanya akan mengakomodir jenis-jenis industri yang dikelola dengan teknologi tinggi dan akrab lingkungan serta berbagai industri jasa lainnya.

Meskipun demikian, dan mengingat penduduk Jakarta serta kemampuan sumber daya manusia yang mayoritas relatif kurang baik, maka pengembangan industri kecil, rumahan (home industry) dan kerajinan tetap mendapat perhatian tersendiri. Hanya saja perhatian ini lebih diarahkan untuk memperkaya pengembangan industri pariwisata DKI Jakarta. Arahan yang dipilih ini dengan menyelaraskan pada pertumbuhan Jakarta sebagai kota layanan jasa.





KEBIJAKSANAAN INVESTASI

Salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataannya adalah menyangkut kemampuan dalam pengelolaan investasi. Jakarta mempunyai akses yang dibutuhkan oleh para investor dan menjadi wilayah yang paling gencar pertumbuhan investasinya. Hal ini terbukti dari catatan selama empat tahun pertama 90-an. Menurut catatan yang dihimpun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) DKI Jakarta, angka pertumbuhan rata-rata pertahun investasi di Jakarta selama 1990-1994 tercatat sebesar 26,14 persen.

Bila dilihat dari penyumbang investasi menurut sektornya, maka sektor jasa mengalami pertumbuhan yang paling pesat, dengan sumbangan pertumbuhan terhadap total investasi DKI Jakarta sebesar 50,38 persen pada awal 1990 dan menjadi 70,13 persen pada akhir 1994, atau selama kurun tersebut rata-rata pertumbuhan per tahun investasi sektor ini sebesar 37,02 persen. Adapun yang menjadi andalan dari sektor ini adalah bidang perumahan, perhotelan dan perkantoran.

Sebaliknya untuk sektor industri, meskipun rata-rata tiap tahunnya meningkat 11,41 persen, namun peranannya terhadap total investasi DKI Jakarta justru mengalami penurunan, yaitu sebesar 47,96 persen pada 1990 dan kemudian menjadi 29,19 persen pada 1994.

Sementara itu, bila dikaji dari struktur investornya, maka peranan investasi asing (PMA) setelah 1967, ketika pintu investasi mulai dibuka menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, rata-rata per tahun mencapai 86,91 persen. Sebaliknya, investasi dalam negeri (PMDN) rata-rata per tahun hanya mampu tumbuh sebesar 56,07 persen. Namun demikian, kurun 1990-1994, peranan PMDN menampakkan perkembangan yang cukup signifikan. Mulanya, peranan tersebut hanya 60,8 persen dan kemudian pada 1994 meningkat menjadi 73,71 persen. Sebaliknya untuk PMA justru mengalami penurunan dari 39,16 persen pada 1990 menjadi 26,29 persen pada 1994.

Bila dilihat dari perkembangan investasi di Jakarta, kiranya nampak jelas, bahwa apa yang terjadi tersebut secara langsung berkaitan dengan kebijaksanaan investasi yang diluncurkan Pemerintah Pusat. Mulanya pada 1967 dikembangkan industri substitusi impor (ISI) mengiringi kebijaksanaan devisa bebas serta pembukaan pintu bagi modal asing. Dan sebagai pendukungnya, Pemerintah memberikan kemudahan pajak, kredit dan berbagai insentif lainnya.

Berbagai paket deregulasi dan debirokratisasi di mulai pada tahun 1983. Paket ini ditujukan untuk menyempurnakan peraturan ekspor, penyederhanaan penanaman modal dan penyederhanaan peraturan di bidang perbankkan. Langkah ini memberikan hasil riil pada tahun 1988, porsi ekspor non-migas mencapai 60 persen dari total ekspor nasional.

Keberhasilan ini terus dipacu dengan sejumlah kebijaksanaan baru, antara lain dengan Paket 27 Oktober 1988 tentang peraturan di sektor keuangan, perbankkan dan pasar modal. Dengan salah satu fokus utama yakni pengembangan ekspor nonmigas. Reformasi ini terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Awal 1989 Pemerintah membuka lebih dari 300 bidang niaga bagi pemodal asing, disusul kemudian pada Agustus 1989 yang menyangkut penataan kembali kepemilikan 189 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemudian



dilanjutkan dengan pemotongan tarif terhadap 900 barang impor pada tahun 1991, meliputi, perkakas, gelas, produk-produk besi dan baja, cat, produk-produk kertas dan ban.

Di awal Pelita VI, kembali Pemerintah membuat deregulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 yang memberikan kesempatan bagi pemodal asing untuk memiliki 100 persen modal perusahaan atau berpatungan dengan mitra dalam negeri. Dalam hal patungan usaha ini, pemodal asing dapat memiliki modal sampai 95 persen dan tetap memiliki bagian tersebut selama perusahaan beroperasi tanpa ada keharusan melakukan pengalihan modal. Sementara itu, untuk pemodal asing yang memiliki saham 100 persen harus melakukan pengalihan modal dengan mengajak peran serta mitra Indonesia dalam jangka waktu 15 tahun sejak mulai produksi secara komersial.

Dari semua deregulasi dan debirokratisasi Paket 23 Mei 1995 memberi pengaruh langsung pada konsumen dalam negeri. Paket deregulasi dengan sasaran empat bidang utama tersebut (Bidang Investasi, perizinan, kawasan berikat/EPTE dan prosedur impor) antara lain dilakukan dengan memangkas 6.030 pos tarif masuk atau 64 persen dari 9.389 pos tarif yang ada. Salah satu pos tarif yang dipangkas adalah menyangkut bea masuk komponen otomotif, yang turun sampai 35 persen. Kebijaksanaan ini memberlakukan penetapan penurunan tarif secara bertahap hingga tahun 2003, yang merupakan jadwal dimulainya pasar bebas Asean (AFTA).

Pada awal 1996, kembali Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan investasi baru berupa Inpres Nomor 2 Tahun 1996 yang menyangkut pengembangan industri otomotif dalam negeri. Kehadiran Inpres ini cukup banyak dinanti masyarakat yang memang mendambakan mobil murah.

Namun demikian, selama Pelita VI, khususnya pada 1994-1995, perkembangan investasi di Jakarta mengalami banyak kemerosotan. Untuk tahun 1994 misalnya, pertumbuhan investasi PMA/PMDN masing-masing hanya 0,22 persen dan 26,08 persen. Demikian pula sejak Januari-September 1995, angka investasinya masih jauh di bawah pencapaian tahun sebelumnya.

Untuk itu beragam upaya ditempuh, yang paling utama adalah melalui pembebasan hambatan-hambatan investasi yang secara nasional telah dilakukan melalui paket-paket deregulasi dan debirokratisasi. Di samping itu yang juga tidak kalah penting adalah jaminan keamanan serta stabilitas untuk para investor disamping dampak terjadinya krisis moneter dewasa ini. Adapun pengembangan infra struktur dan supra struktur secara umum Jakarta telah sangat baik, walaupun tetap ditingkatkan di sana-sini.

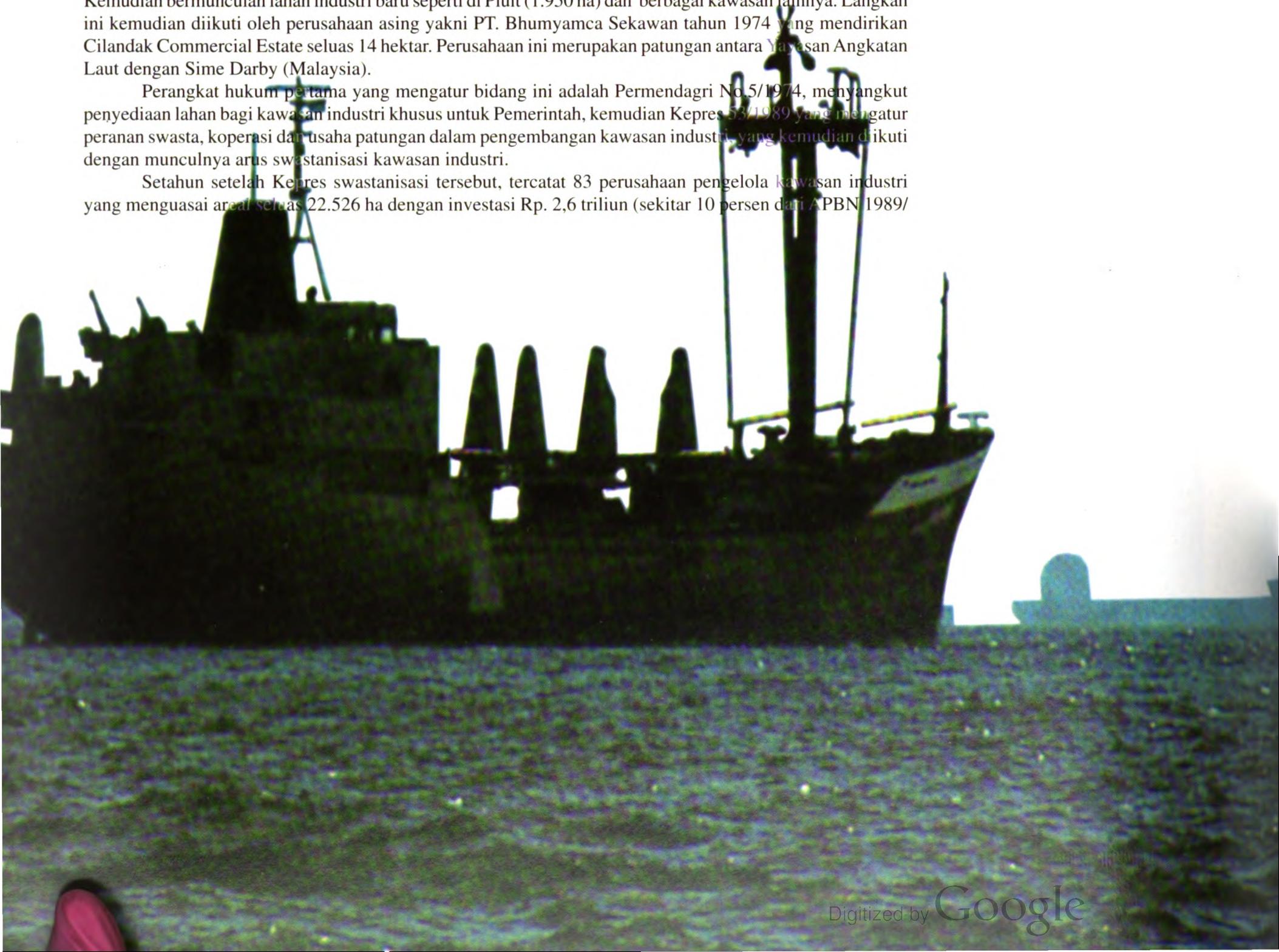


KAWASAN INDUSTRI

Kehadiran kawasan industri di Indonesia diawali pada tahun 70-an dengan didirikannya perusahaan negara yakni, PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP) tahun 1973 dengan luas lahan 500 hektar. Kemudian bermunculan lahan industri baru seperti di Pluit (1.950 ha) dan berbagai kawasan lainnya. Langkah ini kemudian diikuti oleh perusahaan asing yakni PT. Bhumyamca Sekawan tahun 1974 yang mendirikan Cilandak Commercial Estate seluas 14 hektar. Perusahaan ini merupakan patungan antara Yayasan Angkatan Laut dengan Sime Darby (Malaysia).

Perangkat hukum pertama yang mengatur bidang ini adalah Permendagri No.5/1974, menyangkut penyediaan lahan bagi kawasan industri khusus untuk Pemerintah, kemudian Kepres 53/1989 yang mengatur peranan swasta, koperasi dan usaha patungan dalam pengembangan kawasan industri, yang kemudian diikuti dengan munculnya arus swastanisasi kawasan industri.

Setahun setelah Kepres swastanisasi tersebut, tercatat 83 perusahaan pengelola kawasan industri yang menguasai areal seluas 22.526 ha dengan investasi Rp. 2,6 triliun (sekitar 10 persen dari APBN 1989/





1990). Hingga akhir Pelita V, jumlah perusahaan pengelola kawasan industri bertambah 19 perusahaan.

Searah dengan pengembangan industri DKI Jakarta yang salah satunya adalah dengan meningkatkan koordinasi pengembangan industri di kawasan Botabek, maka perkembangan kawasan industri di Jakarta diarahkan pengembangan industrinya di kawasan tersebut.

Adapun catatan mengenai perkembangan kawasan industri hingga akhir Pelita V tercatat hampir separuhnya, proyek PMA berlokasi di kawasan Jabotabek dengan menelan investasi sekitar US\$ 1,5 miliar atau berarti 38 persen dari total investasi PMA untuk bidang ini. Hal ini memberikan gambaran proyeksi masa depan yang cukup menggembirakan dalam pengembangan kawasan industri di kawasan Botabek.



Sasaran konsumen perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang ingin mendirikan pabrik sehingga mereka butuh lahan industri. Jika diasumsikan setiap pabrik membutuhkan areal minimal seluas 2,5 hektar, maka dengan menggunakan data hingga Agustus 1990 dari proyek yang masuk (PMA maupun PMDN) yang tercatat sebanyak 1.165 buah dibutuhkan lahan seluas 2.330 hektar.

Berdasarkan data Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKII) tercatat jumlah lahan yang sedang digarap oleh 40 perusahaan anggotanya saat ini mencapai 13.765 hektar. Sebagian masih kosong dengan tingkat harga jual yang beragam. Di lain pihak Pemerintah mencadangkan untuk mengembangkan seluas 30.000 hektar lahan khusus kawasan industri yang akan habis dikonsumsi sekitar 15 tahun mendatang.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan kawasan industri akan tetap menguntungkan dan cukup prospektif di masa depan, karena bisnis ini memang bisnis jangka panjang. Selama kegiatan ekonomi dan perkembangan ekonomi nasional berjalan baik dan memiliki daya saing (comparative advantages) bagi investor domestik maupun luar negeri, maka kebutuhan lahan industri tetap ada.

Proyeksi permintaan lahan harus memperhitungkan akumulasi perusahaan dan kecenderungan selanjutnya sampai berakhirnya Pelita VI nanti. Jika kondisi ekonomi berjalan baik seperti saat sebelum krisis ekonomi dan masih berdaya tarik bagi investor asing maupun domestik, diperkirakan total perusahaan baru akan mencapai 6.500 buah. Inilah calon konsumen potensi dan sangat besar untuk diserap di kawasan Botabek.

Sebagai catatan, meskipun realitas administratif pengembangan kawasan industri itu berada di kawasan Botabek, namun kalangan pengembang kawasan industri masih sebagai bagian dari Jakarta. Hal ini terlihat dari pengembangan kawasan industri Cikampek sebagai kawasan industri Jakarta Bagian Timur, demikian pula dengan pengembangan kawasan industri Tangerang serta Cilegon sebagai kawasan industri Jakarta Bagian Barat.

Dengan kata lain, nama Jakarta tetap menjadi sandaran utama pengembangan kawasan industri yang meskipun secara administratif berada di luar DKI Jakarta. Hal ini memang pilihan strategis yang ditempuh para pengembang kawasan industri, utamanya untuk mengantisipasi pilihan Jakarta yang wajah industrinya hanya untuk kelompok berteknologi tinggi serta non-polutan. Botabek yang menjadi daerah penyangga Jakarta, harus mampu mengantisipasi relokasi industri, khususnya jenis manufaktur dari ibukota, Jakarta.





JAKARTA KOTA BUDAYA DAN RELIGIUS

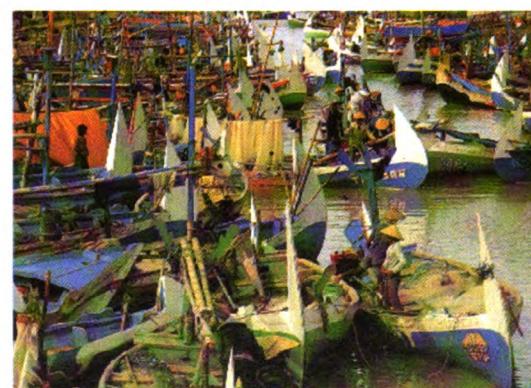


PENDUDUK

Sejak awal pengembangan Jakarta telah menjadi suatu tempat perpaduan berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya berbeda-beda dan tingkat sosial yang tidak merata, sebagai konsekwensi Jakarta yang merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta interaksi dengan berbagai bangsa lain di dunia.

Dalam perspektif stratifikasi sosial, sebagaimana hasil penelitian Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, masyarakat Jakarta dirumuskan dalam lima lapisan.

Lapisan teratas, atau golongan elit kota, terdiri dari para pejabat tinggi pemerintah, orang-orang terkaya yang proporsinya diperkirakan sebanyak 1 persen. Golongan Kelas Menengah, terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi tertentu dengan karier dan penghasilan yang terjamin serta tingkat kemandirian yang relatif cukup besar. Jumlah mereka sekitar 10 persen dari jumlah rumah tangga yang ada di Jakarta.





Selanjutnya golongan peralihan, atau Golongan Menengah Bawah yang umumnya berpendidikan SLTA atau Diploma III. Mereka memiliki pekerjaan yang mantap di sektor formal, baik swasta maupun negeri. Jumlahnya sekitar 40 persen dari seluruh rumah tangga Jakarta. Golongan Berpenghasilan Rendah, umumnya tamatan SD dan SLTP. Jumlah mereka sekitar 45 persen dari seluruh rumah tangga di Jakarta dan kemudian Golongan Termiskin, terdiri dari orang-orang yang cacat sosial, Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dan orang-orang cacat fisik yang tidak diurus keluarganya termasuk di dalam kelompok ini.

Realita serupa ini, dengan gaya hidup kosmopolitan disertai berbagai kemewahannya dan berhadapan dengan populasi penduduk miskin mudah untuk tumbuh menjadi pemicu bagi lahirnya sejumlah konflik perkotaan. Upaya yang dilaksanakan dengan program pengentasan kemiskinan melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang melingkupi 11 Kelurahan di DKI Jakarta dan juga Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No.230/1993 serta Keputusan Gubernur KDKI No.1079/1995 diharapkan dapat menyusutkan jumlah populasi penduduk miskin dan kawasan kumuh di 50 Kelurahan di lima wilayah Kota DKI Jakarta.



Menurut catatan Kantor Statistik DKI Jakarta, jumlah penduduk Jakarta secara absolut memang terus meningkat. Pada tahun 1961 jumlah penduduk DKI Jakarta baru 2,907 juta, kemudian menjadi 4,546 juta pada 1980 dan menjadi 8,228 juta pada 1990, serta kembali naik menjadi 8,818 juta pada 1993. Dan saat ini, penduduk Jakarta telah mencapai 9,5 juta jiwa pada malam hari dan hampir 12 juta jiwa pada siang hari. Dibandingkan dengan luas Jakarta 650 km², maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Jakarta mencapai 14.000 lebih jiwa per km². Di beberapa Kecamatan, seperti Johar Baru dan Tambora, tingkat kepadatan penduduknya bahkan mencapai 40.000 hingga 60.000 jiwa per km². Di kecamatan-kecamatan padat penduduk itulah sebagian besar dari 2.816 hektar kawasan kumuh Jakarta berada.

Namun sebaliknya, angka pertumbuhan penduduk DKI Jakarta secara relatif terus menurun dari waktu ke waktu. Pada periode 1961-1970, angka pertumbuhan penduduk DKI Jakarta rata-rata per tahun mencapai 4,62 persen, turun menjadi 3,97 persen pada periode 1971-1980 dan kembali menurun di periode 1981-1990 menjadi 2,41 persen serta pada periode 1991-1996 menjadi 2,09 persen per tahun.

Adapun, distribusi penduduk DKI Jakarta tersebar di Jakarta Selatan 2,064 juta jiwa, Jakarta Timur 2,471 juta jiwa, Jakarta Pusat 951 ribu jiwa, Jakarta Barat 2,236 juta jiwa dan Jakarta Utara 1,617 juta jiwa. Angka pertumbuhan terbesar terjadi di Jakarta Barat, Timur dan Utara. Sementara Jakarta Pusat cenderung tumbuh negatif.

Namun demikian, jumlah rumah tangga DKI Jakarta secara keseluruhan naik dari 1.164 rumah tangga menjadi 1.740 rumah tangga, atau berarti naik 49 persen selama 10 tahun terakhir. Adapun rentang umur Kepala Keluarga di DKI Jakarta yang terbesar berada pada rentang umur, 30-39 tahun. Sementara itu, distribusi umur penduduk terbesar berada pada rentang usia 0-14 tahun, dengan proporsi mencapai 34 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Hal ini diperkirakan akan memberikan pengaruh bagi pertumbuhan penduduk pada kurun sepuluh tahun mendatang.

Sejalan dengan terus meningkatnya kesejahteraan penduduk, angka harapan hidup penduduk DKI Jakarta pun meningkat. Pada tahun 1988 angka harapan hidup penduduk DKI Jakarta 63,79 tahun kemudian menjadi 71,9 tahun bagi perempuan dan 67,9 tahun bagi laki-laki pada tahun 1996.

Di samping itu, derajat kesehatan penduduk DKI Jakarta juga mengalami berbagai perbaikan. Hal ini terindikasi dari angka kelahiran kasar (CBR) yang pada awal Pelita V masih sebesar 27,70 persen, maka pada akhir Pelita V menjadi 21,36 persen dan pada tahun ketiga Pelita VI kembali turun menjadi 20,72 persen. Demikian pula dengan angka kematian kasar (CDR), dari 5 persen pada awal Pelita V menjadi 2,26 persen pada akhir Pelita V, namun pada tahun ketiga Pelita VI mengalami peningkatan menjadi 5,12 persen. Untuk angka kematian bayi (IMR), pada awal Pelita V sebesar 33 persen, kemudian menurun pada akhir Pelita V menjadi 32 persen dan kembali menurun pada tahun ketiga Pelita VI menjadi 29,0 persen. Adapun untuk angka kematian Balita, sejak awal Pelita V hingga tahun pertama Pelita VI angkanya konstan, 12,00 persen. Sementara itu, angka kematian ibu (MMR) pada akhir Pelita V tercatat sebanyak 4,50 persen dan





pada tahun ketiga Pelita VI menjadi 3,31 persen.

Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari terus meningkatnya kondisi kesehatan dan gizi masyarakat yang merupakan paket kesatuan program Keluarga Berencana (KB). Adapun mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui Taman Gizi yang kemudian dikembangkan menjadi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Target dari Posyandu ini di samping sebagai sarana pelayanan KB termasuk juga pelayanan kesehatan dasar untuk ibu dan anak serta penyuluhan kesehatan lainnya. Dari catatan jumlah Posyandu di DKI Jakarta mencapai 4.860 buah. Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan baik kualitas maupun kuantitasnya terus ditingkatkan.

Dalam profil ketenagakerjaan, bila dikaji dari angka partisipasi penduduk (usia 10 tahun ke atas) dalam perkembangan perekonomian, baik yang sudah mempunyai pekerjaan atau pencari kerja, atau kerap dikenal sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 15 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yang meskipun tidak terlampau signifikan. Pada 1980, TPAK yang bisa diraih mencapai 43 persen dan kemudian pada 1996 menjadi 50 persen. Menurut jenis kelaminnya, TPAK untuk laki-laki relatif konstan berada pada 66 persen, namun untuk wanita cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti, dari 23 persen pada 1980 menjadi 32 persen pada 1996.

Adanya perbedaan yang cukup mencolok pada TPAK laki-laki dan perempuan memang merupakan suatu fenomena yang cukup unik. Paling tidak bagi masyarakat perkotaan seperti Jakarta yang kesadaran akan gender relatif lebih baik, terutama karena pengaruh pendidikan, ternyata kurang berpengaruh positif pada indikator ini. Kenyataan ini pada akhirnya memberikan penegasan bahwa, angka pengangguran pada perempuan relatif lebih tinggi bila dibanding dengan laki-laki.

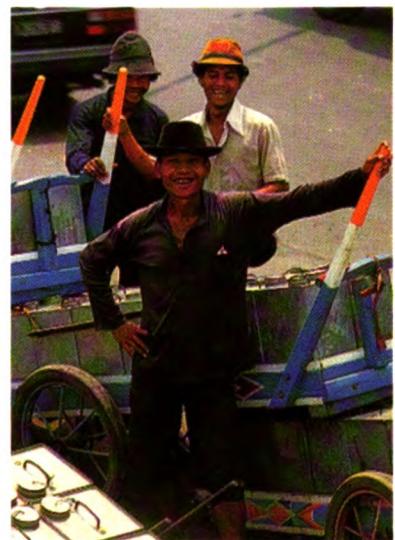
Tantangan perolehan kesempatan kerja memang lebih kecil dibanding di pedesaan, walaupun ada suatu kecenderungan di Jakarta bahwa, jumlah pengangguran yang ada justru cenderung meningkat, walaupun pertambahannya relatif kecil.

Realita ini disebabkan beberapa faktor seperti dikembangkannya Upah Minimum Regional (UMR) yang kini terus meningkat, meskipun sebetulnya tidak seberapa dibandingkan dengan laju inflasinya, namun hal ini berpengaruh bagi kalangan industri untuk melakukan restrukturisasi.

Sejumlah industri yang direlokasi dari negara-negara industri maju ke Indonesia salah satunya dilandasi oleh rendahnya upaya pekerja, utamanya untuk industri manufaktur yang memanfaatkan teknologi rendah dan sedang. Setelah upah tersebut secara berkala ditingkatkan, maka restrukturisasi industri menjadi sebuah pilihan. Hal ini bisa dilakukan dengan merelokasi ke kawasan lain atau mengganti tenaga manusia dengan mesin-mesin modern.

Karena itu kebijaksanaan UMR yang direncanakan terus dinaikkan secara berkala konsekuensi yang akan mengikutinya akibat kebijaksanaan





tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kata kunci yang semakin tidak bisa dihindarkan. Laju kompetisi pada dunia ketenagakerjaan juga akan diuji lagi pada abad mendatang saat dimulainya AFTA yang bukan saja akan membebaskan bea-bea masuk barang dagangan dari kawasan Asia Tenggara tetapi juga dengan dibukanya pintu lapangan kerja bagi tenaga kerja asing.

Di sisi lain dengan terus meningkatnya persaingan dalam mencari nafkah di Jakarta pada satu pihak dan realita Jakarta sebagai Ibukota yang harus mampu berdiri sejajar dengan Ibukota negara-negara di dunia lainnya pada pihak lain, akan memberikan berkah tersendiri bagi penduduk yang mempunyai daya saing. Namun, bagi sebagian lainnya yang kurang siap, akan tersisihkan. Sebuah kenyataan pahit yang sulit dihindarkan.

Namun demikian, Pemerintah berupaya melalui program Transmigrasi. Pilihan ini, bukan berarti penyebaran kemiskinan, tetapi sebaliknya, justru untuk lebih mengangkat harkat dan martabat penduduk kurang beruntung yang mudah-mudahan menjadi lebih baik kehidupannya di tempat yang baru.

Adapun jumlah transmigran asal DKI Jakarta yang berhasil dikirim selama Pelita I hingga V tercatat sebanyak 20.714 KK atau 75.176 jiwa, berarti mencapai 86,34 persen dari target yang dicanangkan sebesar 23.991 KK. Memasuki tahun pertama Pelita VI realisasi target yang dapat dilampaui sebanyak 97,56 persen, tahun ke II 100 persen dan sampai pertengahan tahun ke III tercatat sebanyak 51 persen atau mencapai 2.530 KK.

Asal transmigran tersebut bila dikaji menurut wilayahnya di DKI Jakarta, maka Kotamadya Jakarta Utara, menjadi pengirim transmigran terbesar, menyusul kemudian Jakarta Pusat. Kenyataan ini dengan mudah dapat dipahami, karena di wilayah Jakarta Utara, khususnya para nelayan yang mendiami daerah sepanjang pantai Marunda dan Muara Angke yang direlokasi ke wilayah luar Jawa dengan karakteristik wilayah yang disesuaikan dengan daerah asalnya.



PENDIDIKAN

Sukses perkembangan pendidikan di DKI Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan program bantuan Inpres Pendidikan yang dimulai sejak 1973. Upaya yang ditujukan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, khususnya pendidikan dasar ini antara lain dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung SD.

Di samping itu, sebelum pelaksanaan Inpres Pendidikan, Pemerintah DKI Jakarta sejak Pelita I telah meletakkan dasar-dasar dengan visi yang tidak jauh berbeda. Program ini kemudian ditindaklanjuti dengan Program Wajib Belajar 6 tahun yang sasarannya adalah seluruh bangsa Indonesia paling tidak mempunyai pendidikan setingkat Sekolah Dasar. Dan, ternyata program tersebut mencapai sukses luar biasa sampai kemudian Pemerintah Pusat mencanangkan program Wajib Belajar 9 tahun, menjelang akhir Pelita V.

Sekali lagi, DKI Jakarta mampu menunjukkan prestasi yang cukup dibanggakan. Hal ini terindikasi dari angka partisipasi murni (Net Enrollment Ratio), utamanya pada jenjang-jenjang pendidikan yang menjadi sasaran Program Wajib Belajar. Untuk tingkat sekolah dasar angka NER yang dapat dicapai pada 1990 adalah 96 persen, kemudian pada 1993 menjadi 98 persen dan terus berjalan konstan hingga 1996. Untuk SLTP juga terjadi peningkatan NER, dari hanya 81 persen pada 1990 menjadi 89 persen pada 1996. Peningkatan yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada tingkat SLTA, dari hanya 57 persen pada 1990 meningkat menjadi 69 persen pada 1993 dan terakhir menjadi 74 persen. Sementara itu, untuk tingkat Perguruan Tinggi peningkatan NER yang bisa diraih berturut-turut adalah 19 persen, kemudian 23 persen dan pada 1996 kembali meningkat menjadi 26 persen. Peningkatan NER dalam 6 tahun terakhir ini memperlihatkan bukti keberhasilan program Pemerintah dalam bidang pendidikan, walaupun masih harus diakui ada sebagian penduduk yang putus sekolah karena berbagai keterbatasan.

Untuk aktivitas generasi muda, Pemerintah juga telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana, antara lain 23 buah gelanggang remaja tingkat Kecamatan, 5 buah gelanggang remaja tingkat Wilayah kota dan bantuan sarana di wilayah Botabek. Sementara itu kegiatan gugus depan dan pramuka juga mengalami pertumbuhan cukup pesat. Pada kurun 1972-1992 angka pertumbuhan gugus depan meningkat sebesar 12,62 persen dan Pramuka 18,33 persen. Salah satu kata kunci pembinaan generasi muda adalah pada peningkatan kreativitas, inovasi dan kemandirian agar kelak mereka bukan hanya penerus dan pewaris masa kini tetapi generasi inovatif, kreatif dan mandiri.

Pembinaan sub-sektor olahraga terus diupayakan, bukan hanya untuk menciptakan masyarakat yang sehat tetapi juga untuk dapat meraih prestasi pada tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu pula dukungan fasilitas keolahragaan terus dikembangkan dengan berbagai keragamannya. Antara lain dengan dibangunnya lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan basket, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, tenis meja, lapangan golf, stadion utama dan lain sebagainya.

Selanjutnya, agar supaya raihan prestasi dapat dicapai di segala tingkatan, maka Pemerintah DKI Jakarta juga mengembangkan sekolah khusus olahraga dan pusat-pusat pendidikan olahraga dan lain sebagainya. Dari apa yang dilakukan tersebut, Propinsi DKI Jakarta yang dilakukan tersebut, Propinsi DKI Jakarta tercatat sebagai juara umum pada SEA GAMES XIX, sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Prestasi atlet DKI Jakarta ini juga relatif baik pada penyelenggaraan kegiatan olah raga lainnya, baik pada skala nasional maupun internasional.

AGAMA

Secara umum pemeluk agama Islam memang masih dominan, yakni 83,84 persen. Sementara itu, pemeluk Agama Kristen (Katolik dan Protestan) secara keseluruhan tidak mengalami perubahan, proporsinya relatif tetap, yakni 5,6 persen. Demikian pula dengan pemeluk agama Budha dan Hindu yang proporsinya sekitar 4 persen.

Adapun jumlah sarana peribadatan di DKI Jakarta tiap tahun secara keseluruhan terus mengalami kenaikan rata-rata per tahun 1,04 persen. Untuk Masjid meningkat 4,06 persen per tahun, Mushalla 0,41 persen per tahun, Gereja 3,78 persen dan Pura, Kuil serta Kgenteng relatif tetap.

Selain itu, yang juga tidak kalah penting dalam pembinaan keagamaan dan secara intensif terus didukung dan dikembangkan Pemerintah DKI Jakarta adalah pada pembinaan keagamaan melalui berbagai media da'wah. Dari catatan yang ada, jumlah juru penerang agama yang mengisi berbagai media da'wah di DKI Jakarta selama Pelita V rata-rata per tahunnya mengalami peningkatan 12,78 persen.

Dengan semua upaya yang dilakukan tersebut, DKI Jakarta yang meskipun begitu sarat dengan berbagai imbas modernisasi tetapi ternyata masih menampakkan kehidupan keagamaan yang penuh guyub dengan pendalaman pada masing-masing pemeluknya yang juga terus berkembang baik. Meskipun memang, upaya-upaya tersebut masih perlu terus ditingkatkan, mengingat ancaman SARA dan beragam fenomena sektarian masih begitu melekat di sebagian warga ibukota.

Bagaimanapun, kesadaran yang telah ada melalui realitas sosial yang penuh guyub ini serta jauh di dalam lubuk sanubari penduduk Jakarta dengan keragaman keimanan dan kepercayaannya adalah agar apa yang telah diraih saat ini dapat lestari. Beragam konflik serta petaka yang diakibatkan oleh benturan antar pemeluk agama diberbagai negara belakangan ini turut memberikan inspirasi pada para pemeluk agama yang serbaneka itu bahwa, keguyuban, kebersamaan dan keadaan yang penuh solidaritas ini merupakan aset yang sangat mahal harganya.

Dalam hal ini, Pemerintah DKI Jakarta juga menyadari sepenuhnya akan realitas tersebut dan karena itu pula harmonisasi antara ulama dan umara terus dijalini. Baik melalui Silaturahmi Ulama-Umara maupun beragam kegiatan lain yang menempatkan para ulama sebagai rekan seiring sejalan dalam menentukan masa depan ibukota dan juga bangsa tercinta ini.





JAKARTA KOTA TUJUAN WISATA

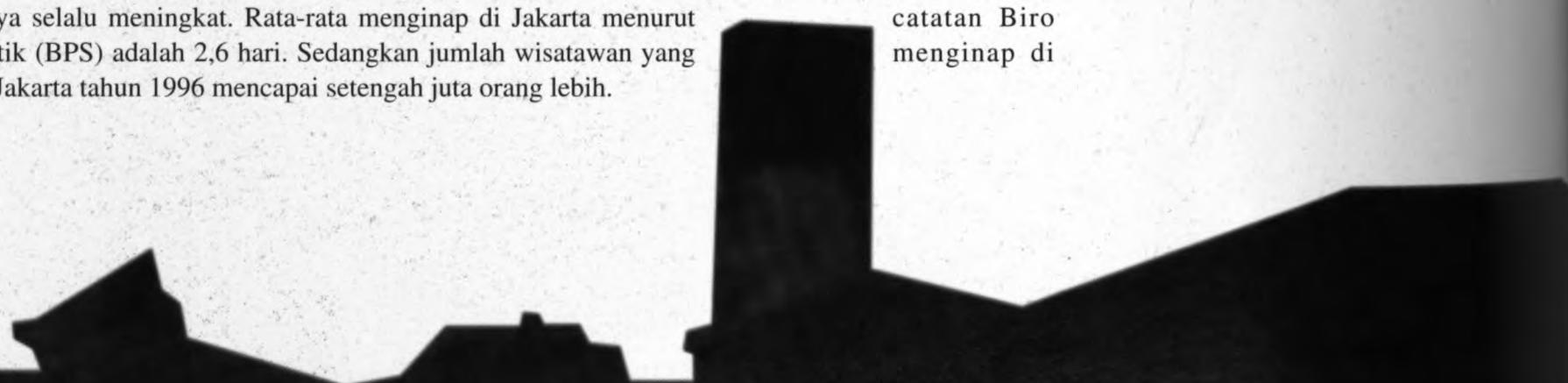
*J*akarta merupakan pintu gerbang utama Indonesia dengan lalu lintas yang sangat sibuk. Dengan letaknya yang sangat strategis di kepulauan Indonesia, telah turut menjadikan Jakarta sebagai tempat yang tepat untuk berbagai ragam kegiatan usaha jasa, khususnya transportasi, baik darat, udara maupun laut, termasuk sebagai daerah tujuan wisata.

Infrastruktur untuk mendukung Jakarta sebagai daerah wisata antara lain jalan, yang saat ini kurang lebih mencapai 3.751 km², termasuk jalan bebas hambatan yang menghubungkan daerah sekitarnya, seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi, jalan arteri dan jalan lokal disamping sarana angkutan kereta api mempunyai peranan yang penting pula, baik untuk angkutan penumpang ataupun angkutan barang, dari dan ke segenap kota di Pulau Jawa.

Jakarta juga mempunyai dua pelabuhan udara yang mempunyai fungsi dan sifat yang berlainan. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, sebagai pintu gerbang penerbangan internasional dan domestik. Kedua, Bandara Halim Perdama Kusuma yang merupakan pelabuhan militer dan sekarang dipergunakan khusus untuk menerima tamu-tamu negara dan pemberangkatan serta penerimaan jemaah haji. Di samping itu, Jakarta memiliki empat pelabuhan laut yang masing-masing mempunyai kegiatan yang berbeda. Pelabuhan laut Tanjung Priok, sebagai pelabuhan peti kemas, penumpang dan pelabuhan laut internasional. Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan interinsuler, Muara Angke sebagai pelabuhan ikan dan Marunda sebagai pelabuhan kayu. Sebagai kota pariwisata, Jakarta memiliki berbagai prasarana pariwisata relatif lengkap. Obyek-obyek wisata dapat disaksikan berbagai kekayaan dan pertunjukan seni budaya dari propinsi-propinsi di Indonesia di samping kebudayaan asli Betawi, dan tempat bersejarah lainnya.

Adapun jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jakarta melalui pintu udara dan melalui laut tiap tahunnya selalu meningkat. Rata-rata menginap di Jakarta menurut Pusat Statistik (BPS) adalah 2,6 hari. Sedangkan jumlah wisatawan yang hotel-hotel Jakarta tahun 1996 mencapai setengah juta orang lebih.

catatan Biro
menginap di



PELABUHAN TRADISIONAL SUNDA KELAPA

*P*elabuhan ini sudah sejak abad 16 ramai dikunjungi kapal-kapal dari Asia maupun Eropa, dan kini masih tetap berfungsi dan setiap hari disarati kapal-kapal Pinisi. Meskipun ada perubahan di sana-sini, namun tata letak pelabuhan ini masih tetap sebagai sediakala, kecuali bagian perluasan di sebelah Timur.

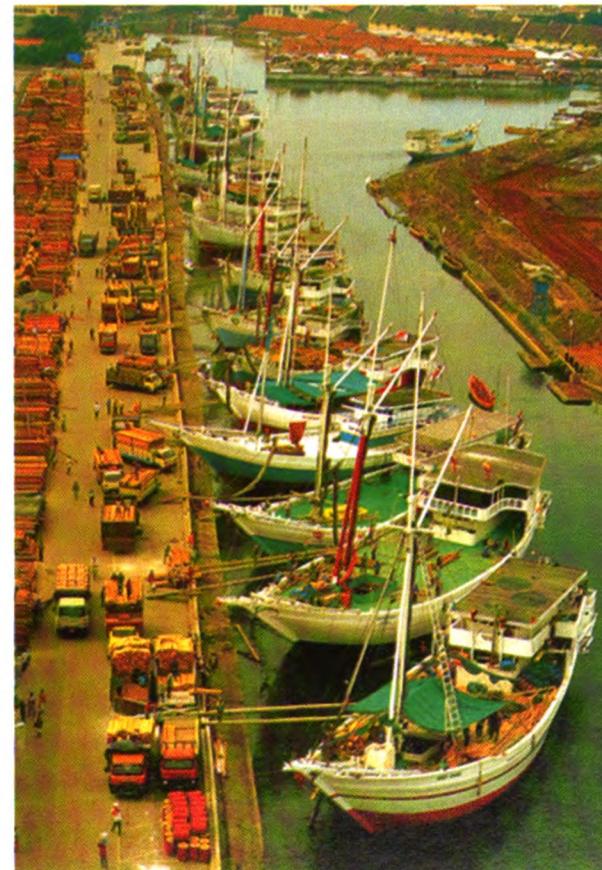
Pelabuhan ini kini menjadi pelabuhan kayu, dengan sistem bongkar muat yang sepenuhnya dilakukan secara tradisional. Hal ini menjadi atraksi yang cukup unik dan menarik wisatawan.

Di kawasan ini, juga masih terdapat gudang-gudang tua bekas benteng tempat loji VOC yang pertama kali dikembangkan di bumi Jakarta. Salah satu benteng terbesarnya adalah Fort van Jacatra.

Di ujung pelabuhan terdapat menara lama yang kerap disebut Menara Pabean. Dari menara Pabean ke arah Utara terdapat Museum Bahari. Bangunannya dulu merupakan gudang utama pelabuhan yang dilindungi tembok tebal. Gudang ini dibangun tahun 1652 dan beberapa kali mengalami renovasi, 1719, 1771 dan terakhir 1985.

Di muka Museum Bahari, terdapat pasar Ikan. Bangunan besar yang kini digunakan sebagai tempat pelelangan dibangun pada tahun 1920-an. Di sekelilingnya terdapat banyak kios-kios kecil tempat menjual berbagai kebutuhan pelaut. Ke arah Utara terdapat Masjid Luar Batang yang dibangun tahun 1739, dimana terdapat makam Sayid Husein bin Abubakar bin Abdullah Al Idrus.

Dengan potensi yang demikian, Pemerintah DKI Jakarta sejak 22 Juni 1996 memancangkan program Revitalisasi di kawasan ini, melalui program revitalisasi Kali diharapkan dapat mengangkat citra, jatidiri dan kebanggaan warga kota, di samping pembangunan ekonomi kota khususnya kepariwisataan DKI Jakarta.



TAMAN FATAHILLAH



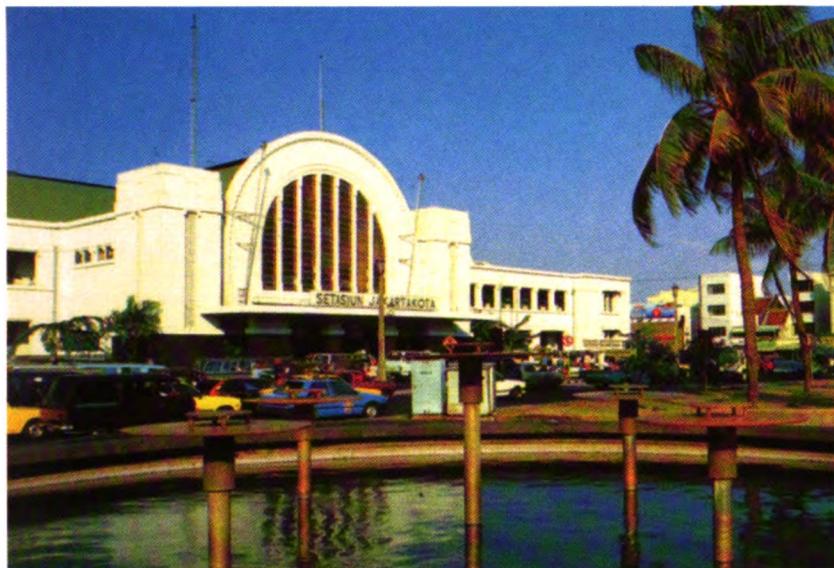
Gedung megah ini yang dilengkapi dengan taman di mukanya. Gedung tersebut, dulu dipakai sebagai Balaikota. Gedung ini pertama kali dibangun tahun 1627, kemudian pada 1707-1710 dibangun gedung yang lebih besar yang sekarang digunakan dan dikenal sebagai Museum Jakarta.





MUSEUM WAYANG

*G*edung ini terdapat di sebelah Barat Taman Fatahillah. Pada lokasi ini dulu terdapat Gereja lama (1640-1732) dan Gereja baru (1736-1808). Di sini dimakamkan JP Coen serta 18 Gubernur Jenderal lainnya. Bangunan yang ada sekarang dibangun tahun 1912. Dalam museum ini tersimpan berbagai jenis wayang dari berbagai daerah serta negara Asia lainnya.



STASIUN KOTA

*D*ari Museum Seni Rupa ke Selatan terdapat Stasiun Kota. Bangunan ini dibangun tahun 1929. Di depan stasiun kota terdapat taman yang merupakan oasis di tengah hutan beton.

BALAI SENI RUPA

*B*alai Seni Rupa terletak di seberang Museum Wayang, dibangun tahun 1866-1877. Bangunan ini dulunya merupakan gedung pengadilan. Dalam museum ini dipamerkan berbagai jenis keramik lokal dan asing serta lukisan Raden Saleh, Sudjono dan lain sebagainya.

BANGUNAN TUA

Beberapa bangunan peninggalan lama, sekarang masih dapat disaksikan tidak jauh dari kawasan Taman Stasiun Kota ke arah barat menuju Jalan Kali Besar Barat, dan Kali Besar Timur.

Di sisi Timur Kali Besar terdapat beberapa bangunan kuno yang masih menarik. Salah satunya gedung Asuransi Jasa Raharja. Di sebelah Utaranya terdapat gedung Standard Chartered Bank, menyusul kemudian bangunan Toko Merah, karena interiornya berwarna merah, serta berbagai bangunan unik lainnya.

Ke arah Selatan terdapat Jalan Asemka tempat berderet kantor-kantor bertingkat dengan beberapa bangunan lama gaya Cina yang masih terselip diantara bangunan-bangunan baru. Salah satu bangunan lama itu adalah rumah abu, sedang lainnya adalah hotel dan kantor. Di sebelah Utara Taman terdapat Bank Bumi Daya sedangkan sebelah baratnya terdapat gedung Bank Ekspor-Impor. Tidak jauh dari tempat ini juga terdapat gedung Bank Indonesia dengan arsitektur abad 19.

Beberapa bangunan peninggalan lama, sekarang masih dapat disaksikan tidak jauh dari kawasan Taman Stasiun Kota ke arah Barat menuju Jalan Kali Besar Barat, dan Kali Besar Timur.



GLODOK DAN SEKITARNYA

Pada abad 17 tembok kota lama bagian Selatan terletak di Jalan Asemka sekarang. Di luar tembok bagian Selatannya berkembang pemukiman yang dihuni oleh pedagang Cina yang selanjutnya disebut Kawasan Glodok atau Pecinan.

Di kawasan ini banyak dijumpai bangunan dengan arsitektur Cina, dengan atap yang melengkung serta ukiran pada tepi dan ujung atapnya. Pada dindingnya sering dijumpai hiasan tempelan porselin kuno. Fenomena ini bisa dijumpai di sepanjang Jalan Perniagaan, Pejagalan, Bandengan, Toko Tiga dan Blandongan.

Di antara kepadatan pemukiman di kawasan Glodok terdapat beberapa krenteng kuno yang sudah berumur lebih dari 200 tahun. Salah satunya adalah Vihara Dharma Bhakti yang dikenal pula dengan Krenteng Jin De Yuan, dibangun tahun 1615. Di kawasan ini juga terdapat Masjid, yakni Masjid Tambora dan Masjid Pekojan yang dibangun abad 18.



JALAN GAJAH MADA-HAYAM WURUK

Kanal Gajah Mada -Hayam Wuruk digali pada tahun 1648 dan dikanan-kirinya tumbuh rumah-rumah peristirahatan besar dan mewah. Sekarang sudah tidak tersisa kecuali tempat tinggal Gubernur Jenderal Renier de Klerk (1777-1780) yang kini menjadi Gedung Arsip Nasional. Selain itu terdapat Masjid Kebon Jeruk yang dulu dibangun masyarakat keturunan Cina yang beragama Islam.



KANTOR POS

*B*angunan mirip barak ini dibangun tahun 1913, arsitekturnya sangat menarik dengan unsur-unsur bangunan sangat dekoratif menangkap Cahaya untuk lebih menghidupkan bangunan. Di seberang kantor Pos, di sebelah Utara sungai terdapat gedung Antara dan kemudian Pasar Baru.



KATHEDRAL

*P*engembangan sekitar Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, dulu dibangun vila terbuka dan bangunan rapat, merupakan transisi antara sistem bangunan rapat daerah kota lama dan sistem bangunan terbuka yang kemudian berkembang di kawasan Lapangan Banteng. Salah satu peninggalan yang menarik di sini adalah Kathedral, dibangun dari tahun 1891-1901, bergaya Neo-Gothic yang dijiwai revolusi industri.

PASAR BARU



Pasar Baru merupakan daerah wisata belanja yang terkenal sejak dulu. Pada masa itu, Pasar Baru merupakan daerah perbelanjaan yang bergengsi. Kejayaannya sangat dipengaruhi oleh letaknya yang strategis. Letaknya yang berdekatan dengan beberapa bangunan penting yang saat ini dipakai untuk gedung Departemen Keuangan (dulu berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan), gedung Kesenian sebagai pusat hiburan serta kantor pos di dekatnya membuat kawasan ini semarak dan bergengsi.

KAWASAN CONDET

Kawasan Condet terletak di Jakarta Timur, merupakan kawasan cagar budaya Betawi. Kehidupan penduduk Betawi dengan berbagai atribut budayanya juga masih kental di kawasan ini. Dengan mudah bisa dilihat rumah-rumah tradisional Betawi, yang sedikitnya ada empat tipe. Tipe Gudang, Bapang, Kebaya, dan Joglo.

Rumah tipe Gudang dan Bapang, memiliki bentuk segi empat yang polos dan sangat sederhana. Sedangkan rumah tipe Kebaya, memiliki beberapa pasang atap, yang apabila dilihat dari samping tampak berlipat-lipat seperti lipatan kebaya.

Adapun tipe Joglo, dicirikan dengan atap yang menjorok ke atas dan tumpul, seperti rumah Joglo Jawa.

Di samping bentuk hunian penduduk Betawi dan kehidupan penduduk Betawi yang serba sederhana serta terbuka, di kawasan Condet juga masih kental tradisi dan budaya kesenianya. Dari Gambang Kromong, Tanjidor, Samrah, hingga ondel-ondel.

Boneka ondel-ondel, dianggap sebagai maskot Betawi, dan diduga berasal dari ribuan tahun yang lalu pada mulanya dipengaruhi agama Hindu-Jawa. Dari muasalnya yang berakar agama Hindu, diduga Boneka Ondel-Ondel ini pada mulanya merupakan penggambaran dewa-dewa Brahma, Visnu, dan Siwa dan istri-istri mereka yang dibuat dan dipersembahkan sebagai hadiah, ketika orang-orang Betawi berkunjung ke daerah lain.

Tinggi ondel-ondel bisa mencapai antara 2-3 meter, terbuat dari kerangka bambu dan tubuhnya dari kardus dan kertas. Biasanya kelompok ondel-ondel terdiri dari 15 orang, termasuk para musisi dan pemain ondel-ondel di bawah pimpinan seorang dalang. Boneka-boneka yang berat itu biasanya menggambarkan seorang wanita dan seorang pria yang berpakaian upacara perkawinan. Boneka-boneka itu, wajahnya dibuat dari kayu atau fiber glass, dengan ekspresi angker dan rambutnya terbuat dari ijuk.





MUSEUM PUSAT

Terletak di Jalan Merdeka Barat, berderetan dengan Markas Besar ABRI, dibangun pada abad 19. Gedung ini sering disebut pula sebagai Gedung Gajah, karena di halaman muka museum terdapat patung gajah hadiah dari raja Thailand pada awal abad 20. Di museum ini disimpan banyak peninggalan sejarah.





TAMAN MINI INDONESIA INDAH

TMII dibangun di atas tanah 400 hektar, di Jakarta Timur bagian selatan. Dalam usianya yang 20 tahun kini, TMII telah mampu memberikan sumbangan berarti bagi pendidikan masyarakat guna menyadari betapa kaya Indonesia secara budaya yang berasal dari zaman batu hingga paling modern. Di tingkat dunia keberadaan TMII dianggap sukses, ini dibuktikan dengan diterimanya Penghargaan Kencana (Gold Award) dari Pasific Asia Travel Association (PATA) pada tahun 1994.

TMII mengungkapkan keragaman berbagai sajian yang dalam dan luas cakupannya, walaupun menggunakan kata "mini" akan tetapi segala sesuatunya disajikan dalam ukuran sebenarnya (life size).

Dengan 27 anjungan yang masing-masing mewakili 27 propinsi di Indonesia, dengan masing-masing anjungan menggelar berbagai budaya daerahnya secara utuh. Di samping itu, keberadaan flora dan fauna Indonesia yang baru salah satu

telah menjadikan TMII sebagai Taman Bhineka Tunggal Ika yang mampu menyajikan nuansa budaya Nusantara Taman Burung dan Akuarium Air Tawar juga telah mampu mengenalkan Indonesia. Juga dengan aneka museum yang dikembangkan di kawasan ini, diresmikan pada pertengahan April 1997 adalah Museum Istiqlal dan Bayt Al-Qur'an yang mempresentasikan kekayaan Islam maupun studi tentang Islam yang menurut catatan merupakan Museum Al-Qur'an terbesar di dunia.

Kesuksesan TMII bukan saja semata-mata sebagai taman untuk memperoleh berbagai hiburan, tetapi juga sebagai taman pendidikan. Hal ini kemudian mengilhami banyak diantara 27 propinsi di Indonesia yang berlomba untuk memiliki taman-taman serupa yang mengungkapkan kekayaan masing-masing daerah dengan kedalaman maupun pembangkitan kesan dan kesadaran tentang budaya suatu bangsa.

MONUMEN NASIONAL

Terletak di jantung kota Jakarta dan merupakan landmark Ibukota. Tugu yang dibangun pada tahun 1961 ini diujungnya terdapat lidah api yang dilapisi emas dan di dalam tugunya terdapat museum dengan diorama perjuangan bangsa Indonesia. Di museum ini pula sering diperdengarkan rekaman pembacaan teks Proklamasi oleh Presiden Soekarno. Dari puncak tugu, selayang pandang dapat disaksikan wajah Jakarta dan pemandangan ini menjadi demikian romantis bila disaksikan di senja kala.

Pada awalnya tugu ini dijadikan patokan pengembangan Jakarta, dengan radius 15 Km, namun bersamaan dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan di Jakarta, maka kaidah pembangunan ibukota tersebut kini telah jauh terlampaui.

Namun terlepas dari kenyataan tersebut, Monumen Nasional (Monas) tetap menjadi tengeran (landmark) Jakarta dan kini dilengkapi dengan taman besar seluas 10 Ha, diharapkan akan menjadi taman kebanggaan sebagaimana dimiliki kota-kota lain di dunia, disamping juga menjadi paruh-paruh utama ibukota.



KAWASAN ANCOL



Dengan luas tanah hampir 300 hektar Taman Impian Jaya Ancol merupakan kawasan wisata pantai yang menyajikan banyak suguhan. Ada dunia Fantasi, mengikuti gaya Disneyland model Indonesia; Gelanggang Samudra, yang setiap hari menyajikan atraksi lumba-lumba dan singa laut; Sea World yang merupakan akuarium laut terbesar di kawasan Timur Jauh yang menyediakan lebih dari 5.000 ikan tropis dari perairan Indonesia; Gelanggang Renang dengan tujuh kolam renang; Restoran; Hotel; Kolam Luncur; Kolam Spiral; Gurita Raksasa; Marina Ancol yang juga merupakan pelabuhan pemberangkatan ke kawasan kepulauan Seribu; Pasar Seni, tempat mangkal sejumlah kreator seni; dan lain sebagainya.

KEBUN BINATANG RAGUNAN

Lokasinya tidak jauh dari Pasar Minggu, dengan luas sekitar 185 hektar dan kurang lebih mempunyai 3.600 koleksi satwa liar Indonesia dan mancanegara.



KEPULAUAN SERIBU

Terletak di seberang Teluk Jakarta bagian utara. Pulau-pulau kecil tersebut mampu menawarkan tempat beristirahat. Beberapa pulau di kawasan ini juga menyediakan pondok-pondok dengan nuansa tropis dengan alamnya yang memanjakan pendatang yang gemar olahraga selam, snorkel dan lain sebagainya. Kawasan kepulauan ini dengan mudah dapat dicapai dari Pantai Marina Ancol.



WISATA BELANJA

Banyak fasilitas perbelanjaan di Jakarta, modern maupun tradisional. Yang modern dibangun dari ujung Barat seperti Mal Ciputra hingga ujung Timur Metropolitan Mal, Orion dan lain sebagainya. Sementara itu fasilitas belanja tradisional yang banyak menarik wisatawan antara lain:

Pasar Seni Ancol, terdapat di kawasan Pantai Ancol Jakarta Utara, tempat berkumpul sejumlah kreator seni tradisional maupun kontemporer dengan berbagai galeri.

Pasar Antik Jalan Surabaya, terletak di pinggir kawasan hunian Menteng, Jakarta Pusat di sepanjang jalan yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Di sini tersedia berbagai barang antik hampir dari segala pelosok Nusantara. Pasar Burung, terletak di Jalan Pramuka Jakarta Timur, di sini tersedia berbagai jenis burung dengan perangkat asesorisnya.

Pasar Kaki Lima Pecenongan, terletak di Jalan Pecenongan Jakarta Pusat dan buka hanya di malam hari, menyajikan aneka makanan khas Indonesia.

Pasar Kaget Blok-M, terdapat di kawasan Blok-M Jakarta Selatan, buka malam hari dan menyajikan makanan khas.





WISATA KONVENSI

Wisata konvensi atau dikenal pula dengan MICE Industry (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition), dianggap mempunyai nilai lebih bila dibanding dengan jenis wisata lainnya. Dari angka rata-rata lama tinggal juga lebih tinggi dari wisatawan biasa, demikian juga dengan jumlah pengeluaran (expenditures) yang lebih besar.

Dalam segi pemasarannya, kegiatan wisata konvensi mempunyai high yield serta kualitas yang tinggi pula. Ini disebabkan karena peserta konvensi terdiri dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Fasilitas wisata konvensi yang ada di Jakarta kini telah cukup tersedia bahkan untuk kepentingan mega konvensi dengan kapasitas jumlah peserta ribuan. Fasilitas mega konvensi tersebut di Jakarta terdapat di Jakarta Convention Center dengan kapasitas tempat duduk, Class 607 tempat duduk, Banquet 1.000 tempat duduk dan Reception sebanyak 2.275 tempat duduk. Sementara itu di Jakarta Internation Trade Fair Kemayoran mempunyai kapasitas teater 1.400 tempat duduk, Class 700 tempat duduk, Banquet 940 tempat duduk dan Reception 2.800 tempat duduk.

Di samping itu Hotel Kelas Internasional di Jakarta yang masuk ke dalam International Hotel Chine, seperti Hilton, Hyatt, Intercontinental, Le Meridien, Club Mediteranian dan lain sebagainya mempunyai peranan penting sebagai pendukung wisata konvensi. Ini belum lagi termasuk Hotel Indonesia, Aryaduta dan lain sebagainya.



INVESTASI PARIWISATA

Prospek perkembangan kepariwisataan di Jakarta yang cukup cerah nampak terus memberikan dorongan bagi ragam usaha bidang Pariwisata. Kecenderungan yang paling terakhir yang nampak adalah dengan banyaknya dikembangkan fasilitas-fasilitas bagi orang asing yang tinggal di Jakarta untuk kegiatan bisnis, seperti Apartemen, Restoran, Pusat Perbelanjaan dan lain sebagainya.

Hal ini memudahkan wisatawan asing yang datang ke Jakarta dalam urusan akomodasi, karena relatif banyaknya jumlah hotel bertaraf internasional yang sebagian besar di antaranya melakukan kontrak manajemen dengan jaringan hotel internasional (chain hotel) di luar negeri, seperti Hilton Int'l Holiday Inn, Hyatt, Accor Asia Pasific dan lain sebagainya. Yang didukung dengan beragam restoran bertaraf internasional yang menyajikan berbagai makanan khas mancanegara maupun lokal.

Adapun posisi hotel berbintang di Jakarta pada saat ini dan sudah beroperasi sebanyak 78 hotel dengan kamar yang bisa disediakan sebanyak 14.602 kamar.

Sementara itu, jumlah usaha perjalanan juga terus meningkat tajam, walaupun untuk kondisi saat ini jumlahnya sudah relatif banyak. Namun demikian nampaknya hal tersebut tidak menjadikan surutnya minat investor bidang usaha pariwisata.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pariwisata mencatat 18 proyek investasi sarana pariwisata yang telah disetujui sampai tahun 1996, dengan rincian 17 proyek investasi untuk bangunan hotel dan wisata tirta sebanyak 1 proyek.



JAKARTA KOTA JASA (SERVICE CITY)

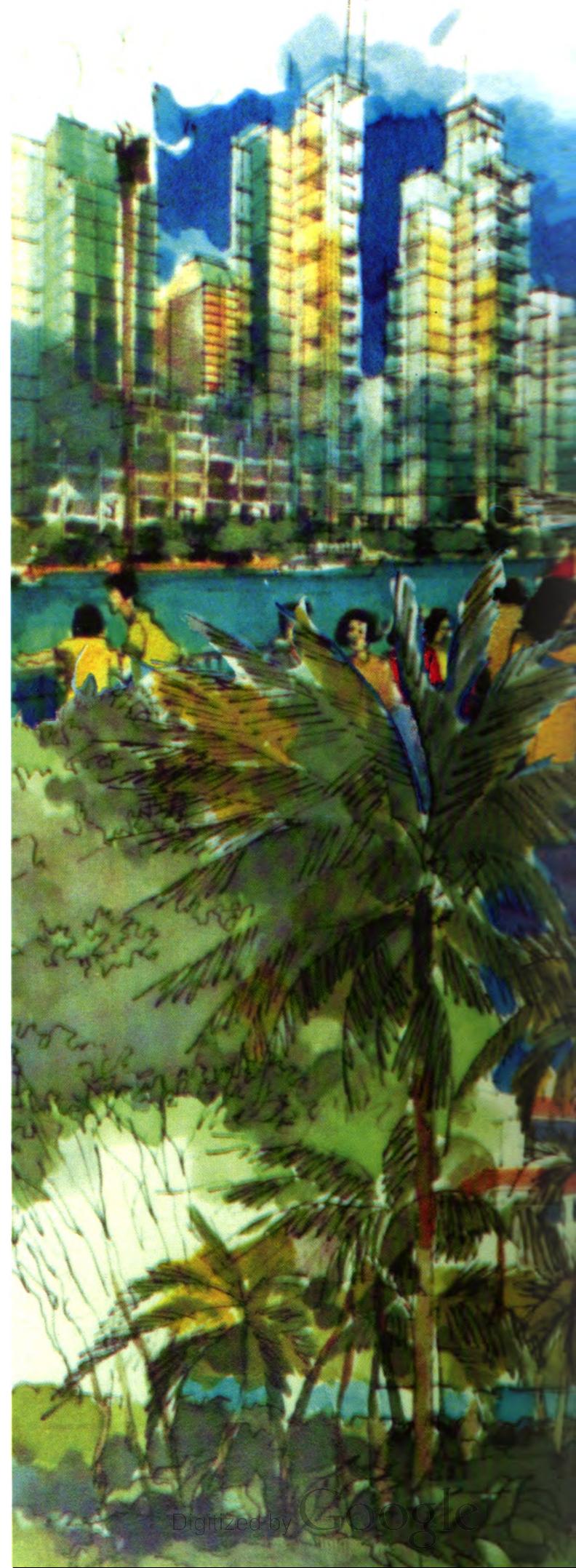
*K*ata kunci di masa depan adalah "kompetisi" dan bekerja keras untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dan kita harus siap untuk menghadapinya karena dalam persaingan ekonomi, perdagangan, produk teknologi, efisiensi, produktivitas, kualitas dan sebagainya yang melibatkan semua bangsa-bangsa di dunia.

Sementara itu, kecenderungan dan fakta di masa depan menunjukkan, bahwa kawasan Asia Pasifik akan menjadi kawasan yang paling menjanjikan, dan Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dari kawasan ini. Sudah barang tentu, di kawasan ini akan terjadi persaingan yang demikian tajam dalam berbagai bidang. Ini merupakan tantangan dan sekaligus harapan. Dalam hal ini Jakarta, sebagai ibukota negara Republik Indonesia sudah barang tentu berada di posisi paling strategis.

Dengan dicanangkannya Jakarta menjadi kota jasa (services city), adalah sebuah konsep yang cukup realistik. Pewujudan Jakarta sebagai kota jasa yang melayani kota-kota di Indonesia yang tersebar di lebih dari 13 ribu pulau itu merupakan pilihan yang berlandaskan pada kondisi obyektif yang ada. Ini bukan berarti pembebanan fungsi baru yang akan menambah rumit permasalahan, tetapi justru sebagai optimasi keberadaan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.

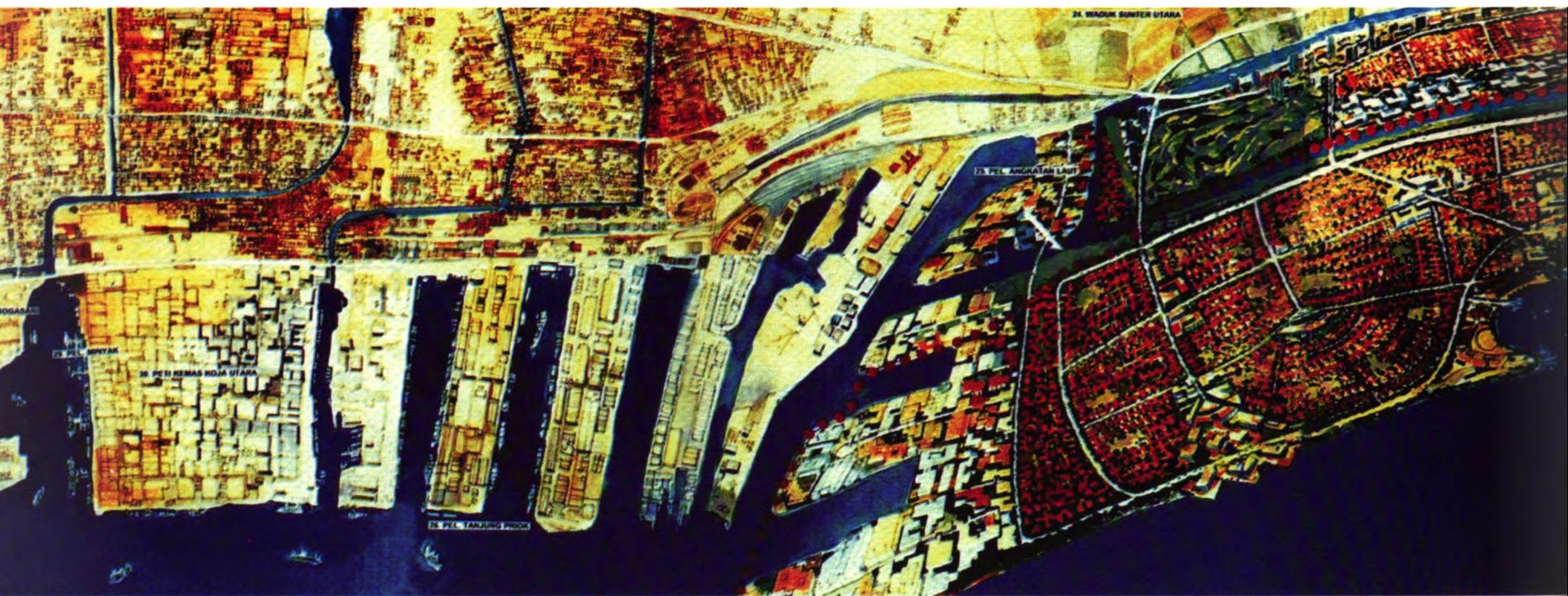
Untuk itu, sejumlah persiapan terus dicanangkan. Dalam kerangka ekonomi, bersamaan akan dikembangkannya pasar bebas Asean (AFTA), Asia Pasifik (APEC) maupun berbagai aturan yang tersaji dalam perjanjian umum akan tarif dan perdagangan (GATT) telah disiapkan berbagai perangkat. Baik oleh Pemerintah Pusat dengan deregulasi dan debirokratisasinya, maupun Pemerintah DKI Jakarta, dengan menyebarkan kawasan industri di sekitar Botabek, pengembangan angkutan umum massal yang diharapkan akan semakin memperlancar transportasi dari satu kawasan ke kawasan lainnya, pengembangan hunian vertikal untuk menjawab tentang perumahan penduduk, pengembangan Pantai Utara (Pantura) sebagai pintu gerbang Jakarta lewat jalur laut dan yang tidak kalah pentingnya adalah jalinan kerjasama antar kota.

Pengembangan beragam mega proyek itu di samping ditujukan untuk mengantisipasi tantangan yang bakal hadir, ternyata juga didukung oleh berbagai prestasi. Untuk indek pembangunan manusia misalnya, DKI Jakarta berada di atas propinsi lainnya yang mempunyai skor rata-rata 53, sementara DKI Jakarta 57. Pertumbuhan ekonominya selama Pelita VI yang cukup tinggi 8,23% melampaui prestasi nasional yang hanya 7,1%. Demikian pula pendapatan perkapitanya yang pada 1996 telah mencapai US\$ 3.600, sementara rata-rata nasional baru US\$ 917.





MENUJU ABAD 21



Abad 21, kawasan Asia Pasifik akan menjadi bagian dunia yang paling dinamis ekonominya. Asia Development Bank (ADB) memperkirakan bahwa, pada tahun 2000, di luar Jepang, sekitar 75 juta rumah tangga di Asia Pasifik akan mempunyai penghasilan rata-rata sama dengan penghasilan golongan menengah Amerika Serikat saat ini. Bahkan, ada yang meramalkan, dalam waktu 15 tahun mendatang Asia Pasifik akan lebih makmur dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Eropa.

Bank Dunia meramalkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) tujuh negara industri sampai akhir 1996 nanti tidak akan melebihi 3 persen. Sedangkan pertumbuhan GDP negara Asia Pasifik diperkirakan sekitar 7-8 persen. Padahal 50 tahun yang lalu, negara-negara Asia Pasifik, kecuali Jepang dan Thailand, masih merupakan jajahan Amerika dan Eropa. Tiga dekade lampau, kawasan ini hanya menguasai 4 persen pasaran dunia, kini angkanya naik menjadi 25 persen dan tahun 2000 diperkirakan akan menjadi 33 persen.

Perkembangan di Asia Pasifik ini mulai berkembang sejak munculnya negara-negara industri baru (Newly Industrialized Country), seperti Jepang pada 1960-an.

Kini APEC, yang beranggotakan 18 negara telah menguasai tidak kurang dari 40 persen pasaran dunia dan posisi Indonesia di kalangan negara Asia Pasifik kini mulai diperhitungkan. Hal ini dapat dimengerti karena Indonesia telah melakukan persiapan, utamanya melalui deregulasi perdagangan sejak tahun 1986.



Setelah deregulasi itu nampak terjadi pertumbuhan luar biasa, terutama pada ekspor non migas, industri manufacturing yang dibarengi dengan peningkatan variasi produk yang dijual. Dengan meningkatnya jumlah produk yang dijual dapat menutup kerugian akibat pengurangan bea masuk yang terus dilakukan melalui paket-paket deregulasi, sampai kemudian dapat dicapai perdagangan yang betul-betul dapat bersaing bebas tanpa proteksi.

Pengembangan perdagangan bebas juga dilakukan di lingkungan Asean yang direncanakan akan diberlakukan mulai tahun 2003. Dan Indonesia melalui Paket 23 Mei 1995 telah meluncurkan kebijaksanaan untuk menurunkan tarif secara bertahap hingga tahun 2003.

Dengan semakin dekatnya pelaksanaan AFTA, posisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi demikian penting. Industri berat yang semula menumpuk di Jakarta kini lebih didistribusikan ke kawasan sekitar dan demi efisiensi dikembangkan sejumlah kawasan-kawasan industri yang mampu menampung kegiatan industri dalam skala besar tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan lingkungan. Sistem transportasi dan sarana-sarana pendukung lainnya juga terus disempurnakan.

Masalah pada milenium mendatang sangat sarat, sebagai contoh pada tahun 2005 penduduk Jakarta di proyeksikan akan menjadi 12 juta. Sebagai catatan, proyeksi penduduk Botabek pada 2005 akan menjadi

17 juta jiwa, sehingga dengan kenyataan tersebut di atas, maka Botabek akan tumbuh menjadi sebuah megapolitan.

Sementara itu dalam pola hunian, meskipun cukup banyak kelas menengah ke atas yang memilih hunian di daerah pinggiran Jakarta (sub-urban), namun diperkirakan di tengah Jakarta masih akan tetap banyak populasi penduduk kelas menengah-atas yang menghuni apartemen-apartemen.

Sebagaimana diungkap Ginanjar Kartasasmita dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 1997, bahwa dalam Pelita VII nanti setidaknya terdapat empat isu strategis yang harus dihadapi. Keempat isu tersebut adalah : Pertama, persaingan antar unit usaha yang makin keras menyusul makin terintegrasi ekonomi Indonesia dengan kawasan Asia Pasifik akibat globalisasi hingga effisiensi ekonomi dan produktivitas perlu ditingkatkan. Kedua, makin derasnya aliran dana internasional ke negara berkembang, baik melalui perbankan maupun pasar modal domestik, sehingga Pemerintah ditantang untuk menjaga laju inflasi dan fundamental ekonomi. Ketiga, mempertahankan swasembada pangan di tengah berkurangnya lahan pertanian dan pertambahan penduduk. Keempat, masalah dampak lingkungan yang membatasi kegiatan sektor ekonomi dan disparitas antar wilayah akibat sumber daya manusia serta belum terangkainya jurang antara industri hulu dan hilir.

Apa yang diungkap di atas bagi DKI Jakarta memang sangat terasa, terutama karena proses globalisasi yang kini tengah berlangsung dan menempatkan Jakarta kota metropolitan utama Indonesia sebagai lokasi ekonomi yang strategis untuk konsentrasi pemasaran, fungsi sentral komando bisnis dan tapak produksi bagi korporasi industri jasa dan finansial yang menguntungkan. Dampak dari situasi ini adalah pada berkembangnya masyarakat industrial perkotaan dengan bisnis jasa, perdagangan, retail dan pasar swalayan tersebar ke berbagai sudut kota. Radius pelayanan konsumen pun menjadi semakin luas akibat banyaknya kepemilikan kendaraan, kemajuan teknologi komunikasi dan sistem pemasaran.

Perubahan struktur ekonomi masyarakat industrial seperti ini secara bertahap akan memperkuat proses dimana peranan ekonomi rumah tangga masyarakat golongan menengah ke bawah semakin berkurang. Dikhawatirkan warung dan toko-toko kecil yang ada pada setiap lingkungan akan mati dan tergeser dari komunitas lokal mereka.

Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah dan migran dari pedesaan akan berupaya untuk tetap datang ke kota untuk mengadu nasib dan bermukim. Hal ini dilakukan karena perkembangan kota belum berhasil memindahkan pekerjaan dari pusat kota ke wilayah pinggiran. Akibatnya, kota metropolitan Jakarta akan mengalami limpahan penduduk dengan kepadatan yang makin melampaui batas kewajaran permukiman.

Di sisi lain, perbedaan tingkat sosial yang ada di Jakarta akan mendorong munculnya pemukiman tertata rapi dan dipihak lain muncul kawasan pemukiman kumuh legal (slum) maupun illegal (squatter) yang cukup kontras.

Secara umum, apa yang menjadi tantangan pada abad mendatang secara sungguh-sungguh telah diantisipasi oleh Pemerintah DKI Jakarta, menghadapi tantangan yang hadir dan majemuk dengan pelibatan segenap warga kota Jakarta, tumbuh menjadi sebuah megapolitan.



HUNIAN VERTIKAL



Kebutuhan perumahan bagi warga Jakarta tiap tahunnya tidak kurang dari 70 ribu unit yang terdiri dari kebutuhan rumah baru (horizontal maupun vertikal) sesuai dengan pertambahan penduduk dan perbaikan rumah rusak atau terkena planning serta kekurangan rumah tahun sebelumnya. Pasokan tersebut 50 persen diantaranya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, 40 persen untuk menengah dan 10 persen untuk golongan berpenghasilan tinggi. Pemasok utamanya adalah masyarakat sendiri melalui pembangunan informal dan hanya 25 persen yang mampu dipasok Pemerintah (Pemerintah dan Perumnas) dan badan usaha swasta (perusahaan pengembangan REI serta koperasi).

Kendala utama dalam penyediaan papan adalah menyangkut lahan, untuk itu Pemerintah telah mencanangkan hunian vertikal sebagai alternatif ke depan. "Cepat atau lambat, warga Jakarta harus siap tinggal di rumah susun", demikian kata Gubernur KDKI Jakarta Surjadi Soedirdja. Dalam lima tahun ke depan, sampai 2000, Pemerintah DKI Jakarta memproyeksikan pengadaan rumah susun murah (RSM) sejumlah 15.750 unit atau per tahun 3.150 unit.

Namun alternatif RSM di Jakarta yang ditujukan bagi kalangan bawah masih menghadapi kendala. Antara lain, sulitnya mendapatkan lahan. Hal ini disebabkan oleh kompetisi pemanfaatan lahan yang sangat tinggi dalam dunia usaha properti sehingga menjadikan usaha pembangunan RSM kurang maksimal. Hal yang juga memberi pengaruh adalah karena pengadaan RSM tidak mampu mengacu pada hukum pasar, antara lain karena NJOP sudah tidak lagi menjadi pegangan utama.

Di samping itu, pengadaan RSM untuk kalangan bawah juga menghadapi kendala budaya yang menurut beberapa studi dan temuan Dinas Perumahan DKI Jakarta cukup menghambat dalam pengembangan RSM. Karena itu, semakin dirasakan pentingnya proses transformasi budaya manusia Jakarta yang berkaitan dengan perubahan budaya dan gaya hidup yang tadinya seenaknya dan sederhana menjadi pola hidup yang teratur dengan berbagai hak dan tanggung jawab mereka.

Berbeda dengan pengembangan hunian vertikal yang diperuntukkan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan atas, namun upaya untuk mengembangkan RSM bagi kelompok berpenghasilan rendah telah menjadi tekad dan terus dilakukan.

Sampai saat ini, pengembangan RSM selain telah dilakukan dengan membangun blok-blok Rumah Susun (Rusun) di lima wilayah Kota Jakarta, dibarengi dengan penyuluhan dan penerangan-penerangan pentingnya pembangunan Rusun. Adapun secara keseluruhan lokasi Rusun, baik yang statusnya sewa maupun sewa beli, berjumlah 27 lokasi di lima wilayah DKI Jakarta dan dikelola oleh PD Sarana Jaya, Perumnas, BPL Pluit maupun Yayasan Pulo Mas dengan tipe mulai dari T 14 sampai dengan T 54.

Selama Pelita VI, target pengadaan Rusun sebanyak 10.500 unit pertahun. Dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta hanya mampu menyediakan 30 persen dari kebutuhan yang ada, atau 3.150 unit per tahun. Sisanya, 7.450 unit diharapkan dipenuhi pihak swasta. Kesertaan swasta ini antara lain berdasarkan ketentuan kewajiban perusahaan pengembang yang ditetapkan dalam SK Gubernur KDKI Jakarta, Nomor 540/1990, tentang Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).



Kriteria pembangunan Rusun yang ditetapkan adalah, lokasinya sesuai dengan peruntukan untuk pemukiman, diprioritaskan di daerah kumuh dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kantong lahan kosong sebagai modal awal. Di samping itu, lokasinya juga harus cukup strategis, menunjang kegiatan bisnis dan dekat dengan lapangan kerja. Upaya yang terakhir ini dilakukan melalui peremajaan lingkungan yang selama 1992-1996 telah mampu mengembangkan 4.426 unit di atas lahan seluas 21,61 hektar.

Pengadaan Rumah Susun Mewah, Apartemen dan Kondomonium di Jakarta telah mulai dikembangkan sejak awal dekade 80-an, mengalami booming pada awal 90-an dan menurun kembali dalam permintaannya secara relatif terhadap pasokannya pada tahun 1994 serta diproyeksikan penurunan permintaan terhadap penyediaan akan mencapai puncaknya pada 1997.

Keberadaan Rumah Susun Mewah itu tidak hanya berada di pusat kegiatan bisnis seperti sekitar Jalan Juanda dan Pencenongan (Juanda Regency dan Redtop Square), tetapi juga di kawasan permukiman, seperti Permata Hijau Apartements maupun Jakarta Country Club di Senayan.

Adapun populasi terbesar ada di Jakarta Selatan, terdapat di Prapanca Luxury Apartement, Le Crystal, Beverly Tower, Garden Residences maupun Warung Buncit Apartment. Sementara itu, di kawasan Segi Tiga Emas terdapat Sahid Palace Executive Apartment, Liang Court, Park Royale, Taman Rasuna dan lain sebagainya.

Jumlah pasokan Rumah Susun Mewah di Jakarta, pada tahun 1995 mencapai 8.254 unit, naik sekitar 60 persen dari tahun sebelumnya dan pada 1996 diproyeksikan akan tersedia 18.878 unit serta pada 1997 akan kembali meningkat menjadi 31.067 unit. Sementara itu, tingkat hunian apartemen dan kondomonium di Jakarta mencapai puncaknya pada 1993 hampir mencapai 100 persen. Angka ini kemudian merosot pada tahun berikutnya menjadi 87 persen pada 1994, kembali merosot pada 1995 menjadi 80 persen dan diproyeksikan pada 1996 menjadi 77 persen dan pada 1997 merosot mencapai hingga tinggal 60 persen.

Menurut catatan Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) kapitalisasi dana yang dipakai untuk membangun Rumah Susun Mewah hingga awal 1993 telah mencapai Rp.3,1 triliun dan angka ini diperkirakan meningkat enam kali lipat bila dihitung dengan kondisi awal 1996.



SISTEM TRANSPORTASI UMUM MASSAL



Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) DKI Jakarta 2005, bahwa poros pertumbuhan Jakarta dikembangkan ke arah Timur-Barat dengan tujuan beban kota dan kemacetan yang terjadi akibat konsentrasi pengembangan pada beberapa wilayah dapat lebih didistribusikan ke bagian Timur dan Barat Kota Jakarta.

Di saat jam-jam tertentu, kemacetan masih merupakan masalah yang sulit dipecahkan, karena sekitar 1,5 juta lebih kendaraan saat ini berjajal di kurang dari 5.000 kilometer jalan. Ini berarti 300 kendaraan tiap kilometer jalan. Perkembangan rasio ini memang terasa lamban, karena memang rata-rata pertahun perkembangan jalan di Jakarta hanya 4 persen, sementara jumlah kendaraan yang memanfaatkan jalan-jalan tersebut bergerak rata-rata 15 persen per tahun. Di samping itu persimpangan jalan menjadi salah satu penyebab antrian panjang di lampu merah (traffic light), namun telah diatasi dengan mengambangkan jalan layang (fly over) dan jalan bawah tanah (under pass), walaupun masih belum dapat sepenuhnya mengurangi kemacetan lalulintas.

Sementara itu, rasio antara panjang jalan bila dibanding dengan luas keseluruhan wilayah Jakarta, memang masih relatif kecil. Menurut catatan Dinas Pekerjaan Umum, rasio jalan dan luas wilayah DKI Jakarta hanya sekitar 4,7 persen. Dibandingkan dengan salah satu sister city Jakarta, Tokyo misalnya Jalan di Tokyo mencapai 16,5 persen dari luas kotanya, jauh melampaui Jakarta.

Permasalahan kemacetan lalulintas di Jakarta disebabkan antara lain belum diterapkan penataan kawasan (zoning plan). Sampai saat ini pusat-pusat kegiatan masih terpusat, yang menyebabkan arus kendaraan menumpuk pada jam-jam tertentu. Masih kurangnya akses jalan sekunder, sehingga untuk menempuh jarak tertentu masih tergantung pada jalan utama. Upaya yang ditempuh antara lain pengembangan jalan layang dan bawah tanah, pelebaran jalan, pembuatan jalan-jalan kolektor (jaringan jalan) serta pengaturan manajemen lalu lintas.

Berdasarkan catatan Dinas Pekerjaan Umum, jumlah perjalanan warga Jakarta mencapai 8,9 juta per hari, diperkirakan akan meningkat menjadi 16,6 juta pada tahun 2010.

Untuk itu perencanaan Sarana Angkutan Umum Massal Jakarta (SAUMJ) atau mass rapid transportation (MRT) menjadi pilihan yang tepat.

Bersamaan dengan terus dikembangkannya kawasan permukiman di pinggiran kota, menuju ke arah Timur dan Barat sebagaimana diharapkan RUTR Jakarta 2005 dan telah memberi akibat pada bertambahnya jarak perjalanan penduduk, membutuhkan sistem angkutan massal yang cepat dan baik. Dalam hal ini, SAUMJ merupakan pilihan prioritas utama, termasuk dalam hubungannya dengan kawasan sekitarnya (Botabek), dan sarana angkutan yang dipilih adalah kereta api (KA) serta kereta cepat ringan (LRT/Light Rapid Transit), yang akan diintegrasikan dengan KA dalam kota.

Banyak keunggulan SAUMJ dengan Kereta Api, antara lain : polusi dapat ditekan, kecelakaan lalu lintas akan dapat ditekan dan tuntutan penyediaan areal parkir serta jaringan jalan baru akan berkurang.

SAUMJ dengan menggunakan jalur KA akan melayani rute Blok M-Kota dan rute Bekasi-Tangerang dan akan melayani pula pusat bisnis yang ada saat ini, seperti Segi Tiga Emas. Jaringan SAUMJ ini kelak akan menjangkau Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan semua itu terintegrasi dengan KA Jabotabek yang kini sudah ada.



Selanjutnya rencana pembangunan jalan layang susun tiga (Triple Decker), merupakan salah satu pilihan dan merupakan kombinasi antara jalan umum di lantai satu, LRT di lantai dua dan jalan tol di lantai tiga. Jalan tiga susun ini akan membentang arah utara-selatan. Jalan tol yang direncanakan akan dibangun sepanjang 23,55 km dengan 22 stasiun dan masing-masing stasiun berjarak 800 meter.

Kombinasi jalan tol dengan LRT itu akan dibangun mulai dari kawasan Bintaro (Jakarta Selatan) ke Jakarta Kota hingga persimpangan jalan pelabuhan. Jalur yang dilintasi Bintaro-Junction Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W2, Kebayoran Lama-Permata Hijau Fly Over - Kebon Kacang - Stasiun Tanah Abang - Kebon Sirih - Abdul Muis - Harmoni - Jalan Sukarjo - Mangga Besar - Stasiun Kota, dengan jarak 14,55 km.

Di samping itu juga akan ada lintasan tol dari JORR Antasari - Kemang - Blok M - Senayan, yang menyatu dengan kereta cepat ringan dan tol di Gelora Senayan sepanjang 9 km. Tol ini diperkirakan akan mampu dilintasi kendaraan sebanyak 101.383 kendaraan per hari. Adapun untuk LRT diharapkan dapat mengangkut 12.500 penumpang per arah per jam. Kapasitas ini bisa ditingkatkan sampai 40.000 penumpang.

Pengembang proyek ini adalah sebuah usaha patungan swasta PT. Jasa Marga dan Perumka, dan penandatanganan kesepakatan kerjanya telah dilakukan pada 21 April 1997.

Pada awalnya gagasan jalan tol terpadu akan melintas antara Blok M - Kota, kemudian dirubah menjadi Cinere - Kota dan belakangan kembali dirubah Cilandak - Kota, kemudian dikembangkan lagi menjadi Bintaro - Kota. Yang perlu diantisipasi adalah dengan adanya jalan tol yang langsung masuk ke kota, maka tekanan lalulintas terhadap kota Jakarta akan berat, karena para pemilik kendaraan pribadi dari Jakarta Selatan akan terangsang untuk menggunakan jalan tol tersebut ke Jakarta Pusat dan ke kawasan lainnya.

Pengembangan jalan layang susun tiga ini masuk ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta.

Selain rencana pembangunan jalan layang susun tiga, juga disiapkan pembangunan bentang jalan bawah tanah (sub-way) yang akan membentang dari Blok M - Jakarta Kota.

Proyek sub-way Blok M - Jakarta Kota ini telah menuntaskan dasar (basic design), dan kini Pemerintah DKI Jakarta dengan IJEG tengah memasuki pembahasan usulan pendanaan.

Dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota jasa, maka penanganan angkutan umum melalui program peningkatan sarana dan prasarana umum serta manajemen angkutan umum menjadi bagian yang sangat mendasar. Adapun tindak lanjut program tersebut adalah melalui penambahan jumlah bis besar, pembangunan feeder service/antar moda, pembangunan terminal dan penunjangnya serta pembangunan Sistim Angkutan Umum Massal Jakarta yang dilandaskan pada studi Consolidated Network Railways yang dirancang hingga tahun 2015. Sedangkan untuk program peningkatan manajemen umumnya dilakukan dengan menambah peran serta masyarakat dalam pelayanan angkutan umum penumpang.





JAKARTA KOTA PANTAI, PINTU GERBANG KOTA LEWAT LAUT

Perkembangan penduduk Jakarta masih tetap tinggi. Sedangkan luas lahan Jakarta merupakan faktor yang konstan, padahal kebutuhan untuk memenuhi perkembangan penduduk dan kota Jakarta dari waktu ke waktu semakin tidak bisa dihindarkan. Sementara relokasi ke kawasan sekitar searah dengan pengembangan poros pertumbuhan Jakarta 2005 yang dilakukan ke arah Timur-Barat terus diupayakan, tantangan abad mendatang telah demikian dekat di ambang.

Karena itu pembangunan terus dilaksanakan disegala bidang dan sektor, pada setiap kawasan. Jakarta sebagai pintu gerbang utama Indonesia melalui udara telah memiliki pelabuhan udara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun, sebagai wilayah yang mempunyai kawasan pantai cukup luas, Jakarta masih belum mempunyai tempat persinggahan pantai yang memadai.

Jakarta mempunyai Pelabuhan Tanjung Priok, Marunda dan juga Sunda Kelapa, tetapi fasilitasnya belum memadai dan belum menyatu dengan kegiatan sekitarnya, sehingga pengembangan Pantai Utara (Pantura) Jakarta menjadi satu pilihan. Dengan potensi dan melihat kejayaan masa lalu dari bangsa maritim ini, pengembangan Pantura juga diharapkan menjanjikan banyak harapan.

Melalui Keppres No. 54 / 95 pengembangan Pantura telah disetujui oleh Pemerintah Pusat yang dilakukan dengan mereklamasi Pantai Utara Jakarta seluas 2700 Ha. dan penataan kawasan eksisting sekitar 3500 Ha. Proyek yang dikenal dengan waterfront city (kota pantai) ini sudah diperkenalkan Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 1991, setelah melakukan kajian panjang termasuk oleh konsultan Belanda dan Australia.

Rencana pengembangan Pantura ini terutama mencakup pengembangan kawasan pantai yang mengandung nilai-nilai historis kawasan Pusat Niaga Utama (Central Business District), pelabuhan dan pemukiman. Melalui kegiatan reklamasi dan revitalisasi kawasan eksisting, upaya ini diharapkan akan memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat perdagangan dan perekonomian Indonesia. Lebih lanjut jika Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di kawasan Asia Tenggara, maka Jakarta dengan kawasan Panturanya akan menjadi salah satu

dari tiga pusat perdagangan regional penting. Rencana tersebut akan menyajikan lingkungan bermutu tinggi. Kombinasi antara kawasan pusat bisnis, pengembangan pemukiman serta pariwisata, hiburan dan bangunan bersejarah akan menciptakan suatu lingkungan yang dinamis dan berperan ganda di sepanjang teluk Jakarta yang akan lebih memantapkan Jakarta sebagai kota metropolitan bertaraf internasional.

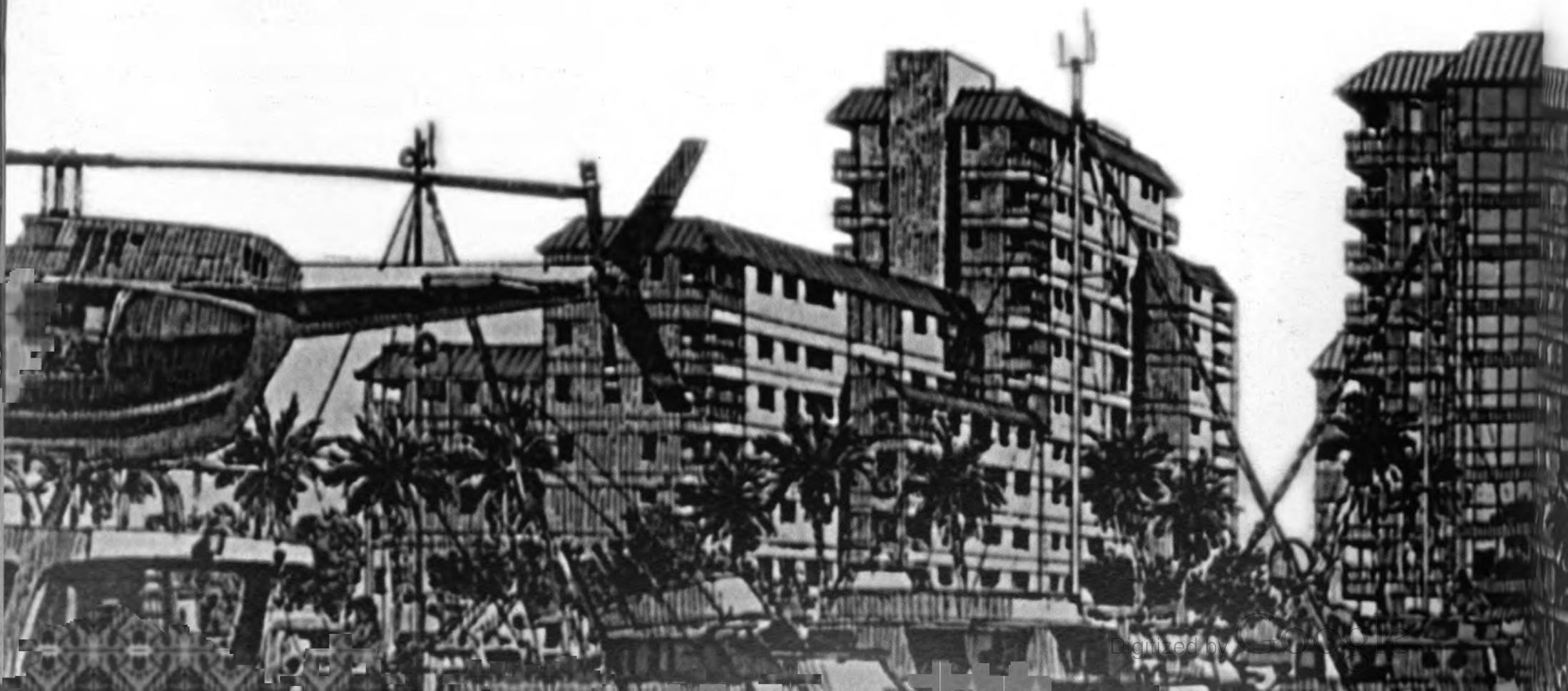
Untuk melengkapi obsesi itu, telah diadakan penelitian-penelitian teknik reklamasi yang sekaligus merupakan teknologi untuk penanggulangan banjir dan perbaikan lingkungan di kawasan eksisting.



Jaringan transportasinya akan dilayani oleh jaringan angkutan terpadu yang meliputi sistem kereta api dan jalan raya yang menyediakan pencapaian secara efisien dan cepat ke seluruh bagian kawasan. Tulang punggung dari sistem ini adalah Sistem Angkutan Massal (MRT) jalur utara-selatan yang direncanakan berakhir di salah satu terminal utama di kawasan Pusat Niaga Utama. Terminal ini juga akan menyediakan sarana transfer ke sistem LRT dan persimpangan jalan raya ke timur atau barat, serta fasilitas parkir yang besar.

"Kehadiran Kembali Jayakarta", menjadi salah satu tema dasar dalam pengembangan kota pantai. Ini dapat dimengerti karena proyek ini juga akan mengaitkan penataan lingkungan bangunan bersejarah, terutama di kawasan Muara Karang, pelabuhan Sunda Kelapa, Marunda dan sekitarnya sebagai bagian dari atraksi wisata Jakarta. Ini tentu saja menjadi demikian menarik karena khususnya Sunda Kelapa dan pernah menjadi pintu gerbang perekonomian Indonesia yang seolah-olah hilang ditelan arus kemajuan yang begitu deras.

Kenyataan ini telah menggugah Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun dan menata kembali kawasan Sunda Kelapa.. Melalui Program Revitalisasi Kali Opak, Pemerintah DKI Jakarta bertekat menggali dan melestarikan nilai-nilai sejarah sekaligus memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki pelabuhan ini.



Pemerintah DKI Jakarta, pada tanggal 22 Juni 1996 telah mencanangkan program tersebut yang bertujuan bahwa, "revitalisasi kawasan ini akan mengangkat citra, jati diri dan kebanggaan warga di samping pembangunan ekonomi kota khususnya kepariwisataan DKI Jakarta". Tantangan memang terbentang luas dihadapan, namun semangat perjuangan masa lalu tak akan pernah pudar. Semangat itulah yang kita butuhkan dalam pembangunan kota pantai abad ke 21 dengan misi mengangkat Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa yang mandiri dan berdaya saing tinggi sejajar dengan ibukota dunia lainnya.

Proyek pengembangan kota pantai Jakarta yang membentang dari Muara Angke di sisi Barat hingga Marunda di sisi Timur serta menggapai jarak sejauh 32 km dengan lebar 1,5 km serta menguruk lautan sampai kedalaman 8 meter dan diharapkan akan selesai pada tahun 2015.

Cukup banyak investor yang siap untuk turut menjadi pengembang kota pantai. Kenyataan ini nampaknya akan mengulang sukses raihan investasi dari keberadaan kota-kota pantai di beberapa kota dunia lain seperti Singapura, Hongkong, Tokyo, Baltimore, Toronto maupun Sydney yang oleh para investor itu dijadikan ladang bisnis yang menjanjikan banyak keuntungan.

Jika para pengembang melanjutkan proyek-proyeknya, bisa diduga, waterfront city akan menjadi pusat permukiman baru dalam skala besar. Alasannya jelas, akses jalan ke Jakarta sangat terbuka dan biaya pengurukan pantai lebih murah dibandingkan membebaskan tanah untuk pengembangan permukiman. Namun demikian, tantangan lingkungan yang dihadapinya membutuhkan pengelolaan dan pengontrolan yang sangat ketat.

Permasalahan lingkungan untuk pengembangan kota pantai ini sampai saat ini memang masih disarati kontroversi. Karena itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup menyatakan bahwa reklamasi Pantura Jakarta untuk pembangunan kota pantai harus dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) regional, karena pengembangan kota pantai menyangkut sangat banyak aspek dan antisipasi dini merupakan usaha yang paling bijaksana.

Diharapkan dari sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya harus dilakukan secara benar. Karena jika salah satu unsur tidak dilakukan dengan baik, maka reklamasi Pantura ini akan menimbulkan dampak negatif.

SUPER BLOK

Setelah berusia 471 tahun dan berada di alam merdeka setengah abad lebih Jakarta sebagai ibukota terus dipacu pembangunannya.

Ide pembangunan superblok ini diharapkan dapat memperbaiki konsep lama. Karena konsepnya tidak lagi mengikuti pola pengembangan sepanjang jalan ribbon development yang dibagi dalam bentuk kapling, tetapi merupakan komplek multi fungsi dan cukup menjanjikan banyak harapan, sehingga Pemerintah DKI Jakarta pun memberikan sejumlah kemudahan. Melalui SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor 25/1990, tentang Perencanaan Superblok. Pemerintah DKI Jakarta memberikan kelonggaran pada perusahaan pengembang yang membangun superblok dengan memberikan kelonggaran tingkat efisiensi lantai bangunan (KLB). Bahkan, melalui SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor 678/1994, kelonggaran itu semakin besar terutama diberikan kepada perusahaan pengembang yang membangun superblok di Sentra Primer dengan tingkat KLB lebih dari 5.

Di kawasan lain pusat Jakarta, pengembangan superblok yang cukup besar adalah Kota Baru Bandar Kemayoran yang dibangun oleh Badan Pengelola Komplek Kemayoran, berdiri di atas lahan seluas 420 hektar dan terbagi dalam 4 fungsi : Pusat karya, Pusat Wisma, Pusat Marga dan Pusat Suka yang terbagi dalam blok-blok.

Di atas tanah eks bandar Udara Kemayoran itu akan dibangun berbagai fasilitas bisnis. Antara lain, Jakarta International Trade fair, World Trade Centre, Perkantoran, Hotel dan Restoran. Dalam kawasan ini pekerja tidak perlu repot memikirkan hunian, karena akan dibangun 30.000 unit rumah susun, serta untuk jalan, trotoar, taman, saluran dan pusat olah raga disediakan lahan seluas 177,5 hektar. Diperkirakan di kawasan ini akan dihuni oleh 158.000 jiwa ditambah lagi dengan 120.000 orang yang bekerja di siang hari.





KERJASAMA ANTAR KOTA

Jalinan kerjasama antar kota dan daerah ini diharapkan dapat memberikan masukan pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing anggota. Dalam hal ini, Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengembangkan kerjasamanya dengan kota-kota di dalam negeri maupun dengan kota-kota mancanegara.

Untuk mengatasi masalah kependudukan, kesejahteraan sosial, dan kerjasama pembangunan dan ekonomi Pemerintah DKI Jakarta telah menjalin kerjasama dengan propinsi lain melalui beberapa mekanisme. Dwi Praja Utama dilakukan dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Panca Praja Utama dilakukan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sad Praja Utama dilakukan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sementara itu dengan propinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara dilakukan dalam rangka pengiriman transmigrasi penduduk DKI Jakarta.

Melalui Badan Kerjasama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI), yang merupakan satu badan semi pemerintah dan berada di bawah bimbingan Menteri Dalam Negeri, dilakukan melalui badan ini meliputi : Kerjasama dalam rangka peningkatan tugas dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan dan administrasi negara.

Dengan kota-kota mancanegara, Jakarta juga menjalin kerjasama kemitraan menyangkut bidang sosial, budaya, ekonomi dan pembangunan perkotaan yang didasarkan pada keinginan bersama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Jalinan kerjasama yang dimulai sejak 1973 ini lebih dikenal dengan pengembangan sister city. Masing-masing dengan Amsterdam, Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Casablanca, Los Angeles, Arkansas dan Berlin.



LINKUNGAN HIDUP

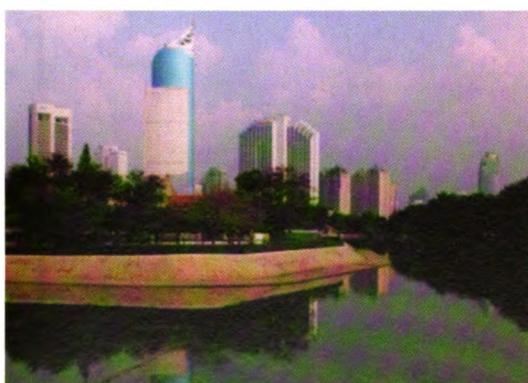
Bersamaan dengan terus dipacunya pembangunan, salah satu dampaknya adalah pada terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pemerintah DKI Jakarta telah melaksanakan program-program kebersihan, penghijauan dan kesehatan lingkungan serta berbagai program lain yang diharapkan dapat mengendalikan dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan itu sendiri. Upaya ini telah membawa prestasi, yakni dengan diterimanya 5 Piala Adipura, masing-masing Piala Adipura untuk Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kotamadya Jakarta Utara serta Adipura Kencana untuk Jakarta Pusat.

Lebih dari itu, dalam pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih), Jakarta dengan 13 sungai alam dan buatan menurut penilaian Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dianggap sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan sungai. adapun daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimasukan ke dalam Prokasih dan telah dilaksanakan sejak tahun 1989/1990 meliputi 5 DAS. Antara lain, kali Ciliwung, kali Cipinang, kali Mookervart (ketiganya dilakukan sejak 1989/1990) dan menyusul kemudian kali Grogol dan kali Cakung.

Sementara itu, untuk mengatasi pencemaran laut, dilaksanakan dengan Program Operasi Bersih Laut (Sibelut). Adapun untuk menjaga kualitas lingkungan udara Pemerintah DKI Jakarta di samping program Operasi Langit Biru, juga telah memanfaatkan monitor pemantau pencemaran udara yang telah dilakukan sejak tahun 1992 dan jumlah monitor yang dimanfaatkan telah mencapai 17 unit stasiun pemantau, terdiri dari 12 unit stasiun pemantau periodik mingguan dan 5 stasiun pemantau otomatis.

Secara bertahap mulai dikampanyekan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) bagi kendaraan angkutan umum dan sudah dimulai dengan beberapa bis dalam kota serta kendaraan dinas operasional Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 500 buah. Untuk mendukung program ini, kepada pengelola stasiun pompa bensin (SPB) agar membangun secara bertahap pompa BBG.

Dari hasil penelitian oleh ahli dari Swiss, bahwa apabila 75% kendaraan di DKI Jakarta menggunakan BBG, maka 50% polusi udara di Jakarta dapat teratasi. Selanjutnya Pemerintah DKI Jakarta telah pula mengadakan uji petik emisi gas buangan kendaraan bermotor.



PENGHIJAUAN

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan menciptakan udara yang sejuk, bersamaan dengan peresmian stasiun pemantau kualitas udara otomatis, telah dicanangkan program penanaman pohon bambu di lima wilayah kota (bamburigasi), dengan prioritas pada bantaran sungai (mencakup 13 sungai), sekitar situ dan waduk, area hutan kota, taman pemakaman umum (TPU) dan ruang terbuka hijau (RTH), "Bagaimanapun caranya, Jakarta harus hijau", demikian diungkap Gubernur KDKI Jakarta, H. Surjadi Soedirdja, dan komitmen ini diteruskan oleh Gubernur yang baru (Sutiyoso).

Untuk itu, Jakarta menentukan target kuantitatif ruang terbuka hijaunya (RTH) sebesar 26.450,40 Ha atau 40 persen dari luas wilayahnya. Walaupun sampai kini yang bisa dipenuhi baru 18.179,68 Ha, namun ini merupakan kemajuan tersendiri. adapun untuk menambah kekurangan Pemerintah DKI Jakarta ditempuh dengan refungsionalisasi taman dengan mengupayakan lokasi taman atau jalur hijau untuk dikembalikan ke fungsi asalnya. Bila kelak program ini tercapai, diperkirakan Jakarta akan memiliki tambahan RTH sebanyak 302 lokasi dan jalur hijau seluas 38.082 Ms.

Untuk yang terakhir ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedal) menyusun empat program yang diharapkan dapat mengantisipasi masalah lingkungan. Keempat program tersebut adalah : Pertama, diversifikasi energi dengan cara mengimbau semua kendaraan bermotor di Jakarta untuk menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) yang bebas timah hitam (Non-Knocking). Sampai saat ini di Jakarta telah ada 10 stasiun BBG dan 11 lokasi lagi sedang dalam proses. Di samping itu juga sejak Januari 1997 Pemerintah DKI Jakarta telah memulai uji emisi kendaraan bermotor. Kedua, program perbaikan konsep tata kota dengan memperbanyak ruang untuk hutan kota dan pepohonan dalam kota. Ketiga, mendorong penggunaan transportasi umum serta keempat, mendukung program kota mandiri.





SAMPAH

Selain permasalahan polusi udara yang sebagian besar disebabkan oleh tingginya populasi kendaraan bermotor di Jakarta dan menduduki peringkat ketiga setelah Mexico City dan Bangkok, ibukota Indonesia ini masih menghadapi masalah sampah yang cukup serius. Menurut perhitungan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, jumlah sampah yang diproduksi setiap hari oleh penduduk DKI Jakarta adalah sebanyak 25.824 M³. Sebagian besar diantaranya, 73,92 persen merupakan sampah organik dan 26,08 persen lainnya berupa sampah anorganik. Produksi sampah tersebut diangkut ke Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) yang lokasinya berada di Bantar Gebang, Bekasi yang jaraknya dari pusat Jakarta sekitar 48 km dengan sistem sanitary landfill sebesar 21.867 M³ per hari. Artinya setiap hari masih tersisa sampah sebanyak 3.957 M³.



BANJIR

*H*al lain yang tidak kalah serius dalam permasalahan lingkungan di DKI Jakarta adalah menyangkut ancaman banjir. Menurut catatan bencana banjir besar yang melanda Jakarta pernah terjadi berturut-turut pada tahun 1621, 1654, 1871, 1918, 1942, 1976 dan terakhir Januari 1996.

Banjir di Jakarta disebabkan oleh banyak faktor, antara lain :

Pertama, sekitar 40% (± 24.000 Ha) dari wilayah DKI Jakarta merupakan dataran rendah dan di beberapa lokasi di Jakarta seperti di Jakarta Utara berada 1 (satu) meter di bawah permukaan laut.

Kedua, adanya DAS (Daerah Aliran Sungai) ke 13 aliran sungai yang memiliki curah hujan tinggi, menyebabkan genangan air di beberapa tempat, daerah Jakarta Utara, walaupun tidak turun hujan. Keadaan akan menjadi merepotkan apabila datang musim hujan. Sementara kapasitas pengaliran sungai di hulu, tengah dan hilir semakin kecil, karena penumpukan sedimen maupun penyempitan aliran/alur sungai. Akibatnya beberapa sungai dari 13 sungai tadi yang hulunya ada di daerah Bogor/Puncak menjadi tidak sanggup menampung debit air yang semakin besar, sehingga terjadi banjir atau genangan.

Ketiga, adanya pasang air laut dan menimbulkan genangan air di beberapa daerah di Jakarta, meskipun tidak hujan karena faktor :

- Manusia membuang sampah dan tidak memperlakukan sungai sesuai fungsi yang sebenarnya (mereklamasi untuk permukiman).
- Turunnya permukaan tanah, karena akibat penyedotan besar-besaran air tanah oleh masyarakat.
- Kesadaran masyarakat tentang masalah banjir dan lingkungan masih kurang aktif.

Keempat, adalah terdapat 13 sungai alam dan buatan yang berhulu di kawasan Puncak, Bogor dan bermuara di Pantura, Jakarta.

Upaya untuk mengatasi banjir dengan membuat banjir Kanal dari pintu air Manggarai sampai Muara Angke (tahun 1918-1965), yaitu Polder Setiabudi yang diharapkan dapat mengatasi banjir di kawasan Setiabudi dengan luas 310 hektar dan Polder Melati untuk mengatasi banjir di jalan MH Thamrin dengan luas 185 hektar. Untuk penanganan kali Cideng Bawah/Krukut Bawah/ Kali Duri dibuat Polder Pluit yang diharapkan dapat mengendalikan banjir di Jakarta Kota dengan luas 2.550 hektar. Untuk penanganan kali Sekretaris, dibuat Polder Tomang yang diharapkan dapat mengatasi banjir di daerah Tomang Barat, dengan luas areal yang dilayani meliputi 150 hektar. Adapun untuk kali Grogol, dibuat Polder Grogol, dengan luas areal yang dilayani meliputi kawasan 100 hektar. Di samping itu juga dilakukan penanganan sodetan kali Grogol dan kali Pesanggrahan.

Upaya lain tentang penanganan banjir di Jakarta dilakukan dengan pengembangan dan penyempurnaan sarana yang dilakukan dengan memperpanjang Banjir Kanal Barat dengan memotong Kali Angke di Pesing. Untuk Kali Grogol dialihkan dengan mengembangkan Cengkareng Drain untuk melayani areal 7.500 hektar. Disusul kemudian dengan mengembangkan Banjir Kanal Timur.

Sarana pengendali banjir yang telah selesai dilaksanakan di Jakarta telah dapat melayani areal 8.170 hektar. Dengan rincian, sebanyak 4.100 hektar dilakukan dengan sistem Polder (waduk dan pompa) dan 4.070 hektar dilakukan dengan sistem normalisasi sotetan.

Setelah banjir awal 1996, Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat (Departemen Pekerjaan Umum), melakukan langkah cukup mendasar dalam pengelolaan banjir, antara lain dilakukan dengan meningkatkan dan menyempurnakan pengendalian banjir di bagian Timur dan Barat ke Jakarta, pembuatan sotetan di hulu kali Ciliwung ke kali Cisadane untuk mengurangi aliran kali Ciliwung menghubungkan sungai-sungai di bagian Timur Jakarta, yang meliputi kali Sunter-Buaran yang diharapkan sebagai alternatif pembangunan Banjir Kanal Timur serta mengamankan dan membatasi pembangunan Daerah Aliran Sungai di hulu.





JAKARTA, JAKARTA



J

akarta terus berkembang dengan tiada henti, dengan beberapa catatan yang perlu dicermati. *Pertama*, daya dukung lahan dan lingkungan terbatas, sementara jumlah penduduk terus bertambah dengan aktivitas kehidupan yang semakin tinggi.

Kedua, masih terdapat permukiman yang tersebar di lima wilayah Kotamadya, walaupun penduduk miskin makin berkurang.

Ketiga, tingginya tingkat pengangguran tenaga kerja terdidik.

Keempat, pemerataan pendapatan masyarakat yang belum optimal dan cenderung semakin tidak merata (gini ratio makin melebar).

Kelima, masih tingginya kegiatan ekonomi sektor informal dari 917.745 unit usaha, 91% adalah usaha skala kecil informal dan dari 3,2 juta orang yang bekerja di DKI Jakarta, 27,7% bekerja di sektor informal.

Keenam, semakin terbatasnya dan semakin rendahnya kualitas sumber daya air, sementara penggunaan air tanah dalam (sumur) cenderung meningkat.

Ketujuh, belum memadainya sistem angkutan umum massal.

Kedelapan, masih terjadinya ancaman banjir setiap tahun walaupun perencanaan penanggulangannya telah lama direncanakan.

Kesembilan, masih rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat.

Isyarat ini tentu saja mengandung beragam implikasi. Salah satu yang tidak dapat dipungkiri adalah jika lahan pertanian makin menyempit, akibat pemekaran kota, maka masalah penyediaan pangan tentu akan menjadi masalah yang paling butuh perhatian.

Dalam amanat tersebut, Kepala Negara juga menyatakan bahwa, menjelang 2019 di Indonesia akan timbul 15 kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, termasuk empat diantaranya berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa. Implikasi-implikasi sosial-ekonomis dan budaya yang akan terjadi akibat perkembangan tersebut akan saling kait-mengait, sehingga perlu dicermati oleh para perencana pembangunan, termasuk Jakarta yang saat ini telah masuk diantara 23 megapolis dunia atau satu diantara 13 megapolis Asia.

Berbagai dampak dan kendala yang timbul dari gejala urbanisasi yang saat ini sudah terjadi dengan ditandai membengkaknya penduduk Jakarta mendekati 10 juta jiwa, kemacetan lalu lintas, kejahatan, masalah sosial, pencemaran lingkungan, banjir, lahan yang makin sempit, dan sebagainya.



AGENDA 21

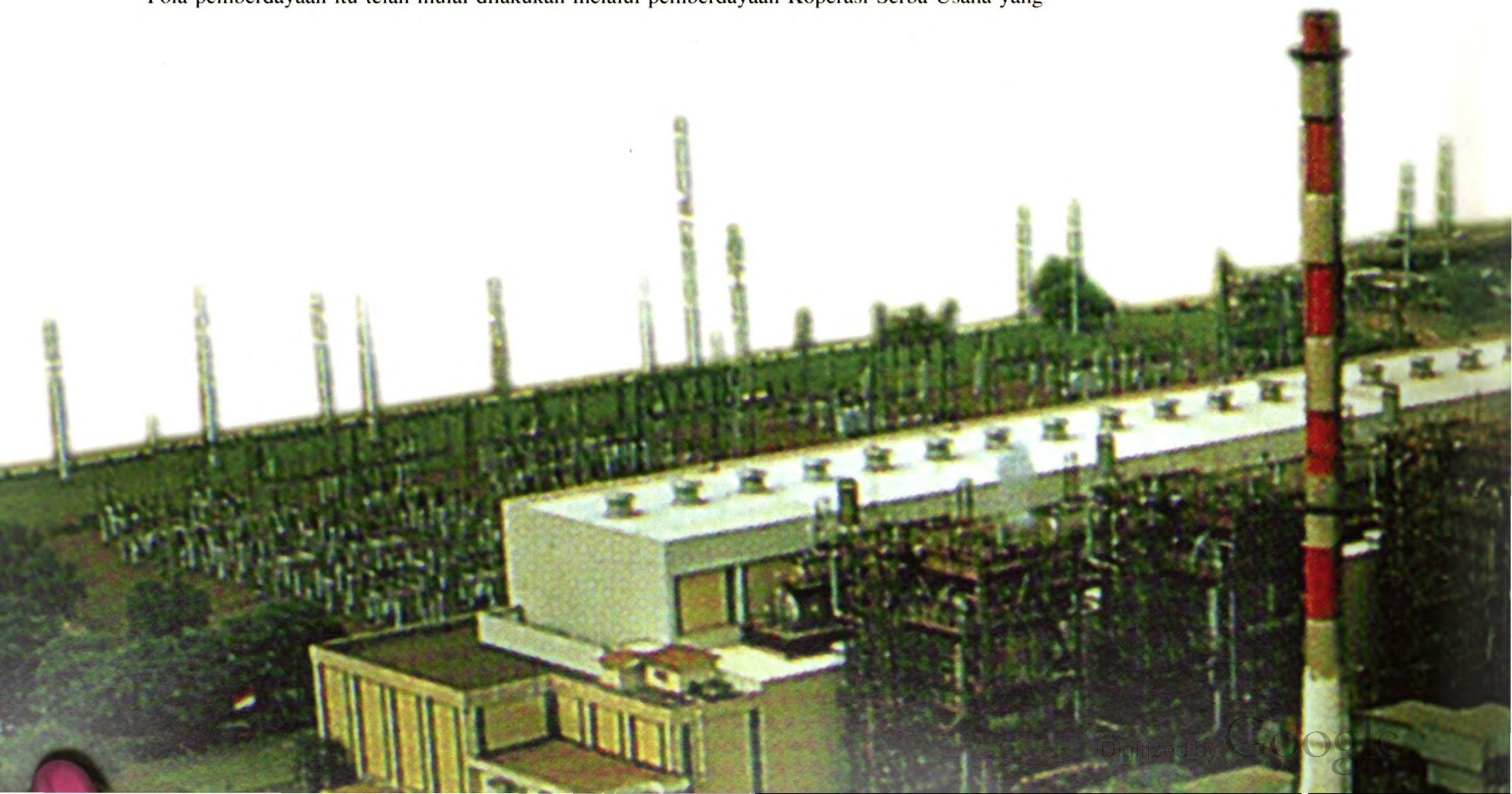
Dalam peta permasalahan yang demikian luas cakupan dan implikasinya, diperlukan adanya suatu inventarisasi permasalahan pembangunan Jakarta.

Globalisasi yang mengait pada beberapa hal dengan arus informasi yang demikian hebat dan telah menempatkan Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia sebagai kota yang sangat strategis untuk pemasaran, pusat bisnis dan produksi bagi industri jasa yang advanced. Implikasi dari kenyataan ini adalah pada berkembangnya masyarakat industri perkotaan dengan basis bisnis jasa, perdagangan, retail dan pasar swalayan skala besar dengan distribusi yang jauh menembus pojok-pojok kota. Jangkauan layanan konsumen pun menjadi sangat luas akibat tingginya mobilitas, kemajuan teknologi komunikasi dan sistem pemasaran.

Pola ini akan mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi secara bertahap dari peranan ekonomi rumah tangga masyarakat golongan menengah dan bawah ke pada jaringan jasa dan perdagangan yang mempunyai kapitalisasi sangat besar.

Realitas ini secara konseptual didukung oleh strategi Jakarta yang ingin mewujudkan diri menjadi kota jasa (service city) secara baik dan benar melalui koperasi-koperasi.

Pola pemberdayaan itu telah mulai dilakukan melalui pemberdayaan Koperasi Serba Usaha yang





programnya dikenal dengan **Sejuta Anggota Warung Serba Ada** (Waserda). Pola pemberdayaan ini untuk dapat menyelamatkan usaha menengah dan kecil bertumpu pada hasil-hasil produksi usaha skala kecil yang ada di lingkungan-lingkungan penduduk.

Pergeseran populasi dari empat kali sensus penduduk yang dilakukan Biro Pusat Statistik maupun laporan registrasi penduduk yang dilakukan aparat Kelurahan, nampak bahwa Jakarta kini tengah mengalami pergeseran populasi dua pola, yakni proses invasi ke dalam kota dan proses menggeser ke luar kota.

Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah dan migran dari pedesaan akan tetap berdatangan ke kota Jakarta dan bermukim di kampung-kampung. Akibatnya, metropolitan Jakarta tetap terbebani dan dipaksa untuk bertransformasi menjadi sebuah urban containment raksasa dengan kepadatan manusia yang makin melampaui ambang batas kewajaran.

Realitas ini dengan mudah dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk di pusat kota yang cenderung terus menurun, sementara di wilayah pinggiran Jakarta serta penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang justru meningkat pesat.

Perbedaan sosial. Semakin besarnya gini ratio di ibukota menjadi salah satu cerminan melebarnya perbedaan tingkat sosial penduduk ibukota.

Dalam hal ini, Pemerintah DKI Jakarta telah berupaya memecahkan permasalahan yang ada ini dengan menganjurkan gedung-gedung bertingkat di kawasan Thamrin-Sudriman agar membuka tembok pemisah antara kavling maupun dengan menganjurkan agar gedung-gedung tersebut memberikan sedikit ruangnya guna mengakomodasi pedagang informal perkotaan.

Segregasi Kota, Kenyataan ini pun jauh-jauh hari telah diantisipasi Pemerintah DKI Jakarta melalui berbagai program yang pada intinya menekankan pada tiga pembinaan (Tri-Bina) : Bina Sosial, Bina Ekonomi, dan Bina Lingkungan.

Permukiman Kumuh. Urban containment yang dihuni masyarakat berpenghasilan rendah, baik yang berupa permukiman kumuh yang dibangun di atas tanah legal (slum) maupun permukiman kumuh yang dibangun di atas tanah illegal (squatter), pada dasarnya merupakan kristalisasi dari permasalahan permukiman kumuh perkotaan.

Pilihan penyelesaian permasalahan lingkungan kumuh di Jakarta cukup beragam, baik melalui penataan kampung dan pemberdayaan penduduknya (Proyek MHT, Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu/PPWT, IDT, INGUB 230/1993 serta SKGUB 1079/1995), maupun dengan mewajibkan para pengembang untuk membangun Rumah Susun Murah (RSM) seluas 20 persen dari lahan yang dikomersilkannya, sebagaimana diatur dalam SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990.







Agenda permasalahan, pada milenium mendatang menjadi catatan dengan garis bawah agar Jakarta yang menjadi barometer kota-kota di Indonesia lainnya dapat memanifestasikan motto Teguh Beriman secara sungguh dan utuh.



I-99-503430

18 UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by Google